



**TUGAS AKHIR - RP 141501**

**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  
MARITIM DI WILAYAH BRONDONG-PACIRAN,  
KABUPATEN LAMONGAN**

**GEMA PATRIA MAHAPUTRA  
0821144000073**

Dosen Pembimbing  
Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2018



**TUGAS AKHIR - RP 141501**

**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  
MARITIM DI WILAYAH BRONDONG-PACIRAN,  
KABUPATEN LAMONGAN**

**GEMA PATRIA MAHAPUTRA  
0821144000073**

**Dosen Pembimbing  
Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2018**



**FINAL PROJECT - RP 141501**

**DIRECTION OF MARITIM INDUSTRIAL ESTATE  
DEVELOPMENT IN BRONDONG-PACIRAN AREA,  
LAMONGAN REGENCY**

**GEMA PATRIA MAHAPUTRA  
0821144000073**

**Supervisor  
Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg.**

**Departement of Urban and Regional Planning  
Faculty of Architecture, Design and Planning  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI**  
**MARITIM DI WILAYAH BRONDONG-PACIRAN,**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik  
Pada  
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

**GEMA PATRIA MAHAPUTRA**  
NRP. 0821144000073

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :



**Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rerreg**

NIP. 196107261989031004



SURABAYA, JULI 2018

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  
MARITIM DI WILAYAH BRONDONG-PACIRAN,  
KABUPATEN LAMONGAN**

Nama Mahasiswa : Gema Patria Mahaputra  
NRP : 08211440000073  
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Dosen Pembimbing : Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg

**ABSTRAK**

*Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang industri maritim. Penetapan sebagai kawasan ekonomi khusus tersebut tidak terlepas dari potensi infrastruktur dan ketersediaan lahan yang cukup di Kabupaten Lamongan. Pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan telah direncanakan pada lahan seluas 4.000 Ha namun hingga saat ini masih belum terdapat proses pembangunan kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim di wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan.*

*Tahapan awal penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di kawasan industri maritim dengan metode content analysis. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi alur kegiatan industri yang ada di kawasan industri maritim dengan deskriptif komparatif kemudian mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri dengan analisis Delphi dan tahap terakhir adalah merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong*

*pengembangan kawasan industri dengan analisis deskriptif komparatif dan analisis Delphi.*

*Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa permasalahan yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan adalah pembebasan lahan, jaringan air bersih, jaringan transportasi, industri pendukung dan kelembagaan. Pengembangan yang dapat dilakukan berupa pendekatan dengan pemilik lahan yang didampingi oleh tokoh masyarakat dan BPN, pengelolaan air bersih secara mandiri, pelebaran jalan dan menghubungkan kawasan dengan jalan tol, pembentukan klaster industri pendukung dan pembentukan kelembagaan pengelola kawasan industri.*

**Kata Kunci:** *Kawasan Industri, Industri Maritim, Infrastruktur, Kawasan Ekonomi Khusus, Pengembangan Kawasan*

**DIRECTION OF MARITIM INDUSTRIAL ESTATE  
DEVELOPMENT IN BRONDONG-PACIRAN AREA,  
LAMONGAN REGENCY**

Name : Gema Patria Mahaputra  
NRP : 08211440000073  
Departement : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Supervisor : Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg

**ABSTRACT**

*Lamongan Regency is one of the regencies determined as Special Economic Zone (SEZ) in maritime. The determination as special economic zone is separated from the adequate potential infrastructure and land availability in Lamongan Regency. Maritime industrial estate development in Lamongan had been planned on an area of 4,000 Ha but there had been no development process of the area yet. Therefore, the research aimed to formulate the direction of maritime industrial estate development in Brondong-Paciran area, Lamongan Regency.*

*The initial stage of the study was identification of problems existing in the maritime industrial estate using content analysis method. The next stage was identification of industrial activities flow existing in the maritime industrial estate using descriptive comparative analysis, then identification of the supporting factors of industrial estate development using descriptive comparative analysis and Delphi analysis.*

*The result of the study showed that the problems existing in the maritime industrial estate of Lamongan Regency were land acquisition, clean water network,*

*transportation network, supporting industries, and institutional. The development that can be done was in form of approach to land owner accompanied by public figure and BPN, independent clean water management, road widening, and connecting the area to toll road, formation of supporting industrial clusters, and formation of industrial estate management institutional.*

**Keywords:** *Industrial Estate, Maritime Industry, Infrastructure, Special Economic Zone, Regional Development*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat atas segala limpahan rahmt dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul **“Arahan Pengembangan Kawasan Industri Maritim di Wilayah Brondong-Paciran, Kabupaten Lamongan”** dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin megucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua dan kakak penulis atas perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dari awal hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Ardy Maulidy, ST. MT. Selaku dosen wali penulis.
4. Pihak-pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Laporan Tugas Akhir ini
5. Teman – Teman Apis Dorsata

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dan berarti bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Terima Kasih

Suabaya, 19 April 2018

Penulis

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	4
1.3    Tujuan dan Sasaran.....	5
1.3.1    Tujuan.....	5
1.3.2    Sasaran.....	5
1.4    Ruang Lingkup.....	5
1.4.1    Ruang Lingkup Wilayah Studi.....	5
1.4.2    Ruang Lingkup Pembahasan .....	9
1.4.3    Ruang Lingkup Materi.....	9
1.5    Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1    Manfaat Teoritis .....	9
1.5.2    Manfaat Praktis .....	9
1.6    Sistematika Penulisan.....	10
1.7    Kerangka Berpikir .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1    Pengertian Kawasan Industri.....	13
2.2    Teori Klaster Industri .....	14
2.3    Ekonomi Maritim .....	15
2.4    Industri Maritim.....	18
2.5    Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri 19	
2.6    Sintesa Kajian Pustaka.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1    Pendekatan Penelitian .....	37
3.2    Jenis Penelitian .....	37
3.3    Variabel Penelitian.....	38
3.4    Populasi dan Sampel .....	40
3.5    Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5.1.    Metode Pengumpulan Data Primer.....	42
3.5.2.    Metode Pengumpulan Data Sekunder .....	43
3.6    Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1    Identifikasi permasalahan di kawasan industri maritim	44
3.6.2    Identifikasi alur kegiatan industri yang ada di kawasan industri maritim .....	47
3.6.3    Identifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri .....	48

3.6.4	Perumusan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri .....	49
3.7	Tahapan Penelitian.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>55</b>
4.1	Gambaran Umum Profil Wilayah Studi.....	55
4.1.1	Kondisi Fisik.....	55
4.1.2	Lahan untuk Kawasan Industri .....	56
4.1.3	Sumberdaya Manusia .....	57
4.1.4	Sumber Daya Ikan.....	58
4.1.5	Pertambangan.....	60
4.1.6	Angkutan Laut .....	61
4.1.7	Jaringan Jalan.....	63
4.1.8	Jaringan Air Bersih .....	63
4.1.9	Jaringan Drainase.....	66
4.1.10	Jaringan Telekomunikasi.....	66
4.1.11	Jaringan Listrik .....	66
4.1.12	Jaringan Persampahan dan Limbah.....	67
4.1.13	Sektor Industri Maritim Kabupaten Lamongan 67	
4.1.14	Investasi Industri di Kabupaten Lamongan ..	73
4.2	Kesesuaian Tata Ruang.....	81
4.3	Analisis dan Pembahasan.....	82

4.3.1	Identifikasi Permasalahan yang ada di Kawasan Industri Maritim .....	82
4.3.2	Identifikasi Alur Kegiatan Industri Maritim.....	98
4.3.3	Identifikasi Faktor-Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Industri .....	103
4.3.4	Analisis Arah Pengembangan Kawasan Industri Maritim Berdasarkan Faktor-Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Industri .....	112
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>		<b>131</b>
5.1	Kesimpulan.....	131
5.2	Rekomendasi .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>135</b>
	Lampiran 1 Desain Survey .....	139
	Lampiran 2 Lembar Kode.....	142
	Lampiran 3 Pedoman Wawancara Sasaran 1 dan 2 ....	143
	Lampiran 4 Responden Content Analysis .....	149
	Lampiran 5 Hasil Wawancara Sasaran 1 .....	151
	Lampiran 6 Kuisisioner Wawancara Delphi.....	167
	Lampiran 7 Hasil Wawancara Delphi Tahap I.....	171
	Lampiran 7 Hasil Wawancara Delphi Tahap II.....	188
	Lampiran 8 Kuisisioner Wawancara Delphi Arah Pengembangan.....	192
	Lampiran 9 Hasil Wawancara Delphi Arah Pengembangan.....	196

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Sintesa Tinjauan Pustaka dan Indikator .....	27
<b>Tabel II. 2</b> Variabel Penelitian.....	32
<b>Tabel III. 1</b> Variabel Penelitian .....	38
<b>Tabel III. 2</b> Analisa Stakeholder .....	41
<b>Tabel III. 3</b> Kepakaran Responden Terpilih.....	41
<b>Tabel III. 4</b> Tahap Analisis Data .....	43
<b>Tabel III. 5</b> dentifikasi permasalahan di kawasan industri maritim.....	45
<b>Tabel III. 6</b> Identifikasi alur kegiatan yang ada di kawasan industri maritim.....	47
<b>Tabel III. 7</b> Identifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri .....	48
<b>Tabel III. 8</b> Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri .....	50
<b>Tabel IV. 1</b> Jumlah Industri, Pekerja dan Nilai Investasi Menurut Industri di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 .....	57
<b>Tabel IV. 2</b> Produksi Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016.....	58
<b>Tabel IV. 3</b> Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 .....	58
<b>Tabel IV. 4</b> Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 .....	59
<b>Tabel IV. 5</b> Data Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tahun 2015.....	60
<b>Tabel IV. 6</b> Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Kawasan Pelabuhan.....	61

<b>Tabel IV. 7</b> Panjang Jalan Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran Menurut Pengelolaannya Tahun 2016 .....	63
<b>Tabel IV. 8</b> Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran Tahun 2016 .....	63
<b>Tabel IV. 9</b> Wilayah Pelayanan PDAM Kabupaten Lamongan .....	64
<b>Tabel IV. 10</b> Laporan Posisi Sambungan Pelanggan Unit Pelayanan Brondong Bulan Januari 2018 .....	65
<b>Tabel IV. 11</b> Rekap DRD Unit Pelayanan Brondong Bulan Januari 2018.....	65
<b>Tabel IV. 12</b> Jumlah Pelanggan Listrik berdasarkan Jenis Pelanggan.....	67
<b>Tabel IV. 13</b> Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Kawasan Industri.....	68
<b>Tabel IV. 14</b> IKM Perkapalan di Kabupaten Lamongan .....	70
<b>Tabel IV. 15</b> Data Industri Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017.....	72
<b>Tabel IV. 16</b> Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Utara.....	75
<b>Tabel IV. 17</b> Tabel Pemahaman Data Identifikasi Permasalahan yang ada di Kawasan Industri Maritim.....	85
<b>Tabel IV. 18</b> Hasil Identifikasi Permasalahan yang ada di Kawasan Industri Maritim .....	96
<b>Tabel IV. 19</b> Hasil Identifikasi Isu dan Permasalahan Alur Kegiatan Industri Maritim .....	103
<b>Tabel IV. 20</b> Rekapitulasi Delphi Tahap 1 .....	104
<b>Tabel IV. 21</b> Rekapitulasi Delphi Tahap 2 .....	111
<b>Tabel IV. 22</b> Perumusan Arah Pengembangan Berdasarkan Perbandingan Sasaran 1 dan 3 .....	113

<b>Tabel IV. 23</b> Perumusan Arah-an Pengembangan Berdasarkan Perbandingan Sasaran 2 dan 3.....	117
<b>Tabel IV. 24</b> Rekapitulasi Delphi Arah-an Pengembangan .....	120
<b>Tabel IV. 25</b> Penjabaran Pihak yang Terkait Arah-an Pengembangan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan.....	127

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I. 1</b> Peta Administrasi Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.....	7
<b>Gambar III. 1</b> Alur Proses Content Analysis .....	46
<b>Gambar IV. 1</b> Kondisi Lahan di Wilayah Peruntukan Industri .....	93
<b>Gambar IV. 2</b> Kondisi Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik di Wilayah Peruntukan Industri.....	94
<b>Gambar IV. 3</b> Kondisi Jalan Menuju Kawasan Industri (Jl. Raya Deandles) .....	95
<b>Gambar IV. 4</b> Alur Kegiatan Galangan Kapal Reparasi dan Bangunan Baru .....	99
<b>Gambar IV. 5</b> Alur Kegiatan Industri Perkapalan Rakyat (IKM) .....	99
<b>Gambar IV. 6</b> Alur Kegiatan Industri Pengolahan Ikan ....	100
<b>Gambar IV. 7</b> Alur Kegiatan Logistik .....	101
<b>Gambar IV. 8</b> Alur Kegiatan Pergudangan.....	102
<b>Gambar IV. 9</b> Alur Kegiatan Pergudangan dan Logistik ..	102

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan perekonomian. Sumber daya manusia juga melimpah yang bisa menjadi potensi sekaligus menciptakan peluang pasar yang bisa menggerakkan perekonomian. Di Indonesia, Industri Pengolahan Non Migas masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2012 (Kementerian Perindustrian, 2012). Sesuai dengan data EPS yang diolah Kementerian Perindustrian pada triwulan III 2012 misalnya, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 7,3% tiap tahunnya. Walaupun industri migas mengalami kontraksi sekitar 5%, namun tingginya pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas mengakibatkan Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 6,4% tiap tahunnya. Sektor Industri Pengolahan menjadi motor pertumbuhan utama dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan III 2012 dan merupakan pertumbuhan tertinggi kedua di Asia setelah China, dan ke-5 tertinggi di dunia (Kementerian Perindustrian, 2012).

Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) dari tujuh kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008. Tujuan penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar berjalan lebih cepat lagi di suatu daerah provinsi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Lamongan, sektor industri di kabupaten ini termasuk kedalam enam aspek yang mempengaruhi pendapatan daerahnya meskipun

belum menjadi sektor basis (BPS Kabupaten Lamongan, 2016).

Pengembangan kawasan industri di kabupaten Lamongan itu didukung oleh pemerintah pusat dengan telah ditetapkan bahwa Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban akan dikembangkan sebagai klaster industri pelayaran (Santoso, 2014). Klaster industri pelayaran tersebut sebagai upaya mendukung agenda prioritas Nawa Cita dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor maritim di Indonesia.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan baik berupa potensi infrastruktur yang ada seperti jalan arteri, waduk, sungai besar, pelabuhan khusus dan rel kereta api, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan wilayah utara Kabupaten Lamongan khususnya kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor industri maritim yang akan segera dikembangkan dengan tahap awal disediakan areal lahan sekitar 200 hektar. KEK industri maritim itu akan difokuskan pada industri perkapalan dan sarana lepas pantai mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi produksi, reparasi/pemeliharaan, pemasaran baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor (Kementerian Perindustrian, 2011). Perusahaan pengguna industri maritim itu di Jawa Timur mencapai 21 perusahaan dimana sebagian besar operator pelayaran dengan total investasi sebesar Rp 12,738 triliun yang menunjukkan bahwa minat investasi akan industri maritim di Jawa Timur cukup tinggi. Perusahaan – perusahaan tersebut meliputi industri galangan kapal, jasa pengeolahan kepelabuhan, industri pengolahan ikan, industri migas, industri pakan ternak, industri pupuk, industri gula dan industri wisata bahari (Hakim, 2012). Sedangkan di provinsi juga terdapat 39 perusahaan yang bergerak di sektor industri pelayaran rakyat.

Di Kabupaten Lamongan, telah ada tiga perusahaan yang bergerak di sektor kemaritiman, yaitu *Lamongan Marine Industry* (LMI), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS) (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017). Menurut rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk pengembangan KEK sektor industri maritim di Kabupaten Lamongan akan memakan investasi sebesar Rp 9 triliun, dengan total luas lahan yang disiapkan untuk KEK industri maritim mencapai 4.000 hektar (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2015).

Keberadaan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan ini didukung oleh tiga pelabuhan besar di sekitar kawasan Industri Maritim, yakni Pelabuhan Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong, dan pelabuhan ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) Paciran. Pelabuhan Sedayulawas melayani bongkar muat untuk komoditas utama seperti sembako, kayu, dan BBM. Sementara itu Pelabuhan Samudera Brondong adalah pelabuhan ikan, dan telah dilakukan pembangunan dermaga pelabuhan. Sedangkan pelabuhan ASDP Paciran direncanakan akan melayani rute Lamongan – Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Lamongan-Balikpapan, Banjarmasin, Makassar dan Kupang (Hakim, 2012).

Namun dengan kondisi eksisting yang ada, masih belum optimalnya pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut terlihat dari 4.000 hektar lahan yang disediakan oleh pemerintah, baru 200 hektar lahan yang akan dibangun atau hanya 5% dari lahan yang disediakan, bahkan dari lahan tersebut masih dalam proses pembebasan lahan. Dengan demikian, guna membantu dalam pengembangan kawasan industri maritim di Kawasan Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan diperlukan penelitian mengenai arahan pengembangan kawasan industri maritim di wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini nantinya

dapat digunakan sebagai pendukung pemerintah dalam pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan kawasan industri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi, Hal ini terlihat dari berbagai rencana pengembangan yang telah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan kabupaten ini. Di dalam RTRW Nasional Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) dari tujuh kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan wilayah utara Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor industri maritim. Perusahaan pengguna industri maritim itu di Jawa Timur mencapai 21 perusahaan dimana sebagian besar operator pelayaran sedangkan di Kabupaten Lamongan telah ada tiga perusahaan yang bergerak di sektor kemaritiman, yaitu *Lamongan Marine Industry* (LMI), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS). Keberadaan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan ini didukung oleh tiga pelabuhan besar di sekitar kawasan Industri Maritim, yakni Pelabuhan Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong, dan pelabuhan ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) Paciran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki banyak sekali potensi untuk dikembangkan, namun jika melihat fakta empiris di lapangan masih belum optimalnya pengembangan industri maritim yang telah direncanakan tersebut. Terlihat dari 4.000 hektar lahan yang disediakan,

baru 200 hektar yang akan dibangun atau hanya 5% dari lahan yang disediakan oleh pemerintah dan masih pada tahap pembebasan lahan, sehingga dibutuhkan sebuah penelitian tentang arahan pengembangan kawasan industri maritim di wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan sehingga dapat memaksimalkan potensi yang sudah ada. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan yakni “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan industri maritim di Kawasan Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan?”

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim di wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan.

#### **1.3.2 Sasaran**

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di kawasan industri maritim
2. Mengidentifikasi alur kegiatan industri yang ada di kawasan industri maritim
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri
4. Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri

### **1.4 Ruang Lingkup**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi**

Ruang lingkup wilayah studi penelitian ini adalah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang secara geografis terletak di belahan utara, kurang lebih 50 Km dari Ibu Kota kabupaten Lamongan, berada pada koordinat antara 06° 53' 30,81" – 7° 23'6"

Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 17' 01,22''$  –  $112^{\circ} 33'12''$  Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Batas Utara : Laut Jawa
- Batas Selatan : Kecamatan Laren
- Batas Timur : Kabupaten Gresik
- Batas Barat : Kabupaten Tuban



Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitek, Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2017

### JUDUL PENELITIAN

Arahan Pengembangan  
Kawasan Industri Maritim  
Berdasarkan Faktor - Faktor Pendorong  
Percepatan Pembangunan Kawasan Industri  
di Kawasan Brondong - Paciran,  
Kabupaten Lamongan

### JUDUL PETA

Peta Ruang Lingkup Wilayah Studi

### LEGENDA

-  Wilayah Studi
-  Kecamatan
-  Kabupaten



1:250,000



*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

- Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempercepat pengembangan kawasan industri maritim seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, regulasi dan lain sebagainya
- Aspek yang termuat di dalamnya meliputi faktor-faktor yang mempercepat pengembangan kawasan industri yaitu sarana dan prasarana, lingkungan, ketersediaan aksesibilitas dan aspek penunjang lainnya
- Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini juga dibatasi pada kondisi eksisting di lapangan

#### **1.4.3 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup substansi materi yang akan dibahas dan dijadikan dasar bagi penelitian Arahan Pengembangan Kawasan Industri Maritim di Wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan ini meliputi teori-teori yang berkaitan dengan sasaran yakni:

- Teori – Teori Industri Maritim
- Teori – Teori Ekonomi Maritim
- Teori – Teori Pengembangan Industri
- Teori – Teori Kawasan Industri
- Teori –Teori Cluster Industri

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini yakni dapat memperkaya referensi dalam pengembangan dan perencanaan industri dalam koridor ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini yakni memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Lamongan berupa arahan pengembangan kawasan industri maritim sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Lamongan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian, sistematika penelitian, dan kerangka berpikir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi landasan-landasan teori dari penelitian yang akan dibahas

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis, serta tahapan analisis.

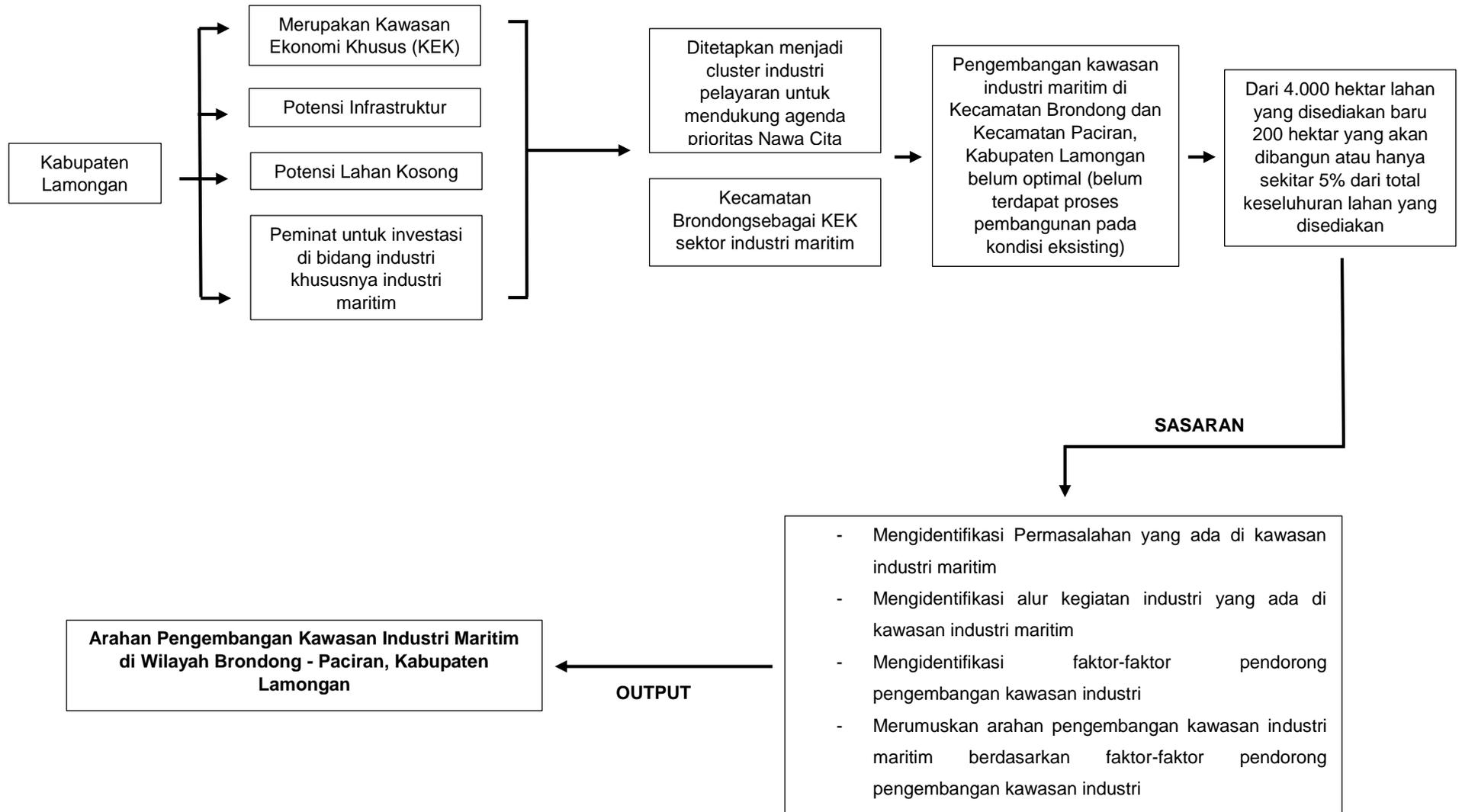
#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meliputi gambaran umum wilayah studi, yang menjelaskan kondisi eksisting wilayah studi secara umum dan detail berdasarkan materi pembahasan serta pembahasan terkait hasil analisis yang telah dilakukan.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Meliputi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian.

## 1.7 Kerangka Berpikir



*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Kawasan Industri**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Berdasarkan *Industrial Development Handbook* dari ULI (*The Urban Land Institute*), Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan- peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya.

Menurut Marsudi Djojodipuro (1992), kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Menurut Arsyad (2005), industri tidak dapat berkembang tanpa adanya sektor penunjang berupa infrastruktur seperti pembangunan jaringan transportasi (jalan raya, rel keretaapi, dan jembatan), jaringan telekomunikasi, listrik dan air bersih, dan lain sebagainya.

Penyediaan infrastruktur tersebut menjadi daya tarik utama bagi calon investor dan dunia usaha.

Dirdjojuwono (2004) menyebutkan penyediaan prasarana dan sarana pada kawasan industri sekurang-kurangnya terdiri jaringan jalan dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis Pemerintah Daerah setempat; instalasi penyediaan air bersih dan saluran distribusinya; instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang kapasitasnya dapat menampung semua limbah cair yang dihasilkan oleh industri pada kawasan tersebut; instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik (energi); jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku; unit pemadam kebakaran; unit perkantoran; perumahan; dan fasilitas sosial dan umum.

## **2.2 Teori Klaster Industri**

Klaster industri adalah sekelompok industri yang saling berkaitan yang berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah melalui produk spesifik yang dihasilkan melalui strategi pengembangan rantai nilai (*value chain*) dari industri-industri tersebut termasuk jasa pendukung dan infrastruktur khusus. Klaster industri umumnya terkonsentrasi secara geografis dan saling terhubung melalui aliran barang dan jasa (Porter, 2010).

Menurut Kotler (1997) klaster industri adalah segmen-segmen industri yang memiliki kaitan vertikal dan horizontal. Jika sebuah industri mendiversifikasi bidang-bidang yang merupakan input ataupun output dari industri itu, maka arah diversifikasi itu bersifat vertikal. Ada 2 macam kaitan vertikal:

- Kaitan kedepan adalah kaitan antara industri utama dan industri-industri hilirnya.
- Kaitan kebelakang adalah kaitan antara industri utama dan industri hulunya.

### **2.3 Ekonomi Maritim**

Adrianto (2007) membagi potensi pembangunan ekonomi kelautan berdasarkan sumberdaya tak dapat pulih, industri maritim dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang meliputi:

1. Pertambangan dan Energi
2. Pariwisata Bahari
3. Perhubungan Laut
4. Perkapalan
5. *Offshore Engineering and Structure*
6. *Fishing Gears*
7. *Deep Sea Water*

Pembangunan ekonomi kelautan tersebut didasari atas adanya urgensi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, yaitu:

1. Kawasan pesisir memiliki produktifitas hayati tertinggi
  - 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir
  - 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir
  - Lumbung pangan pada umumnya terdapat di lahan pesisir seperti pantai timur Sumatera, pantai timur Jawa, dan Sulawesi Selatan
2. Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone
  - Kemudahan akses transportasi
  - Lahan darat dan perairan yang subur

- Relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah
- Kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri
- Keindahan panorama

Sedangkan menurut Kamaluddin (2005), sumber daya ekonomi maritim dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

a. Transportasi dan Perhubungan Laut

Sektor transportasi laut merupakan sektor sentral bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Transportasi laut dianggap sebagai sektor sentral karena mampu memobilisasi barang dan jasa untuk kepentingan ekonomi, sosial dan politik.

Untuk membangun industri pelayaran nasional, dapat memanfaatkan celah berikut ini:

- Program pemerintah dalam bidang pelayaran yakni mengupayakan agar perkembangan industri pelayaran nasional tidak hanya bertindak sebagai agen dari perusahaan asing.
- Angkutan ekonomi pelayaran nasional dalam mengangkut muatan dalam negeri masih tersisa 46,8% atau sekitar 79,9 juta MT per tahun.
- Peluang angkutan bagi pelayaran nasional untuk mengangkut muatan luar negeri masih sangat besar yakni 96,6% atau sekitar 429,7 juta MT per tahun.
- Pergerakan barang antar pulau diangkut melalui laut sekitar 88%.

b. Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut berfungsi sebagai media penghubung antara daratan dan laut, oleh karena itu

pelabuhan laut sangat memegang peranan penting dalam bongkar muat barang. Aspek aspek yang perlu dimanfaatkan dalam ekonomi pelabuhan adalah jumlah muatan dan uang beredar sebagai cukai yang diangkut oleh sejumlah kapal melalui pelabuhan.

Pengembangan sektor pelabuhan perlu dilakukan mengingat pelabuhan masih dipandang sebagai (1) pintu gerbang ekonomi yang menghubungkan antara aktivitas daratan dan laut, (2) peningkatan aktivitas pelayaran menyebabkan peningkatan pemanfaatan jasa pelabuhan laut, (3) peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang membutuhkan aktivitas bongkar muat melalui pelabuhan laut, dan (4) berkembangnya armada transportasi laut dan bongkar muat yang membutuhkan pelabuhan.

c. Perikanan Tangkap dan Budidaya

Sektor perikanan di Indonesia harus terus diberdayakan karena masih menghadapi keterbatasan khususnya pada aspek ketersediaan armada penangkapan di ZEEI. Karena keterbatasan armada penangkapan ikan hingga kewilayah ZEEI maka telah memicu masuknya kapal ikan asing ke wilayah perairan Indonesia.

d. Pertambangan dan Energi Lepas Pantai

Laut Jawa, Laut Cina Selatan, paparan Sunda dan Kalimantan merupakan sub sistem lempeng Benua Eurasia. Batuan penyusun di wilayah perairan ini merupakan pelamparan dari batuan berumur Tersier yang beralaskan batuan Mesozoikum yang dijumpai di Jawa bagian Utara, Kalimantan bagian Barat dan Sumatera bagian Timur. Wilayah perairan ini merupakan wilayah yang potensial sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi.

e. Pariwisata Bahari

f. Sumber Daya Manusia Sektor Maritim

Secara umum tenaga kerja sektor maritim tersebut bekerja pada bidang – bidang yaitu: pertama, bekerja sebagai pelaut di kapal – kapal niaga asing dan kapal dalam negeri. Kedua, sebagai penangkapan ikan pada kapal – kapal asing dan kapal dalam negeri. Ketiga, sebagai pelaut pada pada pelayaran rakyat. Keempat sebagai nelayan. Kelima, sebagai tenaga kerja pada eksplorasi laut lepas pantai. Keenam, karyawan yang bekerja di bidang *ecotourism*. Ketujuh, karyawan yang bekerja di bidang kepelabuhan.

## 2.4 Industri Maritim

Menurut Feaver (2011), Industri maritim sangat beragam dengan definisi yang bervariasi. Hal ini dapat dibagi ke dalam sub-sektor berikut:

1. **Industri berbasis sumber daya laut:** industri yang terlibat langsung dalam pemulihan sumber daya laut seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, obat-obatan berbasis kelautan, perikanan budidaya dan penambangan dasar laut.
2. **Desain dan konstruksi sistem kelautan:** desain kapal, konstruksi dan perbaikan, rekayasa lepas pantai dan rekayasa pesisir.
3. **Operasi dan pengiriman laut:** sistem transportasi laut, operasi selam, pengerukan dan pembuangan limbah.
4. **Peralatan dan penyedia layanan yang terkait dengan kelautan:** produsen, firma konsultan teknik di bidang elektronika dan instrumentasi kelautan, mesin, telekomunikasi, sistem navigasi, perangkat lunak tujuan khusus dan alat pendukung keputusan, penelitian dan eksplorasi laut, dan pemantauan lingkungan, pelatihan dan pendidikan. Kategori ini juga mencakup penyedia layanan dan industri pariwisata dan hiburan.

Sedangkan menurut Warsono (2012) Industri maritim merupakan industri yang berperan penting dalam peningkatan daya saing khususnya industri perkapalan nasional. Oleh karena itu diperlukan klaster perkapalan sebagai usaha meningkatkan daya saing tersebut. Klaster industri perkapalan merupakan kumpulan elemen inti galangan, industri pemasok, industri terkait, industri pendukung serta institusi pendukung.

Menurut Santoso (2014) Dalam pengembangan klaster industri perkapalan harus mencakup keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilirnya. Industri hulu pada industri perkapalan adalah industri yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh industri perkapalan, yaitu berupa *ferro/baja*, *non ferrous* yaitu aluminium dan kuningan, fiber glass, kayu, karet, plastik, kaca, tekstil, *marine paint*, *welding electrode*, dan *cathodic protection*. Pada industri antara adalah industri yang menghasilkan produk berupa komponen kapal yang terdiri dari mesin penggerak, mesin geladak, *electrical machineries*, peralatan navigasi dan telekomunikasi dan peralatan lainnya. Sedangkan industri hilir itu sendiri, adalah industri perkapalan yang di dalamnya termasuk industri bangunan lepas pantai.

## **2.5 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, dalam pengembangan kawasan industri diperlukan beberapa prinsip, yaitu:

### **a. Kesesuaian Tata Ruang**

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

b. Ketersediaan Prasarana dan Sarana

Dalam upaya mengembangkan suatu kawasan industri, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti:

1. Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri
2. Tersedianya sumber energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan
3. Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (*Water Treatment Plant*)
4. Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data
5. Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/kesegaran jasmani, halte angkutan umum, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan

c. Ramah Lingkungan

Dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

#### d. Efisiensi

Bagi pengguna kaveling (*user*) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana. Sedangkan bagi pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam perencanaan pembangunan prasarana yang mendukung dalam pengembangan kawasan industri.

#### e. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), tindakan anarkis dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri. Pengelola Kawasan Industri dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai objek vital untuk mendapatkan perlakuan khusus.

Dalam rangka mengembangkan kawasan industri maritim perkapalan khususnya perkapalan perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti:

- 1) Kerjasama industri yang terkait dengan industri perkapalan mulai industri hulu, industri antara, hingga industri hilir. Kerjasama ini juga menyangkut hubungan antara IKM perkapalan dan industri perkapalan skala besar;
- 2) Kebijakan pemerintah yang menyangkut pengaturan tata ruang kawasan, regulasi dan perijinan di daerah, termasuk pengembangan instrument insentif dan disinsentif;
- 3) Layanan infrastruktur terkait dengan sistem utilitas dan transportasi yang mendukung pengembangan kawasan baik untuk kebutuhan proses industri, kemudahan mobilitas, maupun dukungan logistik;

- 4) Pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya mencakup dermaga, pergudangan, galangan kapal dan merupakan salah satu tempat aktivitas bongkar muat yang penting dalam kegiatan industri perkapalan (Santoso, 2014).

Menurut Porter (1990) Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh daya saing karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produk.

Berdasarkan hal tersebut, Porter mengajukan sebuah model yang berisi faktor-faktor yang menentukan Kemampuan Daya Saing Suatu Negara *National Competitive Advantage* (NCA) yang disebut dengan Diamond Model (DM). Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

### **1. Kondisi Faktor (*Factor Condition*)**

Sumberdaya yang dimiliki suatu bangsa atau wilayah merupakan suatu faktor produksi yang sangat penting untuk bersaing. Kondisi faktor atau faktor input dalam analisis Porter ini merupakan variabel-variabel yang sudah ada dan dimiliki oleh suatu cluster industri. Ada lima kelompok dalam faktor sumber daya, yaitu:

- a. Sumberdaya manusia yang meliputi jumlah tenaga kerja yang tersedia, kemampuan manajerial dan keterampilan yang dimiliki, etika kerja dan tingkat upah yang berlaku. Dimana

semuanya ini sangat mempengaruhi daya saing nasional.

- b. Sumberdaya modal yang terdiri dari jumlah dan biaya yang tersedia, jenis pembiayaan atau sumber modal, aksesibilitas terhadap pembiayaan, serta kondisi lembaga pembiayaan dan perbankan. Selain itu juga diperlukan peraturan-peraturan seperti peraturan keuangan, peraturan moneter dan fiskal untuk mengetahui tingkat tabungan masyarakat dan kondisi moneter dan fiskal.
- c. Sumberdaya alam atau fisik yang meliputi biaya, aksesibilitas, mutu dan ukuran. Sumberdaya alam juga harus meliputi ketersediaan air, mineral, energi serta sumberdaya pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan serta sumberdaya lainnya baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Begitu juga kondisi cuaca dan iklim, luas wilayah geografis, kondisi topografis, dan lain-lain.
- d. Sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), merupakan sumberdaya yang terdiri dari ketersediaan pengetahuan tentang pasar, pengetahuan teknis, pengetahuan ilmiah yang menunjang dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu ketersediaan sumber-sumber pengetahuan dan teknologi dapat pula berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga statistik, literatur bisnis dan ilmiah, basis data, laporan penelitian, serta sumber pengetahuan dan teknologi lainnya.
- e. Sumberdaya infrastruktur yang terdiri dari ketersediaan jenis, mutu, dan biaya penggunaan infrastruktur yang mempengaruhi daya saing,

seperti halnya sistem transportasi, komunikasi, pos dan giro, sistem pembayaran dan transfer dana, air bersih, energi listrik, dan lain-lain. Adapun kelima kelompok sumberdaya tersebut sangat mempengaruhi daya saing nasional.

## **2. Kondisi Permintaan (*Demand Condition*)**

Kondisi permintaan merupakan sifat dari permintaan pasar asal untuk barang dan jasa industri. Kondisi permintaan ini sangat mempengaruhi daya saing terutama mutu permintaan. Mutu permintaan merupakan sarana pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk bersaing secara global. Mutu permintaan juga memberikan tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya dengan memberikan tanggapan terhadap persaingan yang terjadi.

Menurut Porter, kondisi permintaan dalam diamond model dikaitkan dengan *sophisticated and demanding local customer*. Artinya semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi permintaan pelanggan lokal yang tinggi. Dalam hal ini kondisi permintaan tidak hanya berasal dari lokal tetapi juga dari luar negeri karena adanya globalisasi.

## **3. Industri Terkait dan Industri Pendukung (*Related and Supporting Industry*)**

Keberadaan industri terkait dan pendukung (*related and supporting industry*) akan mempengaruhi daya saing dalam hal industri hulu yang mampu memasok input bagi industri utama dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, pelayanan yang cepat, pengiriman tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu pula dengan industri hilir yang menggunakan produk industri utama sebagai bahan bakunya. Jika industri hilirnya berdaya

saing global, maka dapat menarik industri hulunya menjadi ikut berdaya saing.

Adapun manfaat industri pendukung dan terkait akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam kluster. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam *transaction technology*, informasi, ataupun keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya. Selain itu dengan adanya industri pendukung dan terkait maka akan meningkatkan produktivitas yang dapat menciptakan daya saing.

#### **4. Persaingan, Struktur dan Strategi Perusahaan (*Firm Strategy, Structure, and Rivalry*)**

Adanya tingkat persaingan bagi perusahaan akan mendorong kompetisi dan inovasi. Persaingan dalam negeri mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk baru, memperbaiki produk yang telah ada, menurunkan harga dan biaya, mengembangkan teknologi baru, dan memperbaiki mutu serta pelayanan. Dalam hal ini, strategi perusahaan dibutuhkan untuk memotivasi perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru.

Struktur perusahaan atau industri dapat menentukan daya saing dengan melakukan perbaikan dan inovasi. Dalam situasi persaingan, hal ini juga akan berpengaruh pada strategi yang dijalankan perusahaan atau industri. Pada akhirnya persaingan di dalam negeri yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mencari pasar internasional.

Porter juga menambahkan faktor lain: peran pemerintah dan *chance*, yang dikatakan memiliki peran penting dalam menciptakan *National Competitive Advantage* (NCA).

### **1. Peran Pemerintah (*Government*)**

Peran pemerintah akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat daya saing. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator agar perusahaan dan industri semakin meningkatkan daya saingnya. Pemerintah dapat mempengaruhi daya saing global melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang memperlemah atau memperkuat faktor penentu daya saing tersebut. Pemerintah juga dapat memfasilitasi lingkungan industri yang mampu memperbaiki kondisi faktor daya saing sehingga dapat berdaya guna secara efisien dan aktif.

### **2. Peran Peluang (*Chance Factor*)**

Peran kesempatan berada di luar kendali perusahaan maupun pemerintah untuk mempengaruhi daya saing. Hal-hal seperti keberuntungan merupakan peran kesempatan, seperti penemuan baru yang murni, biaya perusahaan yang konstan akibat perubahan harga minyak atau depresiasi mata uang. Selain itu dapat juga terjadi karena peningkatan permintaan produk industri yang lebih besar dari pasokannya atau kondisi politik yang menguntungkan daya saing.

## **2.6 Sintesa Kajian Pustaka**

Untuk merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim di wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan, maka diperlukan sintesa teori yang didapatkan dari penjabaran teori sebelumnya. Teori yang digunakan dalam analisis teori ini adalah teori kawasan industri, kluster industri, ekonomi maritim dan pengembangan kawasan industri. Teori kawasan industri berfungsi untuk menjelaskan kebutuhan dan kriteria dari sebuah kawasan industri. Untuk teori kluster industri berfungsi untuk menjelaskan faktor pendukung yang dapat menunjang kegiatan industri sedangkan teori ekonomi maritim berfungsi untuk menjelaskan industri yang termasuk dalam kegiatan industri

maritim. Untuk teori pengembangan kawasan industri dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mengembangkan sebuah kawasan industri, dan dari faktor tersebut dapat dicari permasalahan sehingga dapat diketahui apa saja yang mampu mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 1** Sintesa Tinjauan Pustaka dan Indikator

No.	Teori	Sumber	Variabel
1.	Kawasan Industri	Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasarana</li> <li>- Sarana</li> <li>- Fasilitas penunjang</li> <li>- Dikelola oleh perusahaan kawasan industri</li> </ul>
		<i>The Urban Land Institute</i> , 1975	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Industrial Plants</i></li> <li>- Laboratorium pengembangan</li> <li>- Bangunan perkantoran</li> <li>- Bank</li> <li>- Prasarana penunjang</li> <li>- Fasilitas sosial dan umum</li> </ul>
		Djojodipuro, 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan</li> <li>- Jalan</li> <li>- Saluran pembuangan limbah</li> <li>- Gardu listrik</li> </ul>
		Arsyad, 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan transportasi</li> <li>- Jaringan telekomunikasi</li> <li>- Listrik</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air bersih</li> </ul>
		Dirdjojuwono, 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan</li> <li>- Saluran pembuangan air hujan dan saluran distribusinya</li> <li>- IPAL</li> <li>- Penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik</li> <li>- Jaringan telekomunikasi</li> <li>- Unit pemadam kebakaran</li> <li>- Unit perkantoran</li> <li>- Perumahan</li> <li>- Fasilitas sosial dan umum</li> </ul>
2.	Klaster Industri	Porter, 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling berkaitan</li> <li>- Terkonsentrasi secara geografis</li> <li>- Terhubung melalui aliran barang dan jasa</li> </ul>
		Kotler, 1997	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kaitan vertikal dan horizontal</li> <li>- Kaitan kedepan</li> <li>- Kaitan kebelakang</li> </ul>
3.	Ekonomi Maritim	Adrianto, 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan dan Energi</li> <li>- Pariwisata Bahari</li> <li>- Perhubungan Laut</li> <li>- Perkapalan</li> <li>- <i>Offshore Engineering and Structure</i></li> <li>- <i>Fishing Gears</i></li> </ul>

			- <i>Deep Sea Water</i>
		Kamaluddin, 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportasi dan Perhubungan Laut</li> <li>- Pelabuhan Laut</li> <li>- Perikanan Tangkap dan Budidaya</li> <li>- Pertambangan dan Energi Lepas Pantai</li> <li>- Pariwisata Bahari</li> <li>- Sumber Daya Manusia Sektor Maritim</li> </ul>
		Warsono, 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemen inti galangan</li> <li>- Industri pemasok</li> <li>- Industri terkait</li> <li>- Industri pendukung</li> <li>- Institusi pendukung</li> </ul>
		Santoso, 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri hulu pada industri perkapalan</li> <li>- Industri antara pada industri perkapalan</li> <li>- Industri hilir pada industri perkapalan</li> </ul>
		Feaver, 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri berbasis sumber daya laut: seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, obat-obatan berbasis kelautan, perikanan budidaya dan penambangan dasar laut.</li> <li>- Desain dan konstruksi sistem kelautan: desain</li> </ul>

			<p>kapal, konstruksi dan perbaikan, rekayasa lepas pantai dan rekayasa pesisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi dan pengiriman laut: sistem transportasi laut, operasi selam, pengerukan dan pembuangan limbah.</li> <li>- Peralatan dan penyedia layanan yang terkait dengan kelautan: produsen, firma konsultan teknik di bidang elektronika dan instrumentasi kelautan, mesin, telekomunikasi, sistem navigasi, perangkat lunak tujuan khusus dan alat pendukung keputusan, penelitian dan eksplorasi laut, dan pemantauan lingkungan, pelatihan dan pendidikan. Kategori ini juga mencakup penyedia layanan dan industri pariwisata dan hiburan.</li> </ul>
4.	Prinsip-Prinsip Pengembangan	Peraturan Menteri Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian tata ruang</li> </ul>

	Kawasan Industri	Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan prasarana dan sarana</li> <li>- Ramah lingkungan</li> <li>- Efisiensi</li> <li>- Keamanan dan kenyamanan berusaha</li> </ul>
		Santoso, 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama industri terkait</li> <li>- Kebijakan pemerintah</li> <li>- Layanan infrastruktur</li> <li>- Pelabuhan dan infrastruktur pendukung</li> </ul>
		Porter, 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Faktor (sumberdaya manusia, sumberdaya modal, sumberdaya alam, sumberdaya ilmu pengetahuan atau teknologi)</li> <li>- Kondisi Permintaan</li> <li>- Industri Terkait dan Industri Pendukung</li> <li>- Persaingan, Struktur dan Strategi Perusahaan</li> <li>- Peran Pemerintah</li> <li>- Peran Peluang</li> </ul>

*Sumber: Sintesa Kajian Pustaka, 2017*

Dari hasil sintesa variabel diatas, maka didapatkan tiga indikator dan 25 variabel yang sesuai dengan konteks dan ruang lingkup penelitian. Indiktator dan variabel tersebut digunakan untuk menjawab sasaran penelitian yang

pertama hingga ketiga, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan kawasan industri maritim di Kawasan Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan.

Sasaran pertama penelitian bertujuan untuk mengetahui permasalahan kawasan industri maritim dari sisi sebuah kawasan industri yang masih belum terbangun. Variabel digunakan untuk mengetahui kondisi prasarana kawasan industri dan upaya pengembangan kawasan industri yang telah dilakukan. Sasaran kedua penelitian bertujuan untuk mengetahui isu dan permasalahan dari sisi industri maritim yang telah beroperasi di wilayah penelitian berdasarkan alur kegiatan industri tersebut. Variabel digunakan untuk mengetahui alur kegiatan industri maritim yang sudah berjalan. Sedangkan sasaran ketiga penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang termasuk kedalam faktor pengembangan kawasan industri. Variabel yang digunakan untuk menjawab sasaran pertama hingga ketiga penelitian adalah sama. Yang membedakan adalah cara penggunaan atau pengolahan data dari sasaran tersebut.

**Tabel II. 2** Variabel Penelitian

No.	Indikator	Variabel	Teori
1.	Prasarana	Lahan	Djojodipuro (1992)
		Jaringan Bersih Air	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Arsyad (2005)
		Saluran Drainase	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Dirdjojuwono (2004)

		Jaringan Telekomunikasi	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Arsyad (2005), Dirdjojuwono (2004)
		Jaringan Listrik	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Djodipuro (1992), Arsyad (2005), Dirdjojuwono (2004)
		Pengelolaan Sampah	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Djodipuro (1992), Dirdjojuwono (2004)
		Jaringan Transportasi	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Djodipuro (1992), Arsyad (2005), Dirdjojuwono (2004)
		IPAL	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975), Djodipuro (1992), Arsyad (2005), Dirdjojuwono (2004)
2.	Industri Maritim	Pertambangan dan Energi	Adrianto (2007), Kamaluddin (2005), Feaver (2011)

		Transportasi dan Perhubungan Laut	Adrianto (2007), Kamaluddin (2005), Feaver (2011)
		Perkapalan	Adrianto (2007), Kamaluddin (2005), Feaver (2011), Santoso (2014)
		<i>Offshore Engineering and Structure</i>	Adrianto (2007), Kamaluddin (2005), Feaver (2011)
		Sumber Daya Manusia Sektor Maritim	Adrianto (2007), Feaver (2011)
		Industri Pendukung	Warsono (2012), Santoso (2014), Porter (2010), Kotler (1997)
		Pelabuhan	Adrianto (2007), Kamaluddin (2005), Feaver (2011)
3.	Pengembangan Kawasan Industri	Kelembagaan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010, Santoso (2014)
		Kesesuaian Tata Ruang	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010,

			Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2014), <i>The Urban Land Institute</i> (1975)
		Ramah Lingkungan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010
		Efisiensi	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010
		Tingkat Kenyamanan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010
		Tingkat Keamanan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010
		Sumberdaya	
		Permintaan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010, Porter (2010)
		Persaingan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010, Porter (2010)
		Peran Pemerintah	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-

			IND/PER/3/2010, Santoso (2014), Porter (2010)
--	--	--	-----------------------------------------------------

*Sumber: Sintesa Kajian Pustaka, 2017*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik dengan menggunakan metode *theoretical analytic* dan *empirical analytic*. Metode *theoretical analytic* menggunakan konstruksi teori untuk memberikan arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kondisi pada analisis teori tentang prinsip pengembangan kawasan industri ini digunakan untuk melandasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri khususnya kawasan industri maritim. Kemudian *empirical analytic* menjadikan teori sebagai batasan lingkup dan kemudian mengidentifikasi faktor empiris sebagai faktor yang juga berpengaruh dalam perumusan arahan pengembangan kawasan industri maritim.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini tergolong pada penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan memaparkan, menuliskan dan melaporkan peristiwa. Istilah penelitian kualitatif menurut Kurt & Miller (dalam Nasution, 1988:23) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sevilla (1993) membagi penelitian deskriptif secara khusus menjadi beberapa model penelitian, yaitu studi kasus (*case study*), *survey*, penelitian pengembangan (*development study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen, analisis kecenderungan (*trend analysis*), dan penelitian korelasi (*correlational study*).

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah faktor yang dapat diukur, baik ukuran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan sintesa dari Tinjauan Pustaka didapatkan beberapa variabel yang sesuai untuk digunakan dalam analisis. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan obyek studi.

**Tabel III. 1** Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Lahan	Ketersediaan Lahan yang cukup untuk sebuah kawasan industri minimal 50 ha
2.	Jaringan Air Bersih	Ketersediaan air bersih yang cukup di kawasan industri minimal 0,55 – 0,75 l/dtk/ha
3.	Saluran Drainase	Ketersediaan saluran drainase di kawasan industri
4.	Jaringan Telekomunikasi	Ketersediaan jaringan telekomunikasi di kawasan industri minimal 4 – 5 SST/Ha
5.	Jaringan Listrik	Ketersediaan jaringan listrik yang cukup di kawasan industri minimal 0,15 – 0,2 MVA/Ha
6.	Pengelolaan Sampah	Ketersediaan fasilitas pengolahan sampah di kawasan industri
7.	Jaringan Transportasi	Ketersediaan jaringan transportasi pendukung kawasan industri seperti jaringan jalan utama kawasan industri berupa 2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m
8.	IPAL	Ketersediaan IPAL di kawasan industri
9.	Industri Pendukung	Ketersediaan industri pendukung industri maritim di kawasan industri (industri yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh industri maritim)

10.	Industri Perkapalan	Terdapatnya Industri perkapalan dan alur kegiatan industri perkapalan di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
11.	Industri Pertambangan dan Energi	Terdapatnya industri pertambangan dan energi beserta alur kegiatan industri pertambangan dan energi di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
12.	Industri Transportasi Laut dan Perhubungan	Terdapatnya industri transportasi laut dan perhubungan beserta alur kegiatan industri transportasi laut dan perhubungan di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
13.	Industri Perikanan dan Pengolahannya	Terdapat industri perikanan dan pengolahannya beserta alur kegiatan industri perikanan dan pengolahan di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
14.	<i>Offshore Engineering and Structure</i>	Terdapat bangunan dan teknik lepas pantai di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
15.	Pelabuhan	Ketersediaan pelabuhan di kawasan industri
16.	Kesesuaian Tata Ruang	Sesuai dengan penggunaan lahan di kawasan industri berdasarkan RTRW
17.	Ramah Lingkungan	Tingkat ramah lingkungan di kawasan industri (kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
18.	Efisiensi	Tingkat efisiensi di kawasan industri (bantuan proses perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana)

19.	Tingkat Kenyamanan	Tingkat kenyamanan di kawasan industri (tingkat pelayannya yang baik dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai)
20.	Tingkat Keamanan	Tingkat keamanan di kawasan industri (tingkat kriminalitas yang rendah)
21.	Sumberdaya	Ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya modal sumberdaya alam dan sumberdaya pengetahuan atau teknologi di wilayah penelitian terkait kawasan maritim
22.	Permintaan	Tingkat permintaan industri (berupa hasil industri, jasa, maupun industri itu sendiri) di wilayah studi
23.	Persaingan	Tingkat persaingan industri di wilayah studi
24.	Peran Pemerintah	Adanya peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri di wilayah studi
25.	Kelembagaan	Adanya lembaga yang mengatur dan mengelola kawasan industri maritim

*Sumber: Sintesa Kajian Pustaka, 2017*

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Menurut buku Metode Penelitian oleh Sugiyono (2012:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan adanya sampel dapat membuat penelitian lebih efisien, lebih teliti, cermat dalam pengumpulan data, dan penelitian lebih efektif (Arikunto, 2002).

Pada penelitian ini, digunakan teknik sampling berupa *purposive sampling*. Teknik sampling tersebut bertujuan mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Berdasarkan pertimbangan teoritik dan tujuan studi, dilakukan sampling sebagai representasi dari kelompok *stakeholder* dengan teknik *nonprobabilistic* yang tepat yaitu *purposive sample*. Pada penentuan sampel penelitian ini, digunakan analisis stakeholder guna membantu dalam penentuan stakeholder terkait yang dianggap memiliki pengaruh besar.

**Tabel III. 2** Analisa Stakeholder

Stakeholder	Power	Legitimacy	Urgency
<b>Pemerintah</b>			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	V	v	v
Bappeda Kabupaten Lamongan	V	v	V
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan	X	v	x
<b>Swasta</b>			
<i>Developer</i> (PT. Jakamitra)	X	x	V

Sumber: Hasil Analisis, 2017

**Tabel III. 3** Kepakaran Responden Terpilih

Pihak Terpilih	Kepakaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menjadi dinas teknis yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan realisasi rencana pembangunan industri di lingkup Provinsi Jawa Timur

Bappeda Kabupaten Lamongan	Bappeda memiliki tugas menyusun kebijakan tata ruang serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupten Lamongan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
<i>Developer</i> (PT. Jakamitra)	<i>Developer</i> (PT. Jakamitra) diberi kewenangan sebagai pengembang KEK Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan mengetahui apa saja yang menjadi minat para investor yang dan apa kendalanya.

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Stakeholder yang berpengaruh dan dianggap penting dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lamongan yang meliputi Bappeda Kabupaten Lamongan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, dan pihak swasta atau pelaku industri maritim di Kabupaten Lamongan.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

#### 3.5.1. Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan survei primer yaitu dengan pengamatan langsung (observasi langsung), wawancara *stakeholders* dan kuisioner. Wawancara *stakeholders* disini ditujukan kepada pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, dan pelaku industri maritim. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi alur kegiatan pada kawasan industri maritim dan mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat dijadikan sebagai faktor pengembangan kawasan industri khususnya industri maritim.

### 3.5.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi pustaka dan survei instansi.

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan studi kepustakaan di buku-buku, hasil penelitian dan peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian
- b. Survei instansi, bertujuan mencari data pendukung yang berhubungan langsung dengan tema penelitian. Data sekunder instansi diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Penanaman Modal, PDAM dan BPS Kabupaten Lamongan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab tujuan dari penelitian ini, yaitu Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim di Wilayah Brondong, Kabupaten Lamongan. Maka dalam tahapan analisis data melibatkan tiga sasaran dalam penelitian ini. Adapun tahapan analisis data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III. 4** Tahap Analisis Data

Sasaran Penelitian	Input Data	Teknik Analisis	Output
Mengidentifikasi permasalahan di kawasan industri maritim	Fakta empiris pada lokasi studi	<i>Content Analysis</i>	Permasalahan di kawasan industri maritim
Mengidentifikasi alur kegiatan industri yang ada	- Fakta empiris pada lokasi studi	Analisa Deskriptif Komparatif	Alur kegiatan beserta isu dan permasalahan

di kawasan industri maritim	- Alur kegiatan industri maritim menurut stakeholder		yang ada di kawasan industri maritim
Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri	Faktor pendorong pengembangan kawasan industri menurut literatur	Analisa Delphi	Faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri
Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri	Faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri	Analisis Deskriptif Komparatif dan Analisa Delphi	Arahan pengembangan kawasan industri maritim

Sumber: Penulis, 2017

### 3.6.1 Identifikasi permasalahan di kawasan industri maritim

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di kawasan industri maritim, pada penelitian ini digunakan teknik analisis berupa *content analysis*. Analisis isi dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan (Subrayogo, 2001).

**Tabel III. 5** identifikasi permasalahan di kawasan industri maritim

Input	Proses	Output
Fakta empiris pada lokasi studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara stakeholders</li> <li>- Interpretasi data</li> <li>- Proses <i>content analysis</i></li> </ul>	Permasalahan di kawasan industri maritim

Sumber: Penulis, 2017

Krippendorff (2004) memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengunitan yaitu upaya untuk mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain yang dapat diobservasi lebih lanjut. Dalam content analysis yang dilakukan pada penelitian ini berupa conversation analysis yang menggunakan transkrip wawancara dengan unit analisis yaitu kalimat dalam transkrip wawancara tersebut.
2. Penyamplingan atau pembatasan penelitian dengan membatasi observasi melalui perangkuman semua jenis unit yang ada. Pembatasan tersebut dilakukan dengan membatasi jumlah stakeholder yang menjadi sumber data dengan bantuan analisis stakeholder yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Pengodean adalah pemberian kode untuk memudahkan dalam pemahaman pertanyaan penelitian yaitu variabel yang berpengaruh terhadap penyediaan air bersih. Pemberian kode ini dilakukan dengan mencermati pernyataan-pernyataan yang ada dalam transkrip sehingga dapat merepresentasikan suatu makna yang dapat menjawab pertanyaan penelitian
4. Penyederhanaan yaitu pengelompokkan dan perangkuman data hasil pengodean. Cara penyederhanaan yaitu dengan melihat frekuensi dimana beberapa objek tertentu dicirikan dengan cara tertentu

5. Pemahaman merupakan kesimpulan dari hasil penyederhanaan sehingga setelah melihat frekuensi unit yang mengindikasikan hal yang sama dapat diklasifikasikan pengaruhnya. Maka hasil yang diperoleh yaitu variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyediaan air bersih di Kabupaten Lamongan.

*Content analysis* ini merupakan analisis yang mengandalkan kode-kode yang ditemukan dalam suatu teks perekaman data sewaktu wawancara yang dilakukan dengan narasumber dengan sifat eksploratif. Berikut simpulan alur content analysis menurut Bungin (2010).



**Gambar III. 1** Alur Proses *Content Analysis*  
 Sumber: Bungin, 2010

Pada tahap ini, variabel-variabel yang telah disintesa ditanyakan kepada stakeholder. Kemudian hasil dari wawancara tersebut dikonversikan menjadi transkrip wawancara untuk mempermudah analisis. Pada transkrip wawancara tersebut, kemudian diberikan kode sesuai dengan kata kunci yang berkaitan dengan variabel. Apabila stakeholder memberikan jawaban yang sama, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan isu yang terdapat di dalam kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan dan dapat berupa masalah, sesuai dengan tujuan dari sasaran ini yaitu mengetahui isu dan permasalahan dari sisi kawasan industri maritim secara keseluruhan kawasan. Kode yang digunakan dalam proses *content analysis* ini berupa kode warna untuk

stakeholder dan variabel kondisi kawasan industri maritim yang dapat dilihat pada halaman lampiran.

### 3.6.2 Identifikasi alur kegiatan industri yang ada di kawasan industri maritim

Untuk mengidentifikasi alur kegiatan yang ada di kawasan industri maritim, teknik analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Menurut Arikunto (2006) tujuan analisis deskriptif komparatif ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide, atau prosedur kerja. Tujuan lain dari penelitian komparatif adalah untuk membandingkan permasalahan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu, dan menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.

Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan berdasarkan alur kegiatan menurut responden dan kondisi eksisting di kawasan industri maritim di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Sasaran ini bertujuan untuk mengetahui isu dan permasalahan berdasarkan industri maritim yang telah beroperasi di daerah perencanaan pembangunan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.

**Tabel III. 6** Identifikasi alur kegiatan yang ada di kawasan industri maritim

Input	Proses	Output
Alur kegiatan industri menurut responden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan, melihat kondisi eksisting di wilayah studi</li> <li>- Wawancara</li> <li>- Interpretasi data yang didapatkan dengan deskriptif komparatif</li> </ul>	Alur kegiatan beserta isu dan permasalahan yang ada di kawasan industri maritim
Data empiris alur kegiatan industri di kawasan industri maritim di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan		

Sumber: Penulis, 2017

### 3.6.3 Identifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri, teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis Delphi. Teknik Analisa Delphi adalah suatu usaha untuk memperoleh konsensus *groups/expert* yang dilakukan secara kontinu sehingga diperoleh konvergansi opini. Teknik Analisis Delphi bertujuan untuk mengembangkan suatu perkiraan konsensus masa depan dengan meminta pendapat para ahli, dan pada saat yang sama menghilangkan masalah sering terjadi yaitu komunikasi tatap muka. Proses yang dilakukan adalah wawancara stakeholders mengenai faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

**Tabel III. 7** Identifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri

Input	Proses	Output
Variabel-variabel dari tinjauan pustaka digunakan untuk menentukan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara stakeholders</li> <li>- Iterasi wawancara</li> <li>- <i>Consensus</i></li> </ul>	Faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri
Faktor-faktor pengembangan kawasan industri perkapalan dari penelitian sebelumnya		

Sumber: Penulis, 2017

Menurut Fowles (1978), terdapat beberapa langkah dalam metode Delphi:

1. Membentuk sebuah tim kerja yang mengambil keputusan dan meminitor analisa Delphi pada partisipan.

2. Pemilihan satu atau lebih panel untuk berpartisipasi. Biasanya secara teratur kepada partisipan pada suatu daerah investigasi, seperti penelitian dan proyek.
3. Melaksanakan ronde pertama questionnaire I Delphi.
4. Menguji pengejaan (mengenai ambiguitas, kejanggalan, dlsb.) pada lembar questionnaire untuk penulisan lebih baik seperlunya.
5. Menyerahkan lembar questionnaire pertama pada panelis.
6. Analisa respon-respon dari ronde pertama.
7. Persiapan terhadap ronde dua lembar pertanyaan Delphi (dengan pengujian yang memungkinkan).
8. Menyerahkan lembar questionnaire II pada panelis.
9. Analisa respon-respon dari ronde kedua (iterasi atau pengulangan proses langkah 7 hingga 9 dapat dilakukan menurut keperluan hingga tercapai stabilitas hasil yang didapatkan).
10. Persiapan mengenai laporan oleh tim analisa untuk menyimpulkan hasil dari analisa.

#### **3.6.4 Perumusan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri**

Untuk merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri, digunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan permasalahan dari sasaran 1 dan sasaran 2 dengan faktor pendorong pengembangan kawasan industri untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan arahan pengembangan kawasan industri maritim.

Selanjutnya dari hasil arahan tersebut dilakukan analisis Delphi kepada beberapa responden untuk memvalidasi dan memperkuat arahan yang telah dihasilkan sebelumnya serta sebagai wadah masukan dari berbagai responden terhadap arahan pengembangan kawasan industri maritim.

**Tabel III. 8** Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri

Input	Proses	Output
Permasalahan di kawasan industri maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri</li> <li>- Wawancara Delphi kepada responden</li> </ul>	Arahan pengembangan kawasan industri maritim
Alur kegiatan yang ada di kawasan industri maritim		
Faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri		

*Sumber: Penulis, 2017*

### 3.7 Tahapan Penelitian

Secara umum penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu perumusan masalah, studi pustaka terkait konsep, pengumpulan data, analisis data dan merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim di Wilayah Brondong, Kabupaten Lamongan. Untuk tahapan penelitian ini dapat dilihat dalam bagan berikut:

#### 1. Perumusan Masalah

Pada tahap perumusan masalah merupakan tahapan untuk mengidentifikasi permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Pengembangan kawasan industri maritim yang belum optimal dengan potensi yang begitu banyak merupakan dasar dari penelitian ini.

#### 2. Tinjauan Pustaka

Selanjutnya merupakan tahap studi literatur terkait dengan industri maritim dan pengembangannya serta faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

### **3. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini, akan dilakukan pengumpulan data terkait dengan alur kegiatan di kawasan industri maritim serta kelengkapan dari sebuah kawasan industri. Pengumpulan data disesuaikan dengan variabel yang didasarkan dari sintesa pustaka.

### **4. Analisis Data**

Selanjutnya merupakan tahap analisis data dari data-data yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini, data-data tersebut dianalisis sehingga dapat merumuskan arahan pengembangan kawasan industri maritim berdasarkan di Wilayah Brondong - Paciran, Kabupaten Lamongan.

### **5. Penarikan Kesimpulan**

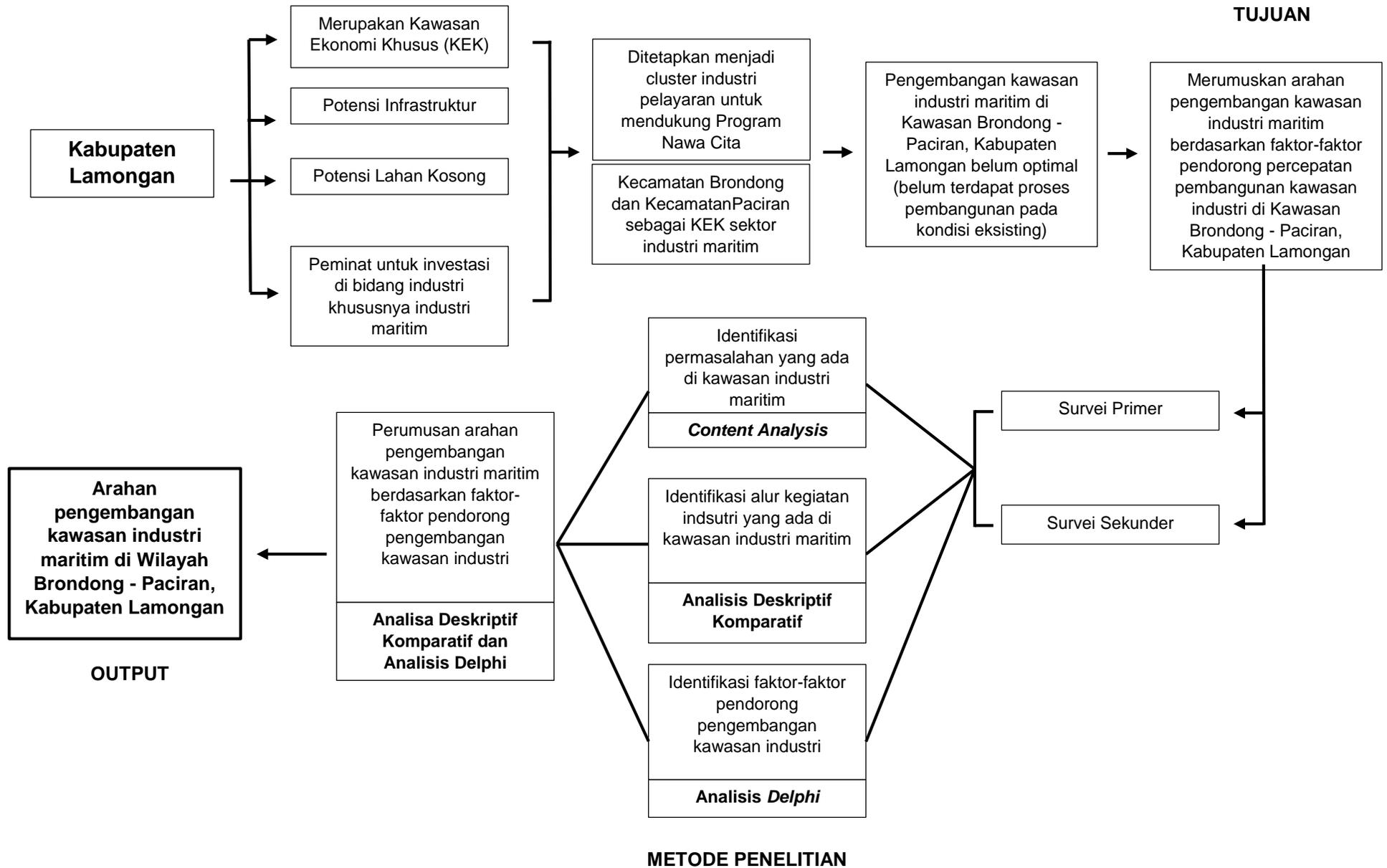
Tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahapan yang memperhatikan penelitian ini mulai dari tahap awal hingga tahap terakhir untuk menarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab dari rumusan masalah yang ada serta tujuan penelitian ini dilakukan. Selain itu, penarikan kesimpulan ini juga berisi tentang manfaat yang telah diperoleh melalui penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat khususnya mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Berikut adalah gambar bagan proses analisis yang dilakukan:

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

LATAR BELAKANG

TUJUAN



*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Profil Wilayah Studi**

#### **4.1.1 Kondisi Fisik**

Kabupaten Lamongan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai kurang lebih 41, 16 km. wilayah studi dari penelitian ini terletak di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Batas Utara : Laut Jawa
- Batas Selatan : Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro
- Batas Timur : Kabupaten Gresik
- Batas Barat : Kabupaten Tuban

Wilayah studi terdiri dari 26 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 131,434  $km^2$  yang merupakan bagian dari Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran. Desa – desa tersebut meliputi:

- Kecamatan Brondong:
  1. Desa Lembor
  2. Desa Tlogoretno
  3. Desa Sidomukti
  4. Desa Lohgung
  5. Desa Labuhan
  6. Desa Brengkok
  7. Desa Sendangharjo
  8. Desa Sedayulawas
  9. Desa Sumberagung
  10. Desa Brondong

Wilayah Kecamatan Brondong meliputi 80 % berupa tanah datar menyebar di wilayah bagian timur, tengah, utara

dan barat sedangkan 20 % lainnya berupa tanah dataran tinggi /pegunungan terletak diwilayah bagian selatan dan sebagian di wilayah utara diantaranya adalah Kelurahan Brondong sebelah selatan, Desa Sedayulawas sebelah selatan Desa Sendangharjo sebelah selatan, Desa Lembor dan sebagian wilayah Desa Sidonmukti bagian timur laut.

- Kecamatan Paciran:
  1. Desa Banjarwati
  2. Desa Drajat
  3. Desa Kandangsemangkon
  4. Desa Kemantren
  5. Desa Kranji
  6. Desa Paciran
  7. Desa Paloh
  8. Desa Tanggul
  9. Desa Weru
  10. Desa Sendangduwur
  11. Desa Sendangagung
  12. Desa Sidokelar
  13. Desa Sidokumpul
  14. Desa Sumurgayam
  15. Desa Tlogosadang
  16. Desa Warulor
  17. Kelurahan Blimbing

Wilayah Kecamatan Paciran meliputi 66% dataran, 19% lereng/bukit, dan 15% perbukitan/pegunungan.

#### **4.1.2 Lahan untuk Kawasan Industri**

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lamongan akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi yang telah berkembang dan home industri. Kawasan indsutri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni Utara (Kecamatan Paciran dan Brondong) dan Selatan (Kecamatan Ngimbang dan Sambeng). Untuk kawasan industri

maritim direncanakan terletak di Kecamatan Paciran dan Brondong yang memang sudah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan industri. Total luas lahan yang disiapkan untuk KEK industri maritim di Kecamatan Paciran dan Brondong mencapai 4.000 hektar, yang jika dilihat dari sisi persyaratan pembentukan sebuah kawasan industri sudah memenuhi bahkan melebihi standar minimal (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2018).

#### 4.1.3 Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Brondong tercatat sejumlah 74.433 jiwa, yang terdiri dari 36.292 jiwa penduduk laki-laki dan 38.141 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha yang ada di Kecamatan Brondong didominasi oleh bidang pertanian/ peternakan/ perikanan yakni sejumlah 19.717 jiwa dan paling kecil di bidang konstruksi sebanyak 333 jiwa, sedangkan untuk bidang industri sebanyak 989 jiwa (BPS Kabupaten Lamongan, 2017).

Jumlah penduduk Kecamatan Paciran adalah 100.333 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 50.438 jiwa dan penduduk perempuan 49.895 jiwa. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Paciran bekerja pada sektor pertanian dalam hal ini Perikanan tangkap (nelayan), Perdagangan, Industri dan Pariwisata. Sektor pariwisata mulai berkembang dengan adanya Wisata Bahari Lamongan dan Mazola yang terletak di desa Paciran dan Wisata Religi (BPS Kabupaten Lamongan, 2017).

**Tabel IV. 1** Jumlah Industri, Pekerja dan Nilai Investasi Menurut Industri di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Jenis Industri	Jumlah Industri	Jumlah Pekerja	Nilai Investasi
Industri Rumah Tangga	14.257	28.167	87.031.100.000

Industri Kecil Menengah	1.621	17.921	359.132.800.000
Industri Besar	43	4805	860.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>15931</b>	<b>50893</b>	<b>1.306.163.900.000</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017

#### 4.1.4 Sumber Daya Ikan

Subsektor perikanan di Kabupaten Lamongan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan budidaya terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu budidaya tambak, budidaya sawah tambak, kolam, dan KJA. Untuk komoditi perikanan, pelabuhan pelelangan ikan yang memiliki produksi terbesar adalah Pelabuhan Brondong/Blimbing, yakni 63.873,9 ton dan produksi ikan budidaya terbesar di Kabupaten Lamongan adalah ikan bandeng, yakni sebanyak 18.287,1 ton (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017).

**Tabel IV. 2** Produksi Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No.	Potensi Sumber Daya Alam	Luas (Ha)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Juta Rp)
1.	Budidaya			
	Tambak	872,886	4.140.784	22.684.950
	Sawah Tambak	19.522,422	45.348.247	1.016.402.602
	Kolam	53.438	1.810.227	25.300.920
	KJA	0.052	3.350	665.350
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>20.448,818</b>	<b>51.302.608</b>	<b>1.267.862,840</b>
2.	Perairan Umum			
	Rawa	7.087	1.142.973	20.989.810
	Waduk	3.068	1.011.446	18.574.418
	Sungai	855,5	842.783	15.447.053
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>11.010,5</b>	<b>2.997.202</b>	<b>55.011.281</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017

**Tabel IV. 3** Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
Bandeng	18.287,10
Nila	10.152,0
Mas	1.446,30
Tawes	2.578,30

Lele	2.272,50
Patin	33,00
Gabus	82,20
Gurami	2,10
Mujaer	590,90
Kerapu	646,10
Ikan lain	222,00
Udang Faname	14.880,70
Udang Windu	1,10
Udang Lain	88,30
Kepiting	-
Rumput Laut	-
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>51.302,60</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017

**Tabel IV. 4** Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

<b>Jenis Ikan</b>	<b>Jumlah (Ton)</b>
Manyung	1.130,5
Ikan Sebelah	736,8
Selar	240,1
Kuwe	1.222,3
Laying	2.282,9
Tetengkek	23,6
Bawal Hitam	48,6
Golok-Golok	22,8
Japuh	-
Tembang	2.695,8
Lemuru	206,1
Lemadng	272,6
Beloso/ Buntut Kerbo	1.251,2
Biji Nangka	4.073,4
Teri	425,7
Gerot-Gerot	879,3
Kapas-Kapas	4.845,3
Peperek	2.201,5
Lencam	657,6
Kakap Merah/ Bambang	655,3
Kuniran	7.965,5
Kurisi	10.597,4
Swanggi/ Mata Besar	13.392,1
Gulamah/ Tiga Wajah	595,7

Tongkol Krai	1.253,5
Kembung	213,0
Banyar	52,5
Tenggiri	269,2
Kerapu Lumpur	1.212,4
Bronang Lingkis	558,6
Alu Alu/ Manggilala/ Pucu	870,4
Kerong Kerong	653,9
Layur	442,0
Cucut Layam	680,7
Pari Kembang	1.021,5
Udang Putih/ Jerbung	1.648,7
Rajungan	975,2
Cumi Cumi	3.151,0
Ikan Lainnya	3.717,3
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>73.142,0</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017

#### 4.1.5 Pertambangan

Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya potensial mineral dengan potensi pertambangan berupa minyak dan gas bumi di Desa Balongsari Kecamatan Tikung dan bahan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Babat, Ngimbang, Sugio, Mantup dan Sambeng (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017).

**Tabel IV. 5** Data Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tahun 2015

No.	Jenis Tambang	Lokasi	Luas Lahan (Ha)
1	Dolomit	Ds. Banjarwati kec. Paciran	2,25
		Ds. Tlogosadang Kec. Paciran	5,5
		Ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran	24,7278
		Ds. Sumurgayam Kec. Paciran	2,2
		Ds. Kemantren Kec. Paciran	2,8
		Ds. Banjarwati Kec. Paciran	4,1780
		Ds. Dadapan Solokuro	5,8
2	Pedel Urug dan batu Kumbang	Ds. Tlogosadang Kec. Paciran	2,1786
3	Batu Kapur	Ds. Sido Kelar Kec. Paciran	9,08

4	Phosfat	Dsn. Mencorek Ds. Sendangharjo Kec. Brondong	0,8
5	Pedel Urug	Ds. Mantup Kec. Mantup	3,5
		Ds. Pasarlegi Kec. Sambeng	7,106
		Ds. Girik Kec. Ngimbang	1,5
		Ds. Tugu Kec. Mantup	2,34
		Ds. Sumbersari Kec. Sambeng	2,074
		Ds. Kedungwangi Kec. Sambeng	1
		Ds. Sukobendu Kec. Mantup	3
<b>Luas Total</b>			<b>82,125</b>

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2016

#### 4.1.6 Angkutan Laut

Di Pantai Utara Lamongan berkembang beberapa prasarana transportasi laut guna meningkatkan pelayanan dalam sistem transportasi laut secara regional dan nasional meliputi Pelabuhan Sedayu Lawas yang merupakan pelabuhan khusus barang, industri Galangan Kapal dan Pelabuhan ASDP.

Sudah terdapat kegiatan pelabuhan perikanan yang berskala besar yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mendorong berkembangnya perekonomian di Kabupaten Lamongan. Pengembangan Pelabuhan Brondong dan Pelabuhan Paciran sebagai pelabuhan laut penumpang (ASDP) sangat strategis mengingat letaknya di tepi Laut Jawa dan terdapat peningkatan infrastruktur khususnya Jalan Arteri, Jalan Lingkar Selatan Pantura dan Jalan bebas hambatan Pantura.

Perkiraan jumlah penduduk yang akan berkembang sebagai dampak dari kegiatan pelabuhan adalah tarikan tenaga kerja untuk 1 hektar kawasan pelabuhan memiliki bangkitan tenaga kerja sebanyak 40 jiwa dan untuk pelabuhan perikanan diasumsikan dengan menggunakan jumlah pekerja yang terdapat di pelabuhan perikanan.

**Tabel IV. 6** Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Kawasan Pelabuhan

Kegiatan	Perhitungan	Jumlah TK (jiwa)
Kawasan Pelabuhan Sedayulawas	Bangkitan = 40 TK / Ha; Total Area $\pm$ 8,75 Ha.	3.600
Kawasan Pelabuhan ASDP Paciran	Bangkitan = 40 TK / Ha; Total Area $\pm$ 5,6 Ha.	224
Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Jumlah TK di Kawasan Pelabuhan	2.550
<b>Jumlah</b>		<b>6.374</b>

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017*

- Pelabuhan Angkutan Sungai dan Penyebrangan (ASDP)

Lamongan juga memiliki pelabuhan laut yang memadai. Misalnya, ada Pelabuhan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP). Pelabuhan ASDP Lamongan dilengkapi dermaga penyeberangan antar pulau yang sangat memadai dan sarana terminal Tipe B untuk kendaraan roda empat. Dengan pelabuhan ASDP semakin meningkatkan mobilitas angkutan barang, jasa, dan penumpang orang. Pelabuhan ASDP Lamongan saat ini terus meningkatkan kemampuan layanannya. Misalnya saat ini memiliki 11 jalur tujuan baru ke berbagai daerah antar pulau.

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selain ASDP, Lamongan memiliki pelabuhan perikanan laut di Brondong. Pelabuhan merupakan pelabuhan lama yang secara tradisional sudah dikenal luas. Pelabuhan perikanan Brondong merupakan pelabuhan terbesar di Jawa Timur. Sarana yang tersedia juga cukup lengkap. Ada pabrik es untuk pengawetan ikan dan ada pula TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Pelabuhan perikanan nusantara di Brondong akan terus dikembangkan kemampuannya menjadi pelabuhan samudera.

#### 4.1.7 Jaringan Jalan

Jalan raya Kabupaten Lamongan akan mengalami peningkatan fungsi jalan secara nasional karena merupakan bagian dari sistem perkotaan nasional melalui Gerbangkertasusila yaitu adanya jalan nasional berupa jalan bebas hambatan Gresik – Lamongan – Tuban. Perkembangan Kabupaten Lamongan yang tinggi terutama di bagian utara akan mendorong percepatan realisasi jalan bebas hambatan Gresik – Lamongan – Tuban dan Jalan Lingkar Selatan Pantura (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017).

**Tabel IV. 7** Panjang Jalan Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran Menurut Pengelolaannya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Panjang (Km)		
		Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1	Paciran	0	0	8,39
2	Brondong	0	0	2
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,39</b>

*Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017*

**Tabel IV. 8** Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran Tahun 2016

No.	Kecamatan	Panjang (Km)			
		Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Paciran	8,39	0	0	0
2	Brondong	2	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>10,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017*

#### 4.1.8 Jaringan Air Bersih

Sumber – sumber perairan yang terdapat di Kabupaten Lamongan yaitu Sungai Bengawan Solo, Waduk Gondang, Waduk Pejaten, Kali Lamong dan beberapa sumber mata air. Sampai dengan tahun 2015 pelayanan PDAM Kabupaten

Lamongan baru melayani 14.580 pelanggan dari 27 kecamatan di Kabupten Lamongan melalui 10 area pelayanan yaitu di Kecamatan Lamongan, Sukodadi, Deket, Brondong, Kembangbahu, Sugio, Sekaran, Babat, Kedungpring dan Ngimbang. Selain itu 7 pelanggan dari kawasan industri kecil dan besar.

**Tabel IV. 9** Wilayah Pelayanan PDAM Kabupaten Lamongan

No.	Unit Pelayanan	Kecamatan Terlayani	Desa Terlayani
1	BNA Lamongan	Kec. Lamongan	Desa Sidokumpul, Sidoharjo, Sukomulyo, Tlogoanyar, Tumenggungan, Jetis, Sukorejo, Karanglangit, Plosowahyu, Tanjung, Made, Banjarmendalan, Sidomukti, Pangkatrejo.
2	Unit Made	Kec. Lamongan	Ds. Made à Perumnas Made, Sumberjo, Tanjung, Plosowahyu
3	Unit Babat	Kec. Babat	Desa Banaran, Babat, Brdahan, Plaosan, Sogo
4	Unit Pucuk	Kec. Babat	Desa Gembong, Kebalandono, Moropelang, Tritunggal
		Kec. Pucuk	Desa Pucuk, Kesambi, Waru Kulon, Karangtinggil
5	Unit Sekaran	Kec. Sekaran	Desa Sekaran, Miru, Latek, Siman, Kembangan, Moro, Bulutengger
6	Unit Sukodadi	Kec. Sukodadi	Desa Kebonsari, Sukodadi, Sidogembul, Surabayan.
7	Unit Turi	Kec. Turi	Desa Sukoanyar, Sukorejo
8	Unit Deket	Kec. Deket	Ds. Deket Kulon, Sidorejo
9	Unit Brondong	Kec. Brondong	Desa Brondong, Sedayulawas, Lohgung, Blimbing, Kd. Semangkon
10	Unit Sugio	Kec. Sugio	Ds. Sugio, Lebak Adi, Sekar Bagus

Sumber: PDAM Kabupaten Lamongan, 2015

Jumlah pelanggan air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan. Dari hasil kajian terhadap data air bersih dapat diketahui bahwa jumlah air yang didistribusikan tahun 2016 mencapai 94% ( $5.1615.000m^3$ ) dari kapasitas produksi ( $5.951.000m^3$ ).

**Tabel IV. 10** Laporan Posisi Sambungan Pelanggan Unit Pelayanan Brondong Bulan Januari 2018

Jenis Pelanggan	Samb. Awal Bulan	Tambahan Baru	Buka Kembali	Putus Samb.	Samb. Akhir Bulan
Industri A	2				2
Industri B	3				3
Niaga A	72	4			76
Niaga B					
Non Niaga A	1.072	19		1	1.090
Non Niaga B	4				4
Non Niaga C	16			1	15
Sosial A	2				2
Sosial B	12				12
<b>Jumlah</b>	<b>1.183</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1.204</b>

Sumber: PDAM Kabupaten Lamongan, 2018

**Tabel IV. 11** Rekap DRD Unit Pelayanan Brondong Bulan Januari 2018

No.	Unit	Alamat	Jumlah SR
1	09	Blimbing A	406
2	09	Blimbing B	29
3	09	Brondong	549
4	09	Lohgung	215
5	09	Sedayulawas	3
6	09	Sidorejo	2
<b>Jumlah</b>			<b>1.204</b>

Sumber: PDAM Kabupaten Lamongan, 2018

Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri di Pantura didapatkan dari PT. LIS melalui

penyulingan air laut menjadi air tawar, mengingat keterbatasan air tawar dan sebagian merupakan air payau.

#### **4.1.9 Jaringan Drainase**

Kabupaten Lamongan memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air mencakup seluas 151.395 Ha atau 83.51% dari wilayah Kabupaten Lamongan seluruhnya, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2017).

#### **4.1.10 Jaringan Telekomunikasi**

Telekomunikasi memiliki perkembangan yang sangat tinggi karena pada dasarnya sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan terutama pada wilayah pantura dimana tingginya tingkat mobilitas penduduk. Saat ini jaringan komunikasi telah menjangkau seluruh Kabupaten Lamongan. Pada kawasan industri di Kabupaten Lamongan sendiri sudah terdapat beberapa menara telekomunikasi yang sudah beroperasi dan sudah mendapatkan izin, sehingga untuk jaringan telekomunikasi di kawasan industri sudah tidak ada masalah dan siap untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lamongan (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2018).

#### **4.1.11 Jaringan Listrik**

Jaringan listrik di Kabupaten Lamongan dike lola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dimana persebaran listrik di Kabupaten Lamongan sudah menyebar ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Lamongan. Penggunaan listrik di Kabupaten Lamongan digunakan untuk pemenuhan rumah tangga, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, serta penerangan jalan.

**Tabel IV. 12** Jumlah Pelanggan Listrik berdasarkan Jenis Pelanggan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELANGGAN</b>	<b>JUMLAH PELANGGAN</b>
1	Rumah Tangga	115.185
2	Sosial	3.406
3	Usaha, Multi-guna dan Hotel	7.948
4	Industri	42
5	Gedung/ Kantor	146
6	Jalan	311

*Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2016*

Saat ini kebutuhan listrik yang ada di kawasan industri Paciran – Brondong sudah terpenuhi dari gardu Lamongan yang disediakan oleh PLN. Selain itu hampir semua industri di kawasan tersebut juga sudah menyediakan genset sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik jika energi listrik yang disediakan PLN mengalami gangguan atau pemadaman (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2018).

#### **4.1.12 Jaringan Persampahan dan Limbah**

Untuk semua industri yang ada di Pantura memang sudah diwajibkan memiliki IPAL dan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BLH. IPAL di sini berfungsi untuk mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri perkapalan seperti limbah hasil perbaikan kapal, khususnya limbah yang tergolong B3. Untuk pengelolaan sampah di kawasan industri tersebut, sudah dipersiapkan TPA dimana setiap perusahaan diwajibkan memiliki TPS dan sarana pengangkutnya untuk dibawa menuju TPA yang jaraknya sekitar 5-10 km dari kawasan industri (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2018).

#### **4.1.13 Sektor Industri Maritim Kabupaten Lamongan**

Sesuai dengan RTRW, wilayah utara di peruntukkan industri kemaritiman, seperti perkapalan, perikanan, maupun

industri berat lainnya seperti industri logam, logistik perminyakan maupun pengolahan *sanitary landfill*.

Saat ini industri yang sudah terealisasi di wilayah utara Lamongan antara lain, dok perkapalan Lamongan Marine Industry, dok Pantai Lamongan, Lamongan Shorebase (pelabuhan dan pergudangan alat-alat perminyakan), PT. Tri Ratna Diesel (Pembuatan Kapal Fiber), PT. Lintech Duta Pratama, PT. Starfood (*cold storage*), PT. Omya (Batu Kapur dan Dolomit), PT. QL (*cold storage*), PT. Lestari Anugrah (pergudangan), PT. Dinasti Baja Makmur, PT. Natpac Graha Arthamas, PT. Esa Sarwaguna Adinata dan PT. Desi (*sanitary landfill*), dll. Perkiraan jumlah penduduk yang akan berkembang sebagai dampak dari kegiatan industri tersebut adalah diketahui melalui perhitungan standar dimana 1 hektar lahan pada kawasan industri akan menimbulkan bangkitan tenaga kerja sebagai 100 tenaga Kerja. Masing-masing tenaga kerja akan memiliki keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga.

**Tabel IV. 13** Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Kawasan Industri

Kegiatan	Perhitungan	Jumlah TK (jiwa)
Kawasan Industri LS	Bangkitan = 100 TK / Ha; Luasan 100 Ha;	10.000
Kawasan Industri Dok Perkapalan Surabaya	Bangkitan = 100 TK / Ha; Luasan 20 Ha;	2.000
Kawasan Industri Dok Pantai Lamongan	Bangkitan = 100 TK / Ha; Luasan 37,5 Ha;	3.750
PT.Dok Lamongan Marine Industry	Bangkitan = 100 TK / Ha; Luasan 35 Ha;	3.500
<b>Jumlah</b>		<b>19.250</b>

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017

### **(1) Lamongan Integrated Shorebase (LIS)**

Lamongan Integrated Shorebase (LIS) berlokasi di Tanjung Pakis, Telogosadang, Paciran, di Pantura Lamongan. LIS merupakan miniatur kawasan brikat. Sebagai kawasan brikat, LIS memiliki konsep terpadu yang mengintegrasikan (menyatukan) layanan jasa kepelabuhan, barang, dan seluruh kegiatan penunjang industri migas dengan standar internasional. LIS memiliki infrastruktur pendukung kawasan industri, antara lain, suplai air bersih, listrik. Landasan pacu helicopter, super market, klinik kesehatan, sport center, restoran, dan ke depan akan dilengkapi dengan kantor Perbankan Nasional (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2018).

### **(2) PT. Dok Pantai Lamongan**

Merupakan industri perkapalan yang kegiatannya saat ini melakukan layanan perawatan dan perbaikan kapal dalam skala regional. Untuk ke depannya apabila ketersediaan sarana prasarana sudah ada dan memadai bisa melakukan kegiatan pembuatan kapal. Kegiatan yang dilakukan saat ini yaitu melakukan perbaikan/ reparasi kapal-kapal dari perusahaan sendiri maupun perusahaan lain. PT Dok Pantai Lamongan ini memiliki luas 30 Ha dan berlokasi di Kecamatan Paciran.

### **(3) PT. Lamongan Marine Industry (LMI)**

PT. Lamongan Marine Industri (LMI) merupakan industri perkapalan yang kegiatan utamanya melakukan penanganan kapal-kapal besar untuk kegiatan perawatan dan perbaikan (*repair*). Namun ke depan, PT. LMI diproyeksikan untuk menangani pembangunan kapal baru dan penanganan kegiatan perawatan dan perbaikan (*repair*) kapal-kapal tanker dan kapal kargo ukuran besar. PT. Marine ini memiliki luas 40 Ha dan berlokasi di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran dengan garis pantai lebih dari 800 meter dan kedalaman 10 meter. Kondisi itu sangat memungkinkan untuk mengembangkan

fasilitas galangan dengan target pasar kapal-kapal ukuran menengah hingga kapal ukuran besar.

#### (4) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya yang berpusat di Surabaya membangun industri perkapalan yang berlokasi di Kecamatan Brondong dengan luas 35 Ha. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan kapal baru dan perbaikan kapal. Galangan di Kabupaten Lamongan ini difokuskan untuk membangun kapal jenis tanker minyak dan gas.

#### (5) IKM Perkapalan

Sedangkan untuk IKM Perkapalan sendiri, menurut data dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sampai saat ini mencapai 7 IKM. Jumlah produksi kapal yang dihasilkan oleh 7 IKM perkapalan dalam setahun mencapai 33 kapal dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 140 orang (Santoso, 2014).

**Tabel IV. 14** IKM Perkapalan di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja	Kapasitas Produksi/ Tahun	Daerah Pemasaran
1	UD. Jembar	Kel. Blimbing Kec. Paciran	16	4 buah/ tahun	Lamongan
2	UD. Barokah	Ds. Kandang Kec. Paciran	12	3 buah/ tahun	Lamongan
3	UD. Sendang-Kamulyan	Ds. Kandang Kec. Paciran	22	6 buah/ tahun	Lamongan
4	UD. Bintang Laut	Ds. Kandang Kec. Paciran	25	5 buah/ tahun	Lamongan

5	UD. Sinar Samudra	Ds. Kandang Kec. Paciran	20	5 buah/ tahun	Lamongan
6	UD. Bintang Samudra	Ds. Kandang Kec. Paciran	25	5 buah/ tahun	Lamongan
7	UD. Lima Jaya	Ds. Kandang Kec. Paciran Ds. Kranji Kec. Paciran	20	5 buah/ tahun	Lamongan

*Sumber: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2014*

Kegiatan IKM perkapalan difokuskan di Kecamatan Paciran, khususnya di Desa Kandangsemangkon, Desa Kranji, dan Kelurahan Blimbing. Sedangkan untuk daerah pemasaran industri perkapalan masih terbatas untuk Kabupaten Lamongan. Menurut data di atas, rata-rata kapasitas normal pembuatan kapal oleh IKM perkapalan yang ada di Kabupaten Lamongan adalah 33 buah/tahun. Biasanya jenis kapal yang dipesan merupakan jenis kapal jakung dengan kapasitas 30-40 GT. Untuk wilayah pemesanan kapal sebagian besar dari dalam Kabupaten Lamongan sendiri, namun juga ada beberapa daerah yang memesan seperti Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Tengah (Santoso, 2014). Bahan baku yang digunakan untuk membuat kapal rakyat oleh IKM perkapalan di Kabupaten Lamongan khususnya bahan baku berupa kayu rata-rata berasal dari luar Pulau Jawa seperti Kalimantan karena ukuran kayu yang diperoleh cocok untuk pembuatan kapal rakyat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2018).

### (6) Industri Pengolahan Ikan

Sedangkan untuk industri pengolahan ikan sendiri di Kabupaten Lamongan di dominasi oleh IKM pengolahan ikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Berikut adalah data industri pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Lamongan:

**Tabel IV. 15** Data Industri Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PRODUK</b>
ANUGRA JAYA/ H. SUPRAPTO	Ikan Pindang	Raya Jompong,jl, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Pindang
CINDY PRATAMA, CV (SUTIYONO)	Daging Ikan Giling	Raya Jompong, Jl, Lamongan, Jawa Timur	Daging Ikan Giling
HATNI, PT	Pengolahan Ikan Beku	Hatni No. 200, Jl, Lamongan, Jawa Timur	Pengolahan Ikan Beku
IKAN ASIN H.M.SUWARNO	Ikan Asin	Jl Raya Brondong, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Asin
IKAN PINDANG "ABDUR ROCHIM"	Ikan Pindang	Raya Jompong, Jl - Brondong, Kel, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Pindang
IKAN PINDANG "EFFENDI"	Ikan Pindang	Jompong, Link - Brondong, kel, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Pindang
IKAN PINDANG "H. SUNOTO"	Ikan Pindang	Rt.02.rw.07 Brondong, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Pindang
IKAN PINDANG "IRIN, H"	Ikan Pindang	Pemuda, Jl, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Pindang
IKAN PINDANG "NGATMUJUD, H"	Ikan Pindang	Brondong, Ds, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Pindang
IKAN PINDANG "SUPRAPTO"	Ikan Pindang	Rt.03.rw.05 Jompong,	Ikan Pindang

		Lamongan, Jawa Timur	
KSATRYA MAS SEJATI (KMS), PT	Ikan Asin Teri	Lohgung, Ds, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Asin Teri
MEKAR JAYA KARYA, UD (HANSORI)	Ikan Asin	Raya Sedayu Lawas, Jl, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Asin
PULAU INTAN, UD (IKAN KERING H. DARYONO)	Ikan Kering	Brondong, Kel, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Kering
TRI PUTRA, UD (HARIADI, H)	Ikan Asin	Raya Brondong, Jl, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Asin
TUNGGAL JAYA, UD (PUJIONO)	Ikan Asin	Ling. Jompong - Raya Brondong, Jl, Lamongan, Jawa Timur	Ikan Asin

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2018

#### 4.1.14 Investasi Industri di Kabupaten Lamongan

Untuk investasi terkait industri maritim di Kabupaten Lamongan sendiri berpusat di wilayah pantura, khususnya di Kecamatan Paciran dan Brondong. Berikut adalah daftar investasi di Kabupaten Lamongan wilayah utara:

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**Tabel IV. 16** Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Utara

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Lokasi Yang Diizinkan</b>	<b>Luas</b>	<b>Ket.</b>
1.	PT. Hasil Aneka	Cold Storage	Ds. Tlogosandang, Kec. Paciran	3,6 Ha	Sudah Operasional
2.	PT. Bumi Lamongan Sejati	Taman Wisata Bahari	Ds. Paciran, Kec. Paciran	20 Ha	Sudah Operasional
3.	PT. Enam Delapan Sembilan	Cold Storage	Ds. Kemantern, Kec. Paciran	-	Sudah Operasional
4.	PT. Lamongan Inetgrated Shorebase	Fasilitas Sarana Penyimpanan BBM	Paciran	-	Sudah Operasional
5.	PT. Lintech Duta Pratama	Kawasan Industri Fabrication dan Dermaga Khusus	Ds. Paciran, Kec. Paciran	10 Ha	Sudah Operasional
6.	PT. Rimba Ladang Subur	Industri Es Balok	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	-	Sudah Operasional
7.	PT. Omay Indonesia	Industri Kalsium Karbonat	Ds. Kandangsemangkon dan Kel. Blimbing, Kec. Paciran	50 Ha	Sudah Operasional
8.	PT. Omay Indonesia	Pabrik Penghasil kalsium karbonat Beserta Sarana dan Fasilitasnya serta Cadangan Bahan Baku	Ds. Sidokelar, Kec. Paciran	74,5 Ha	Sudah Operasional

No.	Nama Perusahaan	Peruntukan	Lokasi Yang Diizinkan	Luas	Ket.
9.	PT. Dok Pantai Lamongan	Dok/ Galangan Kapal	Ds. Kemantren dan Sidokelar, Kec. Paciran	30 Ha	Sudah Operasional
10.	PT. Dok dan Perkapalan Surabaya	Dok/ Galangan Kapal	Kel. Brondong, Kec. Brondong	20,5 Ha	Tidak Ada Aktivitas
11.	PT. Lamongan Marine Industry	Graving Dok/ Galangan Kapal	Ds. Sidokelar, KEc. Paciran	35 Ha	Sudah Operasional
12.	PT. Bahari Biru Nusantara	Pabrik Pengolahan dan Pembekuan Ikan	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	2 Ha	Pembebasan Lahan
13.	PT. Star Food International	Gudang Pengolahan Hasil Perikanan	Ds. Kandangsemangkon, Kec. Paciran	0,85 Ha	Sudah Operasional
14.	PT. QL Hasil Laut	Pabrik Pengolahan dan Pembekuan Ikan	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	6 Ha	Sudah Operasional
15.	Politeknik Perkapalan Negeri ITS Surabaya	Laboratorium Pemagangan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Ds. Tanggul dan Ds. Paciran, Kec. Paciran	5,5 ha	Belum Ada Aktivitas
16.	CV. Genengsari	Pabrik Es Balok	Kel. Brondong, Kec. Brondong	0,2 ha	Sudah Operasional
17.	PT. Altar Marine Food	Pengepakan dan Pengolahan Ikan	Ds. Sidomukti, Kec. Brondong	0,78 ha	Sudah Operasional
18.	PT. Jakamitra Indonesia	Kawasan Industri	Ds. Banjarwati, Sidokelar, Kemantren dan Tlogosadang, Kec. Paciran	951,88 Ha	Pembebasan Lahan

No.	Nama Perusahaan	Peruntukan	Lokasi Yang Diizinkan	Luas	Ket.
19.	PT. Lamongan Industry First Estate	Kawasan Industri	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	100 Ha	Pembebasan Lahan
20.	PT. Bahari Sindo Persada	Komersial Area	Ds. Kemantren, Kec. Paciran	38,33 Ha	Pembebasan Lahan
21.	PT. Jayabrix Indonesia	Industri Bata Ringan ACC (Autoclaved Aerated Concrete)	Ds. Kemantren, Kec. Paciran	1,5 Ha	Sudah Operasional
22.	PT. Bumi Wali Sentosa Agung	Industri Dolomit	Ds. Kemantren, Kec. Paciran	15,1 Ha	Persiapan Operasional Menunggu Iji pertambangan Dari Provinsi
23.	PT. Mulia Artha Sejahtera	Gudang Ethanol	Ds. Paciran, Kec. Paciran	0,52 Ha	Pembebasan Lahan
24.	CV. Piala Tirta	Industri Es Balok	Ds. Sumberagung, Kec. Brondong	0,32 Ha	Sudah Operasional
25.	PT. Muda Prima Insan	Industri Pengolahan Snack	Ds. Lohgung, Kec. Brondong	1,19 Ha	Sudah Operasional
26.	Perum Jasa Tirta I	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kec. Brondong – kec. Paciran	-	Sudah Operasional
27.	Perum Perikanan Indonesia	Pembangunan Pabrik Es dan SPBN (Stasiun	Kel. Brondong, Kec. Brondong	0,36 Ha	Sudah Operasional

No.	Nama Perusahaan	Peruntukan	Lokasi Yang Diizinkan	Luas	Ket.
		Pengisian Bahan Bakar Nelayan)			
28.	PT. Jakamitra Indonesia	Pengembangan Kawasan Industri	Ds. Bluri dan Dagan, Kec. Solokuro	600 Ha	Pembebasan Lahan
29.	PT. AKR Corporindo, Tbk	Pembangunan SPBN	Ds. Weru, Kec. Paciran	0,2 Ha	Sudah Operasional
30.	CV. Davistas Mulia	Pembangunan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Ds. Sumberagung, Kec. Brondong	0,24 Ha	Sudah Operasional
31.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan	Cold Storage	Ds. Sedayulawas, kec. Brondong	0,24 Ha	Sudah Operasional
32.	PT. Bahari Sindo Persada	Komersial Area	Ds. Kemantren, Kec. Paciran	38,33 Ha	Pembebasan Lahan
33.	PT. Bariscan Global Usaha	Pembangunan Pabrik Pupuk Organik	Ds. Brengkok, Kec. Brondong	0,81 Ha	Pembebasan Lahan
34.	PT. Dinasty Baja Makmur	Pabrik Baja dan Logam Besi	Ds. Sedayulawas, kec. Brondong	20 Ha	Pembebasan Lahan
35.	PT. Lestari Anugerah Usaha Tangguh	Pergudangan	Ds. Sedayulawas, kec. Brondong	75 Ha	Pembebasan Lahan
36.	-	Industri Pakan Ternak	Ds. Labuhan, Kec. Brondong	0,27 Ha	Tahap Pembangunan

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Lokasi Yang Diizinkan</b>	<b>Luas</b>	<b>Ket.</b>
37.	PT. Natpac Graha Arthamas	Kimia Industri dan Pelabuhan Terminal Khusus	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	18 Ha	Tahap Pembangunan
38.	PT. Esa Sarwaguna Adinata	Industri Pengolahan Jagung, Palawija dan Penggilingan Padi/ Penyosohan Beras	Ds. Tlogoretno, Kec. Brondong	29,5 Ha	Tahap Pembangunan
39.	PT. Trans Pasific Palm	Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit, Penepakan dan Biodiesel	Ds. Sidokelar, Kec. Paciran	50 Ha	Tahap Pembangunan
40.	PT. Saldefens Lamongan Shipyard	Dok/ Galangan Kapal	Ds. Kandangsemangkon, Kec. Paciran	0,5 Ha	Tahap Pembangunan
41.	PT. Dowa Eco-System Indonesia	Sarana Pengolahan dan Penimbunan Limbah Industri	Ds. Tlogoretno dan Ds. Brengkok, Kec. Brondong	50 Ha	Pembebasan Lahan
42.	PT. Japfa Indoland	Kawasan Industri	Ds. Kemantren dan Sidokelar, Kec. Paciran	44 Ha	Pembebasan Lahan
43.	PT. Sunan Drajat Lamongan	Industri Pemanfaat Limbah B3	Ds. Banjarwati, Kec. Paciran	0,8 Ha	Tahap Pembangunan
44.	PT. Garin Citra Mandiri	Industri Tepung Ikan dan Pakan Ternak	Ds. Sumurgayam, Kec. Paciran	0,64 Ha	Sudah Operasional

No.	Nama Perusahaan	Peruntukan	Lokasi Yang Diizinkan	Luas	Ket.
45.	UD. Counteng Paes	Industri Cold Storage	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	0,17 Ha	Sudah Operasional
46.	PT. NatPac Graha Arthamas	Penambahan Pembangunan dan Pengoperasian Integrated Jetty dan Terminal	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	9,56 Ha	Tahap Pembangunan
47.	PT. Matahari Sakti	Industri Pakan Ikan dan Udang	Ds. Brengkok, Kec. Brondong	7,5 Ha	Pembebasan Lahan
48.	PT. Samudera Nusantara Abadi	Industri Pembekuan Ikan (Cold Storage)	Ds. Lohgung, Kec. Brondong	0,36 Ha	Sudah Operasional
49.	PT. Pakitri Hasta Darma	Dok/ Galangan Kapal	Ds. Paciran, Kec. Paciran	2,06 Ha	Tahap Pembangunan
50.	PT. Budiman Mercu Samudra	Dok/ Galangan Kapal	Ds. Tanggul, Kec. Paciran	1,44 Ha	Peralihan/ Balik Nama dari PT. Tri Ratna Diesel Indonesia
51.	CV. Maju Bersama Sejahtera	Budidaya Udang Panami	Ds. Brengkok dan Ds. Labuhan, Kec. Brondong	16,49 Ha	Tahap Pembangunan
52.	PT. Han jaya perkasa	Industri barang dari Semen (Kalsiboard)	Ds. Sedayulawas, Kec. Brondong	5,77 Ha	Tahap Pembangunan

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa peminat industri di kawasan pantura Kabupaten Lamongan cukup tinggi khususnya di bidang industri maritim, seperti dok galangan kapal, industri pengolahan ikan, cold storage, pergudangan dan pelabuhan.

#### **4.2 Kesesuaian Tata Ruang**

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah: “Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan sebagai kawasan pengembangan Pertanian, Industri dan Pariwisata”. Sedangkan misi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah:

- Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
- Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
- Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdayasaing tinggi.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lamongan akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang dan *home industry*. Kawasan industri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di utara dan selatan. Untuk lokasi sebelah utara dikembangkan di Kecamatan Paciran dan Brondong. Sedangkan di sebelah selatan dikembangkan di Kecamatan Ngimbang dan Sambeng.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di rencana seluas 6085 Ha, meliputi:

1. Pengembangan kawasan industri besar, merupakan kawasan industri polutan yang terletak di wilayah:
  - Kecamatan Paciran dan Brondong beserta wilayah pengembangan
  - Kecamatan Ngimbang (kawasan agropolitan) beserta wilayah pengembangan
2. Pengembangan industri UMKM, merupakan industri kerajinan yang menyebar di 27 kecamatan. Pengembangan industri UMKM adalah sebagai berikut:
  - Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan
  - Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap perkotaan dan perdesaan
  - Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan IKM
  - Menetapkan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

### **4.3 Analisis dan Pembahasan**

#### **4.3.1 Identifikasi Permasalahan yang ada di Kawasan Industri Maritim**

Identifikasi permasalahan yang ada di kawasan industri maritim dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui kondisi kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan. Hasil wawancara tersebut kemudian dilakukan *content analysis* untuk mengetahui permasalahan kawasan industri maritim dari semua responden. Responden merupakan pihak-pihak yang mengetahui kondisi kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, di antaranya adalah Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Lamongan, Staff Bidang

Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lamongan, dan Staff Operasional PT. Jakamitra.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

Tabel IV. 17 Tabel Pemahaman Data Identifikasi Permasalahan yang ada di Kawasan Industri Maritim

Variabel	Stakeholder	Pemahaman Data Transkrip			Analisis
		Transkrip	Kode	Hasil	
Lahan	G1	kalo dari sisi persyaratan besaran luas lahannya memenuhi syarat ya, secara lahan memang sudah sesuai dengan pp 142 tahun 2016 karena tersedia 4.000 ha	A1.1	Disperindag Prov. Jawa Timur mengatakan bahwa Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat dalam pembangunan sebuah kawasan industri berdasarkan PP no. 142 Tahun 2016 karena dalam rencana pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan tersedia lahan seluas 4.000 ha yang akan dijadikan sebuah kawasan, namun pihak Disperindag Prov. Jawa Timur tidak mengetahui kondisi terbaru tentang lahan tersebut apakah sudah dibebaskan seluruhnya atau belum.	Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat apabila dilihat dari sisi rencana pembangunan kawasan seluas 4.000 ha namun belum diketahui apakah lahan tersebut sudah dibebaskan sepenuhnya atau belum. Hal tersebut diperjelas oleh pihak PT. Jakamitra yang menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan adalah pembebasan lahan karena masih ada beberapa lahan milik warga yang belum terbeli dan masih ada lahan yang digunakan sebagai permukiman di daerah perencanaan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.
		tapi kadang-kadang ada kawasan industri yang belum seluruhnya membebaskan lahan, saya gatau kondisi di lamongan itu sudah dibebaskan semua atau belum	A1.2		
		Jadi PT. Jakamitra ini punya kewajiban 1. Membebaskan lahan	A1.3		
		mungkin lahannya sudah ada tapi belum ngurus jadi masih berupa rencana aja	A1.4		
		kemarin kita kirim staff kesana katanya masih belum ada apa-apa hanya hamparan tanah saja	A1.5		
	G2	tapi kan sekarang masih berupa lahan	A1.1	Kondisi eksisting kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan masih berupa lahan	
	G3	masih ada beberapa daerah permukiman kalau itu dijadikan kawasan industri itu harus memindahkan daerah permukiman tersebut baru bisa menyatu menjadi kawasan industri	A1.1	Berdasarkan informasi dari Bappeda bidang fisik dan prasarana, diketahui bahwa masih ada lahan yang digunakan sebagai permukiman di daerah rencana kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.	
	P1	kami masih tahap beli-beli tanah saja dan belum ada aktivitas apapun	A1.1	Proses realisasi kawasan industri maritim yang dilakukan oleh pihak PT. Jakamitra masih dalam tahap pembebasan lahan dan hal tersebut merupakan kendala dalam pembangunan kawasan industri, karena masih ada tanah milik orang lain di tengah lahan milik PT. Jakamitra sehingga masih belum bisa memulai proses pembangunan kawasan industri.	
		Tanah kami belum utuh, masih ada yang belum terbeli di dalam hamparan tersebut sehingga belum bisa dibangun karena masih ada tanah milik orang di tengah-tengah tanah kami, jadi kami masih fokus membebaskan tanah	A1.2		
iya pembebasan lahan		A1.3			
Jaringan Air Bersih	G1	Tidak Berpendapat	-	-	Dari hasil wawancara dengan pihak Bappeda bidang perekonomian dan fisik dan prasarana serta pihak PT. Jakamitra diketahui bahwa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan jaringan air bersih
	G2	Sementara ini ya sudah cukup ya kalau untuk jaringan air bersihnya, tapi nanti kalo kawasan tersebut sudah beroperasi ya masih	A2.1	Untuk kondisi air bersih saat ini sudah cukup, namun jika nanti kawasan industri tersebut sudah dibangun/ sudah beroperasi maka	

		kurang. Kalau sekarang ya air bersih .....ya sudah cukup		akan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan air bersih di sana	dan sudah siap jika nanti kawasan industri tersebut sudah berdiri hanya saja sekarang ini masih belum di alokasikan kesana karena belum adanya kawasan industri yang otomatis belum adanya permintaan, namun dari pihak PT. Jakamitra mengungkapkan bahwa ketersediaan air bersih harus ditingkatkan. Melihat kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan kondisi air bersih di kawasan perencanaan tersebut saat ini sudah cukup namun perlu ditingkatkan lagi, yang sebenarnya dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan air bersih tersebut namun masih menunggu adanya permintaan dari kawasan industri yang saat ini masih belum terbangun.
	G3	kalau jaringan air bersih, Kabupaten Lamongan itu siap bila nanti itu betul-betul dilaksanakan untuk kawasan maritim sudah dieprsiapkan untuk jaringan air bersihnya, tinggal menyambungkan, nah penyambungannya itu yang dibebankan kepada industri-industri tersebut	A2.1	Berdasarkan informasi dari Bappeda bidang fisik dan prasarana, jaringan air bersih yang ada di Kabupaten Lamongan sudah siap untuk menunjang kawasan indsutri, namun masih belum dialirkan sepenuhnya karena kawasan industri tersebut masih belum berdiri sehingga belum dialokasikan kesana. Jika kawasan tersebut sudah ada dan sudah ada permintaan dari industri-industri yang beroperasi di kawasan tersebut nantinya baru akan dialirkan ke kawasan industri itu namun penyambungannya dibebankan kepada pihak industri.	
		sudah dipersiapkan tapi belum dialokasikan kesana, tinggal menunggu permintaan dari industri-industri tersebut	A2.2		
	P1	ketersediaan air bersih perlu ditingkatkan	A2.1	Menurut PT. Jakamitra ketersediaan air bersih di lokasi kawasan industri maritim perlu ditingkatkan.	
Saluran Drainase	G1	Tidak berpendapat	-	-	Dari hasil wawancara dengan pihak bappeda baik bidang perekonomian maupun bidang fisik dan prasarana, dijelaskan bahwa tidak ada permasalahan terkait jaringan drainase di kawasan pantura perencanaan industri maritim Kabupaten Lamongan dan siap apabila nantinya kawasan tersebut sudah beroperasi.
	G2	kalo selama ini gaada laporan permasalahan terkait itu ya	A3.1	Tidak ada laporan permasalahan terkait jaringan drainase di kawasan pantura	
	G3	jaringan drainasenya sudah, sudah tidak ada masalah	A3.1	Jaringan drainase di kawasan perencanaan industri sudah siap apabila dijadikan kawasan industri maritim	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Jaringan Telekomunikasi	G1	Tidak berpendapat	-	-	Dari hasil wawancara dengan pihak bappeda baik bidang perekonomian maupun bidang fisik dan prasarana, dijelaskan bahwa tidak ada permasalahan terkait jaringan telekomunikasi di kawasan perencanaan industri maritim Kabupaten Lamongan dan siap apabila nantinya kawasan tersebut sudah beroperasi karena sudah ada beberapa menara telekomunikasi yang sudah mendapatkan ijin dan sudah beroperasi.
	G2	kalo selama ini gaada laporan permasalahan terkait itu ya	A4.1	Tidak ada laporan permasalahan terkait jaringan telekomunikasi di kawasan pantura	
	G3	oh sudah gak masalah karena disana sudah ada beberapa menara yang siap, sudah ada beberapa menara telekomunikasi didaerah wilayah sana yang sudah beroperasi, sudah mendapatkan ijin	A4.1	Sudah terdapat beberapa menara telekomunikasi yang sudah mendapatkan ijin dan sudah beroperasi di daerah perencanaan kawasan industri maritim	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Jaringan Listrik	G1	Tidak berpendapat	-	-	

	G2	listriknya ya sudah cukup	A5.1	Jaringan listrik di pantura sudah cukup apabila kawasan industri maritim sudah beroperasi	Dari hasil wawancara dengan pihak bappeda baik bidang perekonomian maupun bidang fisik dan prasarana, dijelaskan bahwa tidak ada permasalahan terkait jaringan listrik di kawasan perencanaan industri maritim Kabupaten Lamongan dan siap apabila nantinya kawasan tersebut sudah beroperasi karena kawasan tersebut berdekatan dengan gardu induk sehingga tidak ada kendala terkait suplai listrik di kawasan tersebut.
	G3	itu juga, karena disana berdekatan dengan gardu induk	A5.1	Untuk jaringan listrik di kawasan industri maritim sudah tidak ada masalah karena lokasi yang berdekatan dengan gardu induk.	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Pengelolaan Sampah	G1	Tidak berpendapat	-	-	Pihak Bappeda bidang perekonomian mengarahkan untuk mewawancarai bidang fisik dan prasarana untuk masalah pengelolaan sampah. Dari hasil wawancara dengan bidang fisik dan prasarana dijelaskan bahwa pengelolaan sampah di daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah tidak ada masalah dan sudah terencana bagaimana proses pengangkutan sampah dari tiap industri menuju TPA yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan yang berjarak sekitar 5-10 km dari kawasan industri
	G2	pengelolaan sampah... ini aja ya kalo terkait kayak gitu sampean ke bagian fisik aja biar lebih jelas	A6.1	Untuk permasalahan pengelolaan sampah diarahkan ke bidang fisik dan prasarana karena mereka yang memegang data prasarana Kabupaten Lamongan	
	G3	Pengelolaan sampahnya, sampah domestik itu sudah dipersiapkan TPA dimana nanti setiap perusahaan harus mempunyai TPS sendiri dan sarana pengangkut untuk dibawa ke TPA.	A6.1	Pengelolaan sampah di daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah tidak ada masalah karena sudah dipersiapkan sarana TPA yang jaraknya sekitar 5-10 km dari kawasan dan sudah ada sistem pengangkutan sampah.	
		Dipersiapkan sarana TPA disana sekitar 5-10 km jaraknya dari lokasi.	A6.2		
P1	Tidak berpendapat	-	-		
Jaringan Transportasi	G1	".....Membuatkan akses ke kawasan"	A7.1	Menurut Disperindag Prov. Jawa Timur, pengelola kawasan indsutri wajib membuatkan akses menuju kawasan	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindag Prov. Jawa Timur, Bappeda bidang fisik dan prasarana serta pihak PT. Jakamitra diketahui bahwa
	G2	Tidak berpendapat	-	-	

	G3	jaringan jalan, jalannya jalan nasional kolektor primer, sudah siap	A7.1	Jalan di daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah siap apabila nantinya dibangun kawasan industri di daerah tersebut karena sudah berstatus jalan nasional dengan kelas jalan kolektor primer.	menurut pemerintah Kabupaten Lamongan jaringan jalan yang ada di pantura siap apabila nantinya dibangun kawasan industri disana karena sudah berstatus jalan nasional kolektor primer, namun menurut PT. Jakamitra akses jalan menuju kawasan disana perlu dilebarkan lagi. Menurut Disperindag Prov. Jawa Timur pihak yang dibeban kan untuk membuat dan mengurus akses ke kawasan adalah pihak pengelola. Sehingga jika disimpulkan jalan di pantura sudah siap mendukung kawasan industri karena sudah berstatus jalan nasional kolektor primer hanya saja akses menuju kawasan industrinya sendiri perlu dilebarkan lagi yang itu merupakan tugas dari pengelola kawasan indutri tersebut.
	P1	ada yang perlu ditingkatkan seperti pelebaran akses jalan	A7.1	Menurut PT. Jakamitra perlu meningkatkan lebar jalan yang ada di daerah perencanaan kawasan industri maritim.	
IPAL	G1	Tidak berpendapat	-	-	Karena sudah diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan pengelola limbah B3 sehingga tidak ada permasalahan yang berarti terkait IPAL dan limbah di daerah perencanaan kawasan industri maritim.
	G2	Tidak berpendapat	-	-	
	G3	Untuk limbah B3nya kita persyaratkan bagi mereka untuk bekerjasama dengan perusahaan pengelola limbah B3	A8.1	Untuk pengelolaan limbah, pelaku industri sudah diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan pengelola limbah B3 sehingga limbah yang dihasilkan oleh industri dapat dikelola dengan baik	
		IPALnya otomatis, kan diwajibkan juga	A8.2		
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Kesesuaian Tata Ruang	G1	Tidak berpendapat	-	-	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda selaku instansi yang merencanakan kawasan industri di Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa lokasi kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan RTRW dan sudah di tetapkan sebagai kawasan indsutri maritim oleh
	G2	kawasan industrinya memang awal tahun 2017 kan dari Kabupaten Lamongan diundang kementerian kemaritiman terkait penetapan kawasan industri itu	A9.1	Lokasi perencanaan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sudah ditetapkan sebagai kawasan industri oleh kementerian kemaritiman.	
	G3	karena disana peruntukannya emang untuk kawasan industri	A9.1		

		sudah sesuai lah (RTRW)	A9.2	Kecamatan Paciran dan Brondong memang diperuntukkan untuk kawasan industri, sehingga sudah sesuai dengan RTRW	Kementerian Kemaritiman sehingga daerah perencanaan kawasan industri tersebut memang sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kawasan peruntukan industri.
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Ramah Lingkungan	G1	Tidak berpendapat	-	-	
	G2	Tidak berpendapat	-	-	
	G3	kalau pengaruh terhadap lingkungan sekitar, yang jelas dengan adanya kawasan itu dikhawatirkan nantinya itu para nelayan, kan tentunya akan ada reklamasi, akan adanya pembangunan terminal khusus, itu yang dikhawatirkan nanti nelayan tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal	A10.1	Dengan adanya pembangunan kawasan industri maritim nantinya akan ada reklamasi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perairan di sekitarnya yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang tidak optimal.	Adanya rencana terkait reklamasi untuk pembangunan terminal khusus
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Sumberdaya	G1	Tidak berpendapat	-	-	
	G2	Kalau untuk sumberdaya kemaritiman ya, di Kabupaten Lamongan ini terutama di pantura kan ada TPI sedayulawas yang hasil tangkapannya itu biasa digunakan untuk bahan baku industri-industri pengolahan ikan. Kita juga ada pertambangan minyak dan gas bumi juga ada pertambangan bukan logam dan batuan di pantura.	A11.1 A11.2	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda bidang perekonomian dikatakan bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat beberapa sumberdaya yang dapat digunakan sebagai pendukung kawasan industri maritim, seperti adanya TPI sedayulawas yang hasil tangkapannya dapat digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan, adanya pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan bukan logam dan batuan.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda bidang perekonomian dikatakan bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat beberapa sumberdaya yang dapat digunakan sebagai pendukung kawasan industri maritim, seperti adanya TPI sedayulawas yang hasil tangkapannya dapat digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan, adanya pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan bukan logam dan batuan.

		Untuk sumberdaya manusianya, jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan ini cukup apabila nanti diserap oleh industri-industri yang ada di kawasan industri maritim ditambah lagi adanya pelatihan terkait industri jadi sangat menunjang kalo nantinya kawasan itu sudah ada.	A11.3	bukan logam dan batuan. Untuk sumberdaya manusianya sendiri berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan cukup untuk menunjang industri-industri yang di kawasan tersebut, terlebih lagi adanya pelatihan terkait keahlian industri sehingga dapat mengoptimalkan proses kegiatan industri disana.	Untuk sumberdaya manusianya sendiri berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan cukup untuk menunjang industri-industri yang di kawasan tersebut, terlebih lagi adanya pelatihan terkait keahlian industri sehingga dapat mengoptimalkan proses kegiatan industri disana.
	G3	Tidak berpendapat	-	-	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Peran Pemerintah	G1	kami hanya bisa mendorong kalau ada industri baru kita dorong kita arahkan ke kawasan industri tersebut tetapi kawasannya harus siap dulu	A12.1	Menurut Disperindag Prov. Jawa Timur, pemerintah khususnya Disperindag berperan mendorong/ mengarahkan industri baru ke dalam kawasan industri, namun kawasan industri tersebut sudah harus siap terlebih dahulu.	Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari 2 instansi pemerintah yang diwawancarai memiliki peran yang berbeda dalam mendukung kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan. Untuk Disperindag Prov. Jawa Timur berperan mendorong/ mengarahkan industri baru ke dalam kawasan industri tetapi kawasan industri tersebut harus siap terlebih dahulu, sedangkan untuk Bappeda Kabupaten Lamongan berperan melakukan koordinasi dan FGD dengan pihak-pihak yang terlibat dengan pembentukan kawasan industri maritim serta mengarahkan beberapa industri yang telah ada di pantura untuk menjadi sebuah kawasan dengan mewadahi dan memfasilitasi untuk membuat kawasan industri tersebut.
	G2	kita melakukan koordinasi-koordinasi terkait dengan rencana pembentukan kawasan itu, sampai terakhir kita melaksanakan FGD intinya mereka setuju.	A12.1	Hasil wawancara dengan Bappeda diketahui bahwa Bappeda telah melakukan koordinasi dan FGD dengan pihak-pihak yang terlibat dengan pembentukan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan yang inti dari koordinasi tersebut adalah industri-industri di wilayah pantura setuju apabila dibentuk kawasan industri maritim.	
		Industri-industri di wilayah pantura itu setuju kalau dibentuk kawasan itu	A12.2		
	G3	intinya di Kabupaten Lamongan ini sudah ada beberapa industri maritim yang siap untuk diarahkan menjadi kawasan industri maritim, seperti itu hasilnya yang dirapatkan	A12.1	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda bidang fisik dan prasarana disebutkan bahwa pemerintah telah mengarahkan beberapa industri yang ada di pantura untuk dijadikan sebuah kawasan industri maritim dan pemerintah sudah mempersiapkan dan mewadahi untuk membuat kawasan industri tersebut.	
		bahasannya sudah dipersiapkan untuk atau diberikan wadah untuk membuat kawasan industri	A12.2		
		Kita sudah memfasilitasi mereka untuk menjadi sebuah kawasan industri	A12.3		

	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Kelembagaan	G1	iyaa itu yang gak jalan jadinya tidak berprogress	A13.1	Kelembagaan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan tidak berjalan sehingga pembangunan kawasan tidak berprogress.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindag Prov. Jawa Timur dan Bappeda Kabupaten Lamongan diketahui bahwa kelembagaan kawasan industri maritim dtidak berjalan bahkan belum ada kesepakatan dalam pembentukan kelembagaan tersebut sehingga belum ada progress pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan inti karena kelembagaan merupakan syarat dalam pembentukan sebuah kawasan industri.
	G2	ada beberapa persyaratan termasuk yang ada kelembagaan	A13.1	Dalam membuat sebuah kawasan industri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kelembagaan dan jika melihat kondisi di Kabupaten Lamongan belum ada kesepakatan terkait pembentukan kelembagaan yang mengurus kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan.	
		Ya itu kendalanya ya di pembentukan kelembagaannya yang sampe sekarang itu belum terbentuk	A13.2		
		PT. Jakamitra itu bukan selaku kelembagaannya tapi dia itu sebagai perusahaan yang membangun kawasan industri penunjang di kawasan industri	A13.3		
		untuk kelembagaannya masih belum ada kesepakatan siapa yang menjadi lembaganya	A13.4		
	G3	saya rasa masih belum (kelembagaan)	A13.1	Kelembagaan terkait kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan masih belum terbentuk dan itu merupakan salah satu permasalahan pembentukan kawasan industri maritim.	
		iya salah satu kendalanya	A13.2		
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Persaingan	G1	Tidak berpendapat	-	-	Karena ada beberapa industri yang bergerak dibidang yang sama sehingga menimbulkan persaingan dan tidak mau menjadi satu kawasan. Tetapi pada variabel peran pemerintah telah disebutkan bahwa industri-industri di pantura telah setuju jika dijadikan sebagai kawasan industri maritim.
	G2	Tidak berpendapat	-	-	
	G3	mereka juga kadang menjadi persaingan atau kompetitor sehingga tidak mau menjadi satu kawasan	A14.1	Karena ada beberapa industri yang bergerak dibidang yang sama sehingga menimbulkan persaingan dan tidak mau menjadi satu kawasan.	
		P1	Tidak berpendapat	-	
Permintaan	G1	Kalau untuk industri terkait maritim yang ada di kawasan tersebut sudah ada beberapa ya seperti PT. Dok Perkapalan, LIS sama ada beberapa industri lain. Tapi kalau mau lebih lengkapnya lagi bisa di cek ke dinas penanaman modal	A15.1	Sudah terdapat industri yang bergerak di bidang maritim di kawasan tersebut dan masih ada permintaan investasi di kawasan tersebut yang dapat dilihat di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	Sudah ada indutri yang bergerak di bidang maritim yang siap diarahkan menjadi kawasan industri dan masih ada permintaan akan investasi di kawasan tersebut. Data terkait permintaan kawasan industri terutama industri maritim terdapat di Dlnas Penanaman modal Kabupaten Lamongan.
	G2	Tidak berpendapat	-		

	G3	sudah ada beberapa industri maritim yang siap untuk diarahkan menjadi kawasan industri maritim	A15.1	Sudah terdapat beberapa industri maritim yang siap untuk diarahkan menjadi kawasan industri	
	P1	Tidak berpendapat	-		
Tingkat Keamanan	G1	Tidak berpendapat	-	-	Tingkat keamanan daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah terjamin karena lokasinya memang diperuntukkan untuk kegiatan industri sehingga sudah diantisipasi.
	G2	Tidak berpendapat	-	-	
	G3	secara keamanannya sudah terjamin karena memang lokasinya memang kita sediakan untuk kawasan industri,	A16.1	Tingkat keamanan daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah terjamin karena lokasinya memang diperuntukkan untuk kegiatan industri sehingga sudah diantisipasi.	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Tingkat Kenyamanan	G1	Tidak berpendapat	-	-	Tingkat kenyamanan daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah terjamin karena lokasinya memang diperuntukkan untuk kegiatan industri.
	G2	Tidak berpendapat	-	-	
	G3	kalau kenyamanannya juga mungkin mengikuti ya	A17.1	Tingkat kenyamanan daerah perencanaan kawasan industri maritim sudah terjamin karena lokasinya memang diperuntukkan untuk kegiatan industri.	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	
Pelabuhan	G1	Tidak berpendapat	-	-	Di Kabupaten Lamongan sudah terdapat beberapa pelabuhan yang aktif digunakan sampai saat ini, diantaranya adalah Pelabuhan ASDP Paciran, Pelabuhan Perikanan Brondong dan Pelabuhan Khusus Barang LIS. Kegiatan pengiriman barang/ logistik sudah dapat dilakukan di Pelabuhan LIS namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung Perak karena tidak ada bea cukai di Pelabuhan LIS.
	G2	Tidak berpendapat	-	-	
	G3	Kabupaten Lamongan memiliki beberapa pelabuhan diantaranya ada pelabuhan ASDP paciran, pelabuhan perikanan nusantara di brondong dan pelabuhan khusus barang di LIS yang sudah digunakan kalau ekspor-impor masih di pelabuhan tanjung perak karena masih belum ada bea cukai di pelabuhan LIS	A18.1 A18.2	Kabupaten Lamongan memiliki beberapa pelabuhan yang aktif digunakan sampai saat ini, diantaranya adalah Pelabuhan ASDP Paciran, Pelabuhan Perikanan Brondong dan Pelabuhan Khusus Barang LIS. Kegiatan pengiriman barang/ logistik sudah dapat dilakukan di Pelabuhan LIS namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung Perak karena tidak ada bea cukai di Pelabuhan LIS.	
	P1	Sudah ada pelabuhan khusus barang, namanya pelabuhan LIS yang berada di Paciran	A18.1	Sudah terdapat pelabuhan khusus barang LIS di Kabupaten Lamongan	
Industri Pendukung	G1	Tidak berpendapat	-	-	Sudah terdapat perusahaan yang ingin membuka kawasan industri yang akan menungjang kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan
	G2	perusahaan yang membangun kawasan industri penunjang di kawasan industri maritim	A19.1	Terdapat perusahaan yang akan membangun kawasan industri penunjang kawasan industri maritim	
	G3	sudah ada perusahaan yang ingin membuka kawasan untuk menunjang kawasan industri maritim disana	A19.1	Sudah ada perusahaan yang ingin membuka kawasan untuk menunjang kawasan industri maritim.	
	P1	Tidak berpendapat	-	-	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Identifikasi permasalahan yang ada di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan dilakukan dengan wawancara kepada responden berdasarkan variabel-variabel pendorong pengembangan kawasan industri. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa diperlukan beberapa persyaratan dalam pembentukan sebuah kawasan industri, seperti ketersediaan lahan minimal 50 ha, ketersediaan jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, drainase, jaringan telekomunikasi, pengelolaan sampah dan limbah, dan kelembagaan.

Kondisi di Kabupaten Lamongan sendiri, khususnya di wilayah pantura telah tersedia lahan kosong lebih dari 50 ha yaitu sekitar 4.000 ha menurut rencana KEK industri maritim Kabupaten Lamongan namun masih belum sepenuhnya dibebaskan karena masih ada yang digunakan sebagai kawasan permukiman dan lahan milik warga, hal tersebut menjadikan permasalahan tersendiri dalam pembangunan kawasan industri maritim.



**Gambar IV. 1** Kondisi Lahan di Wilayah Peruntukan Industri  
*Sumber: Hasil observasi, 2018*

Proses pembebasan lahan seluruhnya dibebankan kepada pihak pengembang kawasan industri tersebut dan dari informasi PT. Jakamitra, mereka masih dalam tahap pembelian dan pembebasan lahan karena masih ada lahan milik warga di tengah-tengah lahan mereka sehingga mereka tidak bisa memulai proses pembangunan. Untuk kondisi jaringan listrik di

Kabupaten Lamongan terutama di wilayah pantura sudah cukup dan siap apabila nantinya kawasan industri tersebut telah dibangun karena lokasinya yang berdekatan dengan gardu induk. Untuk drainase di kawasan tersebut juga sudah dipersiapkan dan sudah tidak ada masalah, sedangkan untuk jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut sudah ada beberapa menara telekomunikasi yang sudah mendapatkan izin dan sudah beroperasi.



**Gambar IV. 2** Kondisi Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik di Wilayah Peruntukan Industri  
*Sumber: Hasil observasi, 2018*

Pengelolaan sampah dan limbah di kawasan tersebut juga sudah diatur karena setiap pelaku industri diwajibkan memiliki TPS dan bekerjasama dengan perusahaan pengelola limbah B3 sehingga sistem persampahan dan pengolahan limbahnya sudah teratur terlebih lagi pemerintah Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan TPA yang jaraknya sekitar 5-10 km dari kawasan sehingga untuk pengelolaan sampah dan limbahnya sudah siap apabila kawasan industri maritim tersebut sudah beroperasi. Untuk jaringan jalannya sendiri berdasarkan informasi dari Bappeda Kabupaten Lamongan di

wilayah pantura sudah berstatus jalan nasional kolektor primer sehingga sudah layak apabila dijadikan sebuah kawasan industri. Namun, menurut pihak PT. Jakamitra akses menuju kawasan industri disana perlu dilebarkan lagi.



**Gambar IV. 3** Kondisi Jalan Menuju Kawasan Industri (Jl. Raya Deandles)  
*Sumber: Hasil observasi, 2018*

Dari hasil wawancara dengan pihak Bappeda bidang perekonomian dan fisik dan prasaran serta pihak PT. Jakamitra diketahui bahwa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan jaringan air bersih dan sudah siap jika nanti kawasan industri tersebut sudah berdiri hanya saja sekarang ini masih belum di alokasikan kesana karena belum adanya kawasan industri yang otomatis belum adanya permintaan, namun dari pihak PT. Jakamitra mengungkapkan bahwa ketersediaan air bersih masih harus ditingkatkan lagi.

Dari pihak pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan kawasan industri tersebut, seperti dari pihak Disperindag Provinsi Jawa Timur sudah mendorong pelaku industri baru untuk bergabung ke dalam kawasan industri maritim tersebut, pihak Bappeda Kabupaten

Lamongan juga sudah memfasilitasi para pelaku industri di wilayah pantura untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan kawasan industri maritim. Namun dari koordinasi tersebut muncul persyaratan-persyaratan dari pemerintah pusat dalam pembentukan sebuah kawasan industri seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, salah satunya adalah kelembagaan. Untuk kelembagaan di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sendiri masih belum ada kesepakatan antara pihak pemerintah dengan para pelaku industri untuk membentuk sebuah kelembagaan khusus sehingga proses realisasi kawasan industri maritim masih belum bisa dilanjutkan.

**Tabel IV. 18** Hasil Identifikasi Permasalahan yang ada di Kawasan Industri Maritim

No.	Variabel	Permasalahan
1.	Lahan	Belum sepenuhnya lahan untuk kawasan industri maritim dibebaskan. Ada beberapa lahan yang masih digunakan sebagai permukiman dan masih ada lahan milik warga di tengah-tengah lahan untuk kawasan industri.
2.	Jaringan Air Bersih	Untuk saat ini kondisi air bersih di pantura sudah cukup namun jika kawasan industri tersebut sudah beroperasi jumlah air bersihnya masih kurang.
3.	Saluran Drainase	Sudah tidak ada masalah
4.	Jaringan Telekomunikasi	Sudah tidak ada masalah
5.	Jaringan Listrik	Sudah tidak ada masalah
6.	Pengelolaan Sampah	Sudah tidak ada masalah

7.	Jaringan Transportasi	Jalan di pantura sudah berstatus jalan nasional kolektor primer dengan lebar jalan 5 meter, namun akses menuju kawasan industri perlu diperlebar.
8.	IPAL	Sudah tidak ada masalah
9.	Kesesuaian Tata Ruang	Sudah tidak ada masalah
10.	Ramah Lingkungan	Sudah tidak ada masalah
11.	Sumberdaya Sektor Maritim	Sudah tidak ada masalah
12.	Peran Pemerintah	Sudah tidak ada masalah
13.	Kelembagaan	Belum terbentuknya kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan industri (ex: SIER) dan belum ada kesepakatan terkait kelembagaan tersebut.
14.	Persaingan	Sudah tidak ada masalah
15.	Permintaan	Sudah tidak ada masalah
16.	Tingkat Keamanan	Sudah tidak ada masalah
17.	Tingkat Kenyamanan	Sudah tidak ada masalah
18.	Pelabuhan	Sudah terdapat beberapa pelabuhan yang dapat menunjang aktivitas industri, namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung Perak karena belum adanya bea cukai di Kabupaten Lamongan.

19.	Industri Pendukung	Ada pengembang yang ingin membuka kawasan penunjang industri maritim namun masih dalam proses pembangunan karena terkendala masalah lahan sehingga industri maritim yang sudah beroperasi masih harus mengambil bahan baku dari luar Kabupaten Lamongan
-----	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Hasil dari tabel diatas didapatkan melalui proses *content analysis* yang kemudian dikonfirmasi melalui data sekunder terkait variabel penelitian yang digunakan di wilayah penelitian dan kondisi eksisting di lapangan guna memperkuat dan memvalidasi *statement* dari stakeholder terkait kondisi dan permasalahan yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.

#### 4.3.2 Identifikasi Alur Kegiatan Industri Maritim

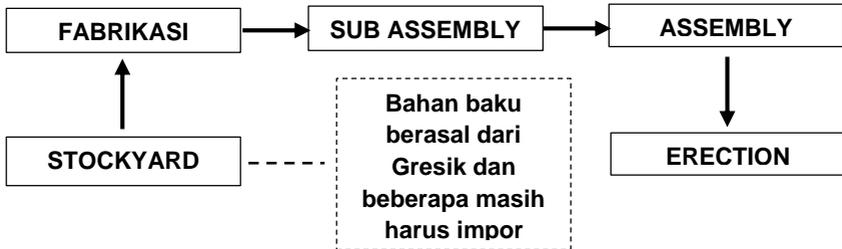
Industri yang sudah ada di wilayah pantura Kabupaten Lamongan terdiri beberapa kegiatan industri seperti industri perkapalan, industri pengolahan ikan, serta industri pergudangan dan logistik. Berikut merupakan alur kegiatan industri yang ada di wilayah pantura Kabupaten Lamongan:

##### (1) Alur Kegiatan Galangan Kapal

Secara umum galangan kapal dibedakan menjadi 3 yakni:

- a. Galangan kapal bangunan baru
- b. Galangan kapal reparasi
- c. Galangan kapal reparasi dan bangunan baru

Galangan kapan yang terdapat di Kabupaten Lamongan merupakan galangan kapal reparasi dan bangunan baru yang memiliki alur kegiatan mulai dari proses kedatangan material yang berasal dari Gresik dan beberapa bagian kapal yang impor, kemudian fabrikasi baja, *sub assembly*, *assembly*, dan *erection*.



**Gambar IV. 4** Alur Kegiatan Galangan Kapal Reparasi dan Bangunan Baru  
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2018

## (2) Alur Kegiatan Industri Perkapalan Rakyat (IKM)

Untuk kegiatan industri perkapalan rakyat sendiri memiliki alur kegiatan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan alur kegiatan galangan kapal. Prosesnya dimulai dari pemesanan bahan baku, bahan baku masuk ke dalam workshop, fabrikasi, *assembly*, dan selanjutnya pemasaran yang mayoritas dipasarkan di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya.



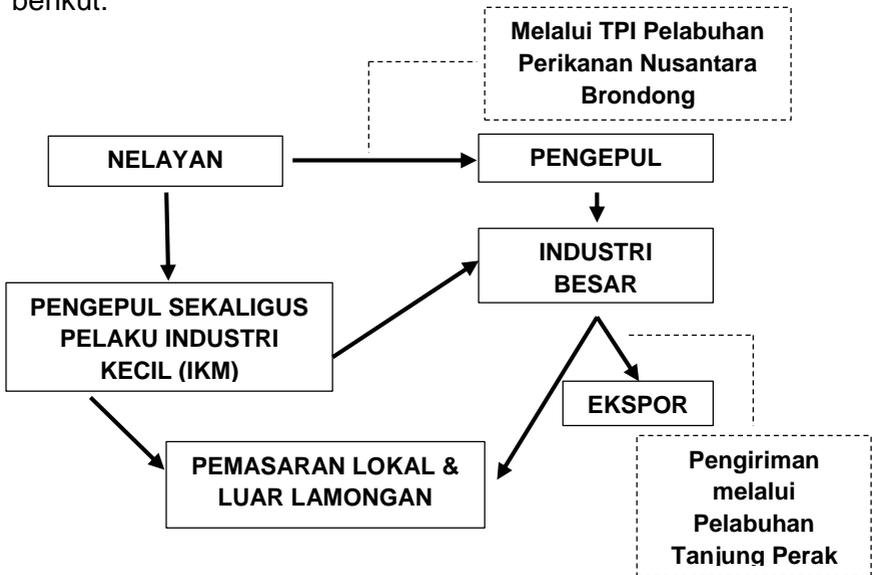
**Gambar IV. 5** Alur Kegiatan Industri Perkapalan Rakyat (IKM)  
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2018

Alur kegiatan industri perkapalan rakyat ini sekilas memiliki alur kegiatan yang tidak jauh berbeda dari alur kegiatan galangan kapal, namun alur kegiatan industri perkapalan tersebut memiliki perbedaan dari segi teknik pembuatan kapal, kompetensi pekerja, dan bahan baku yang digunakan. Untuk industri perkapalan rakyat sendiri menggunakan bahan baku berupa kayu dan teknik yang digunakan dalam membuat bagian-bagian kapal rakyat

tersebut berbeda dengan industri galangan kapal, tentunya kompetensi pekerjaanya juga berbeda antara kedua industri tersebut. Meskipun kedua industri tersebut memiliki alur yang hampir sama, namun karena adanya beberapa perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya membuat kedua industri tersebut sulit untuk disatukan atau bekerjasama.

### (3) Alur Kegiatan Industri Pengolahan Ikan

Alur kegiatan industri pengolahan ikan di Kabupaten Lamongan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu IKM pengolahan ikan dan industri besar yang secara umum saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar IV. 6** Alur Kegiatan Industri Pengolahan Ikan

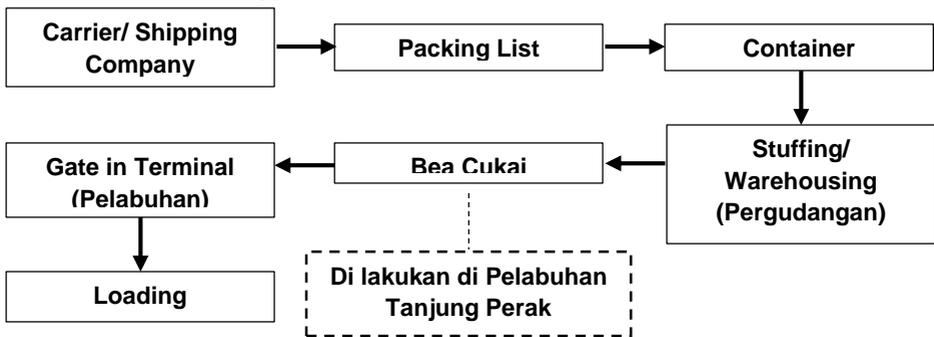
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2018

Alur kegiatan industri pengolahan ikan tersebut merupakan gabungan dari 2 alur industri, yaitu IKM pengolahan ikan dan industri besar pengolahan ikan. Kedua alur industri

tersebut dapat digabungkan karena memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya seperti yang dapat dilihat pada gambar alur kegiatan industri pengolahan ikan diatas. Hasil olahan IKM sebagian digunakan sebagai input bahan pada industri besar dan sebagian dari pelaku IKM pengolahan ikan juga berprofesi sebagai pengepul dan nelayan sehingga memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

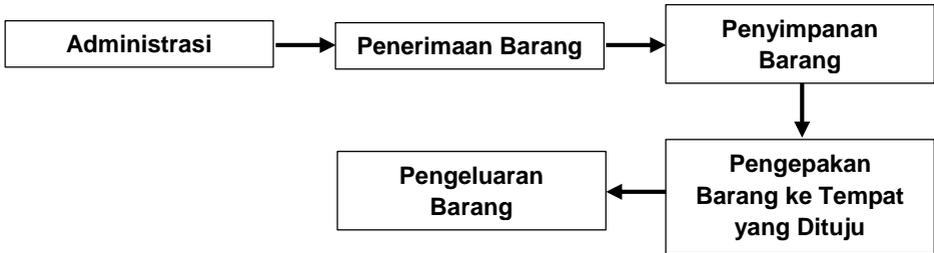
#### (4) Alur Kegiatan Pergudangan dan Logistik

Untuk kegiatan industri pergudangan dan logistik memiliki alur kegiatan yang dimulai dari kontrak dengan perusahaan hingga sampai pada loading barang menggunakan kapal untuk melakukan pengiriman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:



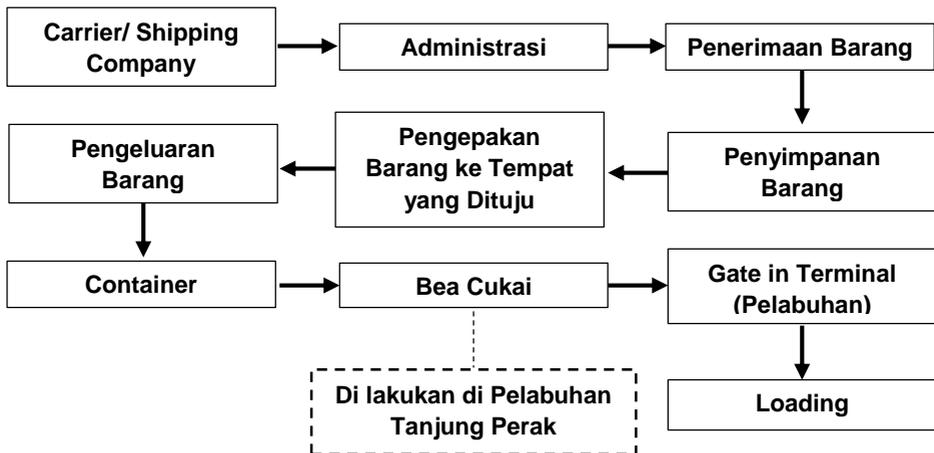
**Gambar IV. 7** Alur Kegiatan Logistik  
*Sumber: PT. Maersk Line, 2018*

Alur kegiatan pergudangan dan logistik merupakan satu kesatuan kegiatan industri yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam alur kegiatan logistik terdapat kegiatan pergudangan didalamnya. Berdasarkan gambar diatas terlihat ada aktivitas pergudangan dalam sebuah alur kegiatan logistik. Aktivitas pergudangan sendiri sebenarnya memiliki alur kegiatan industri sendiri di dalamnya seperti pada gambar berikut:



**Gambar IV. 8** Alur Kegiatan Pergudangan  
*Sumber: PT. Maersk Line, 2018*

Sehingga jika kedua alur kegiatan tersebut digabungkan akan menjadi seperti berikut:



**Gambar IV. 9** Alur Kegiatan Pergudangan dan Logistik  
*Sumber: Hasil Analisis, 2018*

Kegiatan logistik di Kabupaten Lamongan dilakukan melalui Pelabuhan LIS yang terletak di Kecamatan Paciran karena merupakan pelabuhan khusus barang, namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung

Perak karena tidak ada bea cukai di pelabuhan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya dan hasil wawancara dengan stakeholder maka didapatkan isu dan permasalahan berdasarkan alur kegiatan industri maritim yang sudah beroperasi di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV. 19** Hasil Identifikasi Isu dan Permasalahan Alur Kegiatan Industri Maritim

<b>Alur Kegiatan</b>	<b>Isu dan Permasalahan</b>
Industri Galangan Kapal	Bahan baku baja beberapa ada yang diambil dari Gresik dan beberapa bagian kapal yang masih harus impor. Meski ada bagian alur kegiatan yang sama dengan alur kegiatan industri perkapalan rakyat (IKM) namun kegiatannya tidak bisa disatukan atau disubstitusi karena memiliki kompetensi atau keahlian yang berbeda.
Industri Perkapalan Rakyat (IKM)	Bahan baku utama berupa kayu masih harus diambil dari luar Pualu Jawa. Beberapa pelaku industri perkapalan rakyat bekerja sebagai nelayan juga.
Industri Pengolahan Ikan	IKM pengolahan ikan dan industri besar pengolahan ikan merupakan satu kesatuan kegiatan industri yang saling berkaitan seperti pada gambar alur kegiatan industri pengolahan ikan. Pemasaran industri besar pengolahan ikan sudah mencapai nasional hingga ekspor ke luar negeri.
Pergudangan dan Logistik	Kegiatan pergudangan dan logistik merupakan satu kesatuan kegiatan industri yang saling berkaitan seperti pada gambar alur kegiatan pergudangan dan logistik. Kegiatan logistik di Kabupaten Lamongan dilakukan melalui Pelabuhan LIS karena merupakan pelabuhan khusus barang, namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung Perak karena tidak ada bea cukai di pelabuhan Kabupaten Lamongan.

*Sumber: Hasil Analisis, 2018*

#### **4.3.3 Identifikasi Faktor-Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Industri**

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri digunakan teknik analisa

Delphi agar peneliti dapat melakukan eksplorasi terhadap pendapat responden terkait faktor pendorong pengembangan kawasan industri selain berdasarkan sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

Terdapat 5 (lima) responden yang dilibatkan dalam tahap analisis identifikasi faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri yang dianggap mengerti tentang pengembangan kawasan industri. Responden tersebut berasal dari pihak pemerintah yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Lamongan (bidang perekonomian dan bidang fisik dan prasarana), Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dan pihak swasta yang diwakilkan oleh PT. Jakamitra Indonesia. Analisis Delphi dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara semi terstruktur kepada responden terpilih. Adapun tahapan proses Delphi dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Kuisioner Delphi Tahap 1

Dalam mengeksplorasi pendapat responden, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dimana responden diberikan pertanyaan langsung berdasarkan pemahamannya mengenai faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri. Adapun hasil eksplorasi pendapat dari masing-masing responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV. 20** Rekapitulasi Delphi Tahap 1

No.	Variabel Pendorong Pengembangan Kawasan Industri	R1	R2	R3	R4
1	Lahan	S	S	S	S
2	Jaringan Air Bersih	S	S	S	S
3	Saluran Drainase	S	S	S	S
4	Jaringan Telekomunikasi	S	S	S	S
5	Jaringan Listrik	S	S	S	S
6	Pengelolaan Sampah	S	S	S	S
7	Jaringan Transportasi	S	S	S	S

8	IPAL	S	S	S	S
9	Kesesuaian Tata Ruang	S	S	S	S
10	Ramah Lingkungan	S	S	S	S
11	Efisiensi	S	S	S	S
12	Tingkat Kenyamanan	S	S	S	S
13	Tingkat Keamanan	S	S	S	S
14	Sumberdaya	S	S	S	S
15	Permintaan	S	S	S	S
16	Persaingan	S	S	S	S
17	Peran Pemerintah	S	S	S	S
18	Kelembagaan	S	S	S	S
19	Industri Pendukung	S	S	S	S
Tambahkan Variabel Lain		Kebijakan terkait UMR buruh	-	-	-

*Sumber: Hasil Analisis, 2018*

**Keterangan:**

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

R1 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

R2 : Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Perekonomian

R3 : Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Fisik dan Prasarana

R4 : PT. Jakamitra Indonesia

Untuk lebih memahami hasil dan pendapat dari responden, berikut uraian mengenai variabel-variabel tersebut:

### 1. Lahan

Menurut para responden, lahan merupakan faktor penting dan dasar dalam sebuah pembangunan kawasan industri karena jika ingin membangun sebuah kawasan industri tetapi tidak tersedia lahan maka akan sulit membangun kawasan industri tersebut. Lahan juga merupakan salah satu persyaratan dalam membangun sebuah kawasan industri yang tertera pada PP No. 142 Tahun 2016 tentang Kawasan Industri. Pada PP No. 142 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam membuat kawasan industri setidaknya tersedia lahan minimal 50 Ha. Sehingga berdasarkan hasil Delphi tahap 1 para responden sepakat bahwa variabel lahan merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

Berdasarkan pendapat para responden, dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembebasan lahan direkomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

- Memberikan fasilitas dalam hal sosialisasi dan pembebasan lahan. Menggandeng dari pihak BPN sebagai penengah dengan pemilik lahan
  - Menggandeng tokoh masyarakat sebagai penengah antara pengembang dengan pemilik lahan
  - Memprioritaskan pembangunan di lahan yang sudah dibebaskan terlebih dahulu
  - Melakukan pendekatan dengan pemilik lahan secara intens
- 2. Prasarana (Jaringan Air Bersih, Saluran Drainase, Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi, Pengelolaan Sampah, Jaringan Transportasi, IPAL)**

Variabel prasarana ini merupakan gabungan dari beberapa variabel yang terdiri dari jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pengelolaan sampah, jaringan transportasi, dan IPAL. Berdasarkan pendapat para responden, variabel-variabel tersebut merupakan faktor pendukung/ penunjang sebuah kawasan industri sehingga dalam membangun sebuah kawasan industri harus memperhatikan variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, para responden sepakat bahwa variabel jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pengelolaan sampah, jaringan jalan, dan IPAL merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

Berdasarkan pendapat para responden, dalam menyelesaikan permasalahan terkait jaringan air bersih direkomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

- Membuat pengelolaan air bersih secara mandiri
- Bekerjasama dengan instansi penyedia air bersih untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri

- Membuat pengelolaan air bersih secara mandiri dan terpadu
- Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan kebutuhan air bersih kawasan industri

Sedangkan untuk penyelesaian permasalahan jaringan transportasi menurut para stakeholder adalah sebagai berikut:

- Pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan dengan rencana jalan tol Lamongan
- Memperlebar akses jalan menuju kawasan industri
- Mengadakan proses bea cukai di Kabupaten Lamongan agar proses distribusi lebih optimal
- Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam proses pelebaran jalan nasional yang melewati kawasan industri maritim

### **3. Kesesuaian Tata Ruang**

Berdasarkan hasil Delphi tersebut, para responden mengungkapkan bahwa dalam sebuah pembangunan kawasan industri harus memperhatikan RTRW baik provinsi maupun kabupaten agar tidak terhambat dalam proses pembangunannya. Sehingga seluruh responden sepakat bahwa variabel kesesuaian tata ruang merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

### **4. Ramah Lingkungan**

Variabel ramah lingkungan merupakan salah satu variabel penting, karena variabel tersebut berhubungan dengan lingkungan di sekitar kawasan industri yang berdampak pada aktivitas masyarakat disekitarnya. Pada kasus ini, jika dilihat pada kawasan studi maka akan berdampak pada nelayan karena kawasan industri maritim berada di wilayah pantura Kabupaten Lamongan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Sehingga jika melihat kondisi tersebut maka variabel ramah lingkungan memiliki pengaruh terhadap pembangunan kawasan industri.

## **5. Efisiensi**

Dalam membangun sebuah kawasan industri harus mempertimbangkan efisiensi dalam pembangunan tersebut, sebab tingkat percepatan pembangunan suatu kawasan industri dipengaruhi oleh tingkat efisiensi. Sehingga para responden sepakat bahwa variabel efisiensi merupakan salah satu faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

## **6. Tingkat Kenyamanan dan Keamanan**

Berdasarkan hasil Delphi tersebut, para responden mengungkapkan bahwa tingkat kenyamanan dan keamanan merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan sebuah kawasan industri karena tingkat kenyamanan dan keamanan sangat mempengaruhi kinerja dalam sebuah kawasan industri tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kenyamanan dan keamanan merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

## **7. Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan hal yang terpenting apabila ingin membangun sebuah kawasan industri maritim. Karena jika sebuah kawasan industri tetapi tidak memiliki sumberdaya di sekitar kawasan tersebut maka akan susah untuk mengembangkan kawasan tersebut sehingga tidak bisa optimal. Berbeda dengan kawasan industri yang memiliki sumberdaya di sekitar kawasan tersebut, industri tersebut akan berkembang dengan optimal karena keterjangkauan sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan pembangunan kawasan industri biasanya memilih lokasi yang berdekatan dengan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi kawasan industri tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para responden sepakat bahwa variabel sumberdaya sektor maritim termasuk kedalam faktor yang mendorong pengembangan kawasan industri khususnya industri maritim.

## **8. Permintaan dan Persaingan**

Tingginya tingkat permintaan dan persaingan di suatu kawasan juga dapat memacu terbentuknya sebuah kawasan industri di wilayah tersebut. Jika melihat kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, sudah ada beberapa permintaan investasi di kawasan industri tersebut dan terdapat beberapa persaingan antar industri yang bergerak di bidang yang sama sehingga memacu terbentuknya kawasan industri maritim di kawasan tersebut karena kondisi tersebut. Para responden sepakat bahwa variabel permintaan dan persaingan merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

## **9. Peran Pemerintah**

Peran pemerintah merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan kawasan industri karena merupakan pendukung pembangunan tersebut. Peran pemerintah sendiri terdiri dari berbagai macam seperti kebijakan, penyuluhan, pelatihan, koordinasi, dan lain sebagainya yang dapat membantu dalam pengembangan sebuah kawasan industri. Oleh karena itu, variabel peran pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam pendorong pengembangan kawasan industri.

## **10. Kelembagaan**

Variabel kelembagaan disini juga merupakan faktor penting dalam pembangunan kawasan industri karena merupakan salah satu persyaratan dalam membangun kawasan industri. Jika melihat kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan, salah satu kendala pembentukan kawasan tersebut adalah belum adanya/ belum terbentuknya kelembagaan khusus yang menangani kawasan tersebut. Kelembagaan tersebut merupakan prasyarat yang diberikan oleh Kementerian Kemaritiman dalam membentuk kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, sehingga variabel tersebut termasuk dalam faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

Berdasarkan pendapat para responden, dalam menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan khusus kawasan industri direkomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

- Bisa berasal dari pihak pengembang dan didukung dengan pihak pemerintah
- Membentuk kelembagaan pengelola kawasan industri yang bisa berasal dari pengembang/investor
- Pembentukan kelembagaan kawasan industri biasanya berasal dari pihak pengembang
- Kelembagaan biasanya berasal dari pihak pengembang kawasan industri

#### **11. Industri Pendukung**

Variabel industri pendukung merupakan variabel yang penting karena menurut responden jika suatu kawasan industri terdapat industri pendukung industri utama di dalamnya, maka kegiatan industri di kawasan tersebut akan berpusat di dalam kawasan itu sendiri sehingga akan menghemat biaya pengiriman barang dan waktu. Kegiatan industri yang berpusat di dalam kawasan industri tersebut juga akan mendorong perkembangan pembangunan kawasan itu agar dapat menunjang kegiatan yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil kuisisioner Delphi kepada para responden didapatkan kesimpulan bahwa variabel industri pendukung merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

Berdasarkan pendapat para responden, dalam menyelesaikan permasalahan terkait industri pendukung kawasan maritim direkomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

- Membangun industri pendukung disekitar kawasan industri inti
- Menyediakan kawasan industri pendukung di sekitar/ di dalam kawasan industri maritim

- Membuat klaster khusus industri pendukung kawasan industri maritim
- Menyediakan kawasan untuk industri pendukung di dekat atau di dalam kawasan industri maritim

## 12. Kebijakan terkait UMR Buruh

Menurut pendapat dari responden 1, dikatakan bahwa kebijakan pemerintah provinsi terkait UMR buruh juga mempengaruhi pembangunan kawasan industri karena semakin rendah UMR di suatu kawasan maka para pelaku industri akan semakin tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk upah pekerjanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, responden 1 menambahkan variabel kebijakan terkait UMR buruh sebagai salah satu faktor pendorong pengembangan kawasan industri.

### b. Kuisisioner Delphi Tahap 2

Untuk mendapatkan keputusan yang konsensus, maka dilakukan wawancara dan kuisisioner Delphi tahap II. Berikut merupakan rekapitulasi hasil dari wawancara dan kuisisioner Delphi yang dilakukan:

**Tabel IV. 21** Rekapitulasi Delphi Tahap 2

No.	Variabel	R1	R2	R3	R4
1	Kebijakan terkait UMR buruh	TS	TS	TS	TS

*Sumber: Hasil Analisis, 2018*

#### Keterangan:

- S : Setuju  
 TS : Tidak Setuju  
 R1 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur  
 R2 : Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Perekonomian  
 R3 : Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Fisik dan Prasarana  
 R4 : PT. Jakamitra Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisisioner Delphi tahap II diketahui bahwa variabel Kebijakan terkait UMR buruh termasuk kedalam faktor pendorong pengembangan kawasan industri namun sudah tercakupi di dalam variabel peran

pemerintah sehingga tidak perlu menjadi variabel tersendiri. Untuk variabel lainnya sudah sesuai dengan hasil Delphi tahap I, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor pendorong pengembangan kawasan industri adalah variabel Lahan, Jaringan Air Bersih, Saluran Drainase, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Listrik, Pengelolaan Sampah, Jaringan Jalan, IPAL, Kesesuaian Tata Ruang, Ramah Lingkungan, Efisiensi, Tingkat Kenyamanan, Tingkat Keamanan, Sumberdaya, Permintaan, Persaingan, Peran Pemerintah, Kelembagaan dan Industri Pendukung.

#### **4.3.4 Analisis Arahan Pengembangan Kawasan Industri Maritim Berdasarkan Faktor-Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Industri**

Perumusan arahan pengembangan kawasan industri maritim dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Input dari analisis deskriptif komparatif ini adalah hasil analisis sasaran 1 dan sasaran 2 dibandingkan dengan hasil analisis sasaran 3. Dari permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan industri maritim dibandingkan dengan rekomendasi solusi menurut para stakeholder terkait permasalahan kawasan industri. Isu dan permasalahan yang ada di dalam alur kegiatan industri juga dibandingkan dengan rekomendasi solusi menurut para stakeholder terkait permasalahan kawasan industri sehingga mendapatkan arahan pengembangan dari sisi yang berbeda. Berikut adalah tabel analisis perumusan arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan:

**Tabel IV. 22** Perumusan Arahan Pengembangan Berdasarkan Perbandingan Sasaran 1 dan 3

Variabel	Permasalahan di Kawasan Industri	Rekomendasi Solusi Menurut Stakeholder	Arahan Pengembangan
Lahan	Belum sepenuhnya lahan untuk kawasan industri maritim dibebaskan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan fasilitas dalam hal sosialisasi dan pembebasan lahan. Menggandeng dari pihak BPN sebagai penengah dengan pemilik lahan</li> <li>- Menggandeng tokoh masyarakat sebagai penengah antara pengembang dengan pemilik lahan</li> <li>- Memprioritaskan pembangunan di lahan yang sudah dibebaskan terlebih dahulu</li> <li>- Melakukan pendekatan dengan pemilik lahan secara intens</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan</li> <li>2. Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong - Paciran</li> <li>3. Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap</li> </ol>
	Ada beberapa lahan yang masih digunakan sebagai permukiman dan masih ada lahan milik warga di tengah-tengah lahan untuk kawasan industri.		

Variabel	Permasalahan di Kawasan Industri	Rekomendasi Solusi Menurut Stakeholder	Arahan Pengembangan
Jaringan Air Bersih	Jika kawasan industri tersebut sudah beroperasi jumlah air bersihnya masih kurang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pengelolaan air bersih secara mandiri</li> <li>- Bekerjasama dengan instansi penyedia air bersih untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri</li> <li>- Membuat pengelolaan air bersih secara mandiri dan terpadu</li> <li>- Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan kebutuhan air bersih kawasan industri</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan</li> <li>2. Pembangunan WTP (<i>water treatment plant</i>) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih</li> </ol>
Jaringan Transportasi	Jalan di pantura sudah berstatus jalan nasional kolektor primer, namun akses menuju kawasan industri perlu diperlebar karena kondisi eksisting hanya selebar 5 meter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan dengan rencana jalan tol Lamongan</li> <li>- Memperlebar akses jalan menuju kawasan industri</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah provinsi menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik</li> </ol>

Variabel	Permasalahan di Kawasan Industri	Rekomendasi Solusi Menurut Stakeholder	Arahan Pengembangan
	<p>Sudah terdapat beberapa pelabuhan yang dapat menunjang aktivitas industri, namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung Perak karena belum adanya bea cukai di Kabupaten Lamongan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan proses bea cukai di Kabupaten Lamongan agar proses distribusi lebih optimal</li> <li>- Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam proses pelebaran jalan nasional yang melewati kawasan industri maritim</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan <i>dry port</i> di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi <i>dwelling time</i> karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak</li> <li>3. Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)</li> </ol>

Variabel	Permasalahan di Kawasan Industri	Rekomendasi Solusi Menurut Stakeholder	Arahan Pengembangan
Kelembagaan	Belum terbentuknya kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan industri (ex: SIER) dan belum ada kesepakatan terkait kelembagaan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa berasal dari pihak pengembang dan didukung dengan pihak pemerintah</li> <li>- Membentuk kelembagaan pengelola kawasan industri yang bisa berasal dari pengembang/investor</li> <li>- Pembentukan kelembagaan kawasan industri biasanya berasal dari pihak pengembang</li> <li>- Kelembagaan biasanya berasal dari pihak pengembang kawasan industri</li> </ul>	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut

Sumber: Hasil Analisis, 2018

**Tabel IV. 23** Perumusan Arahannya Pengembangan Berdasarkan Perbandingan Sasaran 2 dan 3

Alur Kegiatan	Isu dan Permasalahan Alur Kegiatan Industri Maritim	Rekomendasi Solusi Menurut Stakeholder	Arahannya Pengembangan
Industri Galangan Kapal	Bahan baku baja beberapa ada yang diambil dari Gresik dan beberapa bagian kapal yang masih harus impor.	<p><b>Jaringan transportasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan dengan rencana jalan tol Lamongan</li> <li>- Memperlebar akses jalan menuju kawasan industri</li> <li>- Mengadakan proses bea cukai di Kabupaten Lamongan agar proses distribusi lebih optimal</li> <li>- Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam proses pelebaran jalan nasional yang melewati kawasan industri maritim</li> </ul> <p><b>Industri pendukung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun industri pendukung disekitar kawasan industri inti</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah provinsi menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik</li> <li>2. Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak</li> <li>3. Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)</li> </ol>
Industri Perkapalan Rakyat (IKM)	Bahan baku utama berupa kayu masih harus diambil dari luar Pualu Jawa		
Industri Pengolahan Ikan	Pemasaran industri besar pengolahan ikan sudah mencapai nasional hingga ekspor ke luar negeri.		
Pergudangan dan Logistik	Kegiatan logistik sudah bisa dilakukan melalui Pelabuhan LIS, namun untuk kegiatan ekspor-impor masih harus melalui Pelabuhan Tanjung Perak.		

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan kawasan industri pendukung di sekitar/ di dalam kawasan industri maritim</li><li>- Membuat klaster khusus industri pendukung kawasan industri maritim</li><li>- Menyediakan kawasan untuk industri pendukung di dekat atau di dalam kawasan industri maritim</li></ul>	4. Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber: Hasil Analisis, 2018*

Dari tabel tersebut didapatkan beberapa arahan terkait permasalahan yang ada di kawasan industri beserta isu dan permasalahan yang terdapat di dalam alur kegiatan industri yang ada di dalam kawasan tersebut. Berikut adalah arahan pengembangan kawasan industri maritim yang sudah dirumuskan sebelumnya:

1. Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan
2. Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong - Paciran
3. Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap
4. Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan WTP (*water treatment plant*) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih
6. kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah provinsi menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik
7. Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak

8. Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)
9. Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
10. Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut

Dari arahan pengembangan tersebut selanjutnya dilakukan analisis Delphi kepada para responden untuk mengetahui pendapat para responden terkait arahan pengembangan kawasan industri yang telah diusulkan. Proses analisis Delphi tersebut juga dapat memperkuat arahan pengembangan yang telah diusulkan. Berikut adalah hasil analisis Delphi yang telah dilakukan kepada beberapa responden terkait kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan:

**Tabel IV. 24** Rekapitulasi Delphi Arahan Pengembangan

No.	Permasalahan	Arahan Pengembangan	R1	R2	R3	R4
1	Pembebasan Lahan	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang dalam membebaskan lahan	S	S	S	S
2		Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut	S	S	S	S

3		Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap	S	S	S	S
4	Jaringan Air Bersih	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan	S	S	S	S
5		Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	S	S	S	S
6	Jaringan Transportasi	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah provinsi menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik	S	S	S	S
7		Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana	S	S	S	S

		tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak				
8		Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)	S	S	S	S
9	Industri Pendukung	Pembangunan kluster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim	S	S	S	S
10	Kelembagaan	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut	S	S	S	S

Sumber: Hasil Analisis, 2018

**Keterangan:**

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

R1 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

R2 : Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Perekonomian

R3 : Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Fisik dan Prasarana

R4 : PT. Jakamitra Indonesia

Berdasarkan hasil tersebut, arahan pengembangan yang sudah dirumuskan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut berdasarkan pendapat para responden:

**1. Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan.**

Berdasarkan pendapat para responden, dalam melakukan pembebasan lahan memang akan banyak ditemui

permasalahan dan akan berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar wilayah perencanaan pembangunan kawasan industri maritim sehingga dibutuhkan seorang penengah dari kalangan masyarakat sekitar dan dari pihak BPN untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan lahan tersebut dengan kekeluargaan dan musyawarah.

**2. Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong - Paciran.**

Arahan ini merupakan tindak lanjut dari permasalahan pembebasan lahan di kawasan industri tersebut. Setelah menggandeng tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi, selanjutnya dilakukan FGD/ penyuluhan kepada masyarakat terkait wilayah peruntukan industri di daerah tersebut sehingga dapat menemukan jalan tengah dalam pembebasan lahan disana.

**3. Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap.**

Kondisi wilayah perencanaan kawasan industri maritim yang sangat luas (4.000 Ha) membuat proses pembebasan lahan dan pengembangan kawasan industri tersebut lambat jika ingin membangun seluruh lahan tersebut, sehingga melihat kondisi yang seperti itu, lebih baik diprioritaskan pembangunan pada lahan yang sudah siap (sudah tidak ada lahan milik warga di dalamnya) dengan membuat beberapa klaster kawasan industri. Dengan demikian rencana pembangunan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan dapat dilakukan secara bertahap.

**4. Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.**

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan perlu dilakukan sebuah kerjasama dengan instansi penyedia air bersih seperti jasa tirta.

**5. Pembangunan WTP (water treatment plant) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.**

Guna mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih kawasan industri maritim yang cukup besar, mengingat kawasan industri tersebut direncanakan dibangun seluas 4.000 Ha maka diperlukan membangun WTP di dalam kawasan industri sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih untuk kawasan industri dan sebagai pendukung pasokan air bersih dari pemerintah Kabupaten Lamongan.

**6. Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah provinsi menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik.**

Jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik memiliki lebar hanya sekitar kurang lebih 6 meter dan merupakan jalan penghubung utama untuk kegiatan logistik industri di kawasan tersebut. Kegiatan logistik untuk para pelaku industri merupakan kegiatan yang penting, oleh karena itu perlu ditunjang guna meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan tersebut.

**7. Pembangunan *dry port* di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi *dwelling time* karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak.**

Kegiatan ekspor-impor industri di Kabupaten Lamongan masih dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak karena proses bea cukai hanya bisa dilakukan di sana sehingga membuat seluruh kegiatan ekspor-impor industri di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan sekitarnya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak yang menyebabkan penumpukan antrian. Untuk mengurangi penumpukan tersebut, perlu didukung oleh pembangunan *dry port* sehingga proses bea cukai dapat dilakukan disana dan untuk kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak hanya tinggal *loading* barang ke kapal.

**8. Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan).**

Dengan adanya rencana jalan tol yang melewati Kabupaten Lamongan, dapat digunakan sebagai penunjang dan peningkatan pelayanan terhadap proses distribusi dari industri-industri yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan. Rencana tersebut dapat ditunjang dengan menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri maritim yang dapat disambungkan dengan pembangunan jalan kolektor primer atau peningkatan kelas jalan pada Jl. Raya Pucuk-Brondong.

**9. Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim.**

Guna mendukung kegiatan industri yang terdapat di kawasan industri maritim, diperlukan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim tersebut sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan industri utama di dalamnya karena bahan baku industri utama di dapatkan dari dalam kawasan itu sendiri.

**10. Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut.**

Permasalahan kelembagaan ini merupakan salah satu persyaratan dalam pembentukan sebuah kawasan industri, oleh karena itu perlu dibentuknya sebuah lembaga yang berfungsi untuk memajemen dan mengurus kawasan itu apabila telah beroperasi. Biasanya pembentukan kelembagaan tersebut berasal dari pengembang kawasan itu sendiri atau bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah, namun konsep kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan bukan berasal dari pemerintah atau BUMN sehingga direkomendasikan untuk membentuk kelembagaan dari pihak pengembang karena mengetahui kondisi dan permasalahan di dalam kawasan mereka.

Arahan yang telah dijabarkan di atas dapat dibagi lagi berdasarkan aktor yang mengembangkan kawasan industri maritim yang terdiri atas pemerintah provinsi dengan yang diwakili oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Lamongan yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Lamongan, Dinas PU Cipta Karya Lamongan, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, dan PDAM Kabupaten Lamongan, selain itu terdapat perusahaan pengembang kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan serta masyarakat yang berada di lokasi rencana pembangunan kawasan industri maritim.

**Tabel IV. 25** Penjabaran Pihak yang Terkait Arahan Pengembangan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan

No.	Arahan Pengembangan	Pihak yang Terlibat
1	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan	Masyarakat Sekitar Kawasan Industri
		Tokoh Masyarakat Sekitar
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
		Bappeda Kabupaten Lamongan
		Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan
		Perusahaan Pengembang Kawasan Industri
2	Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut	Masyarakat Sekitar Kawasan Industri
		Tokoh Masyarakat Sekitar
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
		Bappeda Kabupaten Lamongan
		Badan Pertanahan Nasional

		Kabupaten Lamongan
		Perusahaan Pengembang Kawasan Industri
3	Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
		Bappeda Kabupaten Lamongan
		Perusahaan Pengembang Kawasan Industri
4	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan	PDAM Kabupaten Lamongan
		Perusahaan Pengembang Kawasan Industri
		Dinas PU Cipta Karya Lamongan
5	Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	Perusahaan Pengembang Kawasan Industri
6	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah provinsi menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik	Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
7	Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak	Perusahaan Pengembang Kawasan Industri
		Bappeda Kabupaten Lamongan
8	Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

	melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)	
9	Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim	Perusahaan Pengembang Kawasan Industri Bappeda Kabupaten Lamongan
10	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut	Perusahaan Pengembang Kawasan Industri

*Sumber: Hasil Analisis, 2018*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan permasalahan yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan baik dari sisi kawasan industri maupun dari sisi industri yang telah beroperasi adalah pembebasan lahan, jaringan air bersih, jaringan transportasi, industri pendukung dan kelembagaan. Permasalahan tersebut didasarkan pada faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan industri menurut para stakeholder. Dengan demikian, untuk mengembangkan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan didapatkan arahan sebagai berikut:

1. Pembebasan Lahan, untuk mengatasi permasalahan lahan telah dirumuskan arahan pengembangan berupa penyuluhan dengan masyarakat sekitar yang didampingi oleh tokoh masyarakat dan BPN terkait pengembangan kawasan industri maritim di lokasi tersebut serta memprioritaskan pembangunan kawasan pada lahan yang sudah siap bangun terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan dapat dilakukan secara bertahap.
2. Jaringan Air Bersih, untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dirumuskan arahan pengembangan berupa kerjasama dengan pihak jasa tirta dan pembangunan WTP (*water treatment plant*) di kawasan industri sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.
3. Jaringan Transportasi, karena kegiatan industri tidak terlepas dari kegiatan logistik dan ekspor-impor maka dirumuskan arahan pengembangan berupa Pelebaran

jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah daerah terutama dari Kabupaten Lamongan menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik, peningkatan kelas jalan pada Jl. Raya Pucuk-Brondong menjadi kolektor primer guna menghubungkan dengan jalan tol dan Pembangunan *dry port* di kawasan industri sehingga dapat mengurangi *dwelling time* karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak

4. Industri Pendukung, diperlukan pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim sebagai penunjang kegiatan industri di kawasan tersebut
5. Kelembagaan, diusulkan arahan berupa pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut

## 5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan pihak pengembang kawasan industri maritim harus bekerjasama dalam membebaskan lahan, mendistribusi dan mengolah air bersih ke kawasan industri, serta melakukan pelebaran jalan untuk mengembangkan kawasan industri
2. Arahan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan pihak pengembang kawasan dalam merencanakan pengembangan kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
3. Perlu dilakukan kerjasama dan komunikasi yang intensif antara pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah

dengan pihak pengembang kawasan industri agar pembangunan kawasan tersebut dapat benar-benar terealisasi dan tidak terhambat.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianto, L. 2007. *Pengantar Penilaian Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut*. Bogor: Departemen Sumberdaya Pesisir dan Laut IPB.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Arsyad. 2005. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. 2017. *Laporan Akhir Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Lamongan Tahun 2017*. Lamongan: Bappeda Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2016*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Bungin, Burhan. 2010. *Peneltian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Penanda Media Grup.
- Dirdjojuwono, Roestanto W. 2004. *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Donald C. Loch Moeller. 1975. *Industrial Development Handbook*. Washington DC: The Urban Institute.
- Feaver, James. 2011. *Dorset Marine and Coastal Topic Paper Series 2011: Marine & Maritime Industries*. Dorset: Dorset Coast Forum.
- Imam, Subrayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-agama*. Bandung: remaja Rosda Karya.
- Kamaluddin, Laode M. 2005. *Indonesia Sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kementrian Perindustrian. 2012. *Laporan Keuangan Kementrian Perindustrian Tahun 2012*. Jakarta.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis: An Introduction to its Methodology (Second Edition)*. California: Sage Publication.
- Kotler, Philip. 1997. *Marketing Management "Analysis, Planning, Implementation and Control" (9th ed.)*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Moloeng, Ixey J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

- Papilo, Petir. 2016. *Klaster Industri Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Agroindustri Bioenergi Berbasis Kelapa Sawit*. Riau: Program Studi Teknik Industri: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Porter Michael E. et al. 2010. *Shipbuilding Cluster In The Republic Of Korea*. Harvard Business School Report.
- Santoso, Eko Budi. Dkk. 2014. *Development Factors of Shipping Industry Areas to Support the Regional Innovation System in Lamongan District*. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 9(7): 219-222.
- Sevilla, Consuelo et, Al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warsono, Andri. 2012. *Pola Klaster Industri Perkapalan untuk Mendorong Daya Saing Industri Perkapalan Nasional*. Depok: FT UI.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Desain Survey

No	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Cara Mendapatkan Data
1.	Sarana dan Prasarana Kawasan Industri Data Jaringan Air Bersih Data Saluran Drainase Data Jaringan Telekomunikasi Data Jaringan Listrik Data Pengelolaan Sampah Data Jaringan Jalan Data IPAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTRW Kabupaten Lamongan</li> <li>• Dokumen tentang Prasarana di Kabupaten Lamongan</li> <li>• Kabupaten Lamongan dalam Angka</li> <li>• Rispam Kabupaten Lamongan</li> <li>• Kabupaten Lamongan Dalam Angka</li> <li>• Observasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kabupaten Lamongan</li> <li>• Bina Marga Kabupaten Lamongan</li> <li>• BPS Kabupaten Lamongan</li> <li>• Bina Marga Provinsi Jawa Timur</li> <li>• Disperindag Provinsi Jawa Timur</li> </ul>	Survey Primer dan Sekunder
2.	Alur Kegiatan di Kawasan			Survey Primer

	Industri Maritim		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kabupaten Lamongan</li> <li>• Disperindag Kabupaten Lamongan</li> <li>• Disperindag Provinsi Jawa Timur</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan</li> <li>• BPS Kabupaten Lamongan</li> <li>• Bina Marga Provinsi Jawa Timur</li> </ul>	Dan Sekunder
	Alur kegiatan industri perkapalan			
	Alur kegiatan industri pertambangan dan energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen tentang kegiatan industri di Kabupaten Lamongan</li> </ul>		
	Alur kegiatan industri perikanan dan pengolahan			
	Alur industri transportasi laut dan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> </ul>		
3.	Data Industri Maritim		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kabupaten Lamongan</li> <li>• Disperindag Kabupaten Lamongan</li> <li>• Disperindag Provinsi Jawa Timur</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan</li> </ul>	Survey Primer dan Sekunder
	Data Industri Pertambangan dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen tentang kegiatan industri di Kabupaten Lamongan</li> </ul>		
	Data Industri Perikanan dan Pengolahan			
	Data Industri Transportasi Laut dan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> </ul>		
	Data Teknik dan Bangunan Lepas Pantai			
	Data Industri Perkapalan			

	Data Sumberdaya Maritim		<ul style="list-style-type: none"><li>• BPS Kabupaten Lamongan</li><li>• Bina Marga Provinsi Jawa Timur</li></ul>	
4.	Data investasi kawasan industri maritim	Dokumen tentang investasi industri	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan	Survey Sekunder

*Sumber: Penulis, 2017*

## Lampiran 2 Lembar Kode

### LEMBAR KODE/LIST OF CODE

Lembar kode merupakan kumpulan kode untuk menunjukkan suatu unit baik unit analisis ataupun unit data yang berfungsi untuk mempermudah memperoleh intisari dan penginterpretasian hasil wawancara.

#### Kode Stakeholders

Kode *stakeholders* menunjukkan *stakeholders*

Huruf	Angka	Warna	<i>Stakeholders</i>
G	1		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
G	2		Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Perekonomian
G	3		Bappeda Kabupaten Lamongan Bidang Fisik dan Prasarana
P	1		PT. Jakamitra

#### Kode Variabel Kondisi Kawasan Industri Maritim

Kode untuk menunjukkan variabel kondisi kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan

Angka	Warna	Variabel Kondisi Kawasan Industri Maritim (KODE: A)
1		Lahan
2		Jaringan Air Bersih
3		Saluran Drainase
4		Jaringan Telekomunikasi
5		Jaringan Listrik

6		Pengelolaan Sampah
7		Jaringan Transportasi
8		IPAL
9		Kesesuaian Tata Ruang
10		Ramah Lingkungan
11		Sumberdaya
12		Peran Pemerintah
13		Kelembagaan
14		Persaingan
15		Permintaan
16		Tingkat Keamanan
17		Tingkat Kenyamanan
18		Pelabuhan
19		Industri Pendukung

*Contoh:*

**A1** = menunjukkan penjelasan mengenai kondisi kawasan industri maritim terkait dengan lahan.

### **Lampiran 3 Pedoman Wawancara Sasaran 1 dan 2**

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya

Permasalahan dan Alur Kegiatan Industri Yang Ada di  
Kawasan Industri Maritim  
Estimasi Waktu 15 – 45 menit

Penelitian ini dilakukan untuk Merumuskan Arah  
Pengembangan Kawasan Industri Maritim di Wilayah Brondong  
– Paciran, Kabupaten Lamongan.

“KERAHASIAAN DATA YANG DIBERIKAN DAN IDENTITAS  
RESPONDEN DIJAMIN PENUH SESUAI DENGAN UNDANG  
– UNDANG STATISTIK YANG BERLAKU DI INDONESIA”

Mengidentifikasi Permasalahan dan Alur Kegiatan Industri  
Yang Ada di Kawasan Industri Maritim

**DATA RESPONDEN**

Nama: .....

Jabatan: .....

Bidang Keahlian: .....

No. Telp: .....

Alamat: .....

*Tujuan Interview:*

Mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan dan alur kegiatan industri yang ada di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan guna mempercepat pembangunan KEK Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan.

*Konten Interview:*

Persepsi Narasumber terhadap permasalahan dan alur kegiatan industri yang ada di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan.

*Latar Belakang Penelitian:*

Di dalam RTRW Nasional Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) dari tujuh kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan wilayah utara Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor industri maritim. Di Kabupaten Lamongan sendiri telah ada tiga perusahaan yang bergerak di sektor kemaritiman, yaitu *Lamongan Marine Industry* (LMI), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS). Keberadaan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan ini didukung oleh tiga pelabuhan besar di sekitar kawasan Industri Maritim, yakni Pelabuhan Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong, dan pelabuhan ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) Paciran. Namun pada kenyataannya dari 4.000 hektar lahan yang disediakan, baru 200 hektar yang akan dibangun atau hanya 5% dari lahan yang disediakan oleh pemerintah.

List Pertanyaan:

*“Selamat (pagi/siang/sore/malam), perkenalkan nama saya Gema Patria Mahaputra, mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan interview untuk mengetahui permasalahan apa saja dan kegiatan industri yang terdapat di kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan Guna Mempercepat Pembangunan KEK Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan. Informasi yang Bapak/Ibu Berikan akan sangat bermanfaat bagi penelitian saya”*

1. Apakah anda mengetahui mengenai kondisi terbaru kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan?
2. Menurut anda bagaimana kondisi sarana dan prasarana di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana kondisi jaringan air bersih di kawasan tersebut? Sejauh mana kondisi pelayanan jaringan air bersih di kawasan tersebut? Apakah sudah mencukupi untuk sebuah kawasan industri?
4. Bagaimana kondisi saluran drainase di kawasan tersebut? Apakah sudah layak untuk sebuah kawasan industri?
5. Bagaimana kondisi jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut? Sejauh mana kondisi pelayanan jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut? Apakah sudah mencukupi untuk sebuah kawasan industri?
6. Bagaimana kondisi jaringan listrik di kawasan tersebut? Sejauh mana kondisi pelayanan jaringan listrik di kawasan tersebut? Apakah sudah mencukupi untuk sebuah kawasan industri?
7. Bagaimana pengelolaan sampah di kawasan tersebut?
8. Bagaimana kondisi jaringan transportasi di kawasan tersebut? Sejauh mana kondisi pelayanan jaringan jalan di kawasan tersebut? Apakah sudah mencukupi untuk sebuah kawasan industri?

9. Apakah sudah tersedia IPAL di kawasan tersebut? Bagaimana kondisi dan pengelolaan IPAL tersebut?
10. Bagaimana dengan tingkat keamanan dan kenyamanan di kawasan tersebut?
11. Apakah anda mengetahui mengenai program – program yang sedang, akan, dan yang direncanakan terkait KEK Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan?
12. Apakah KEK Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan RTRW?
13. Bagaimana pengaruh kawasan tersebut dengan lingkungan di sekitarnya? Apakah ramah lingkungan?
14. Apa peran pemerintah dalam pengembangan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Lamongan?
15. Dari program yang sudah ada apa yang menjadi kendala dalam pembangunan KEK Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan?
16. Bagaimana dengan efisiensi dari pelaksanaan pembangunan kawasan tersebut?
17. Jika melihat dari kawasan industri maritim itu sendiri, bagaimana alur kegiatan yang terjadi di kawasan tersebut? Apakah terdapat permasalahan atau kendala?
18. Bagaimana alur kegiatan dan kondisi industri perkapalan yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan ini?
19. Bagaimana alur kegiatan dan kondisi industri perikanan dan pengolahan yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan ini?
20. Bagaimana alur kegiatan dan kondisi industri pertambangan dan energi yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan ini?
21. Bagaimana alur kegiatan dan kondisi industri transportasi laut dan perhubungan yang terdapat di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan ini?

22. Sumberdaya apa saja yang terdapat di Kabupaten Lamongan guna mendukung Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan?
23. Apakah sumberdaya yang ada di Kabupaten Lamongan sudah mencukupi untuk mendukung Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan?
24. Bagaimana kelembagaan yang terkait dalam pengembangan KEK Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan?
25. Adakah Kelembagaan khusus yang dibuat guna menunjang pengembangan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan?
26. Dalam Pengembangan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan pihak mana saja yang berpartisipasi?
27. Bagaimana proses pengembangan kawasan industri maritim disini?
28. Apakah minat dan permintaan akan investasi di Kawasan Industri Maritim Kabupaten Lamongan cukup tinggi dan mendukung dalam pengembangannya?
29. Apakah di Kabupaten Lamongan terdapat pelabuhan yang dapat menunjang kegiatan industri? bagaimana dengan kegiatan logistik dan ekspor-impor di kawasan tersebut?

## **Lampiran 4 Responden Content Analysis**

### **A. Responden 1 Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Responden 1 merupakan salah satu responden kelompok pemerintahan yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bidang yang dipilih adalah pengembangan industri yang memiliki tugas membina dan mengembangkan kawasan industri di Provinsi Jawa Timur. Responden ini juga dipilih karena dianggap memiliki pengaruh dalam perencanaan kawasan industri di Kabupaten Lamongan serta dianggap memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Biodata dari responden 1 yang telah diwawancarai terdapat pada lampiran

### **B. Responden 2 Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Lamongan**

Responden 2 merupakan salah satu responden kelompok pemerintahan yang berasal dari Bappeda Kabupaten Lamongan. Bidang yang dipilih adalah perekonomian yang memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana pembangunan di Bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Kepariwisata di Kabupaten Lamongan. Responden ini juga dipilih karena dianggap memiliki pengaruh dalam perencanaan kawasan industri di Kabupaten Lamongan serta dianggap memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Biodata dari responden 2 yang telah diwawancarai terdapat pada lampiran

### **C. Responden 3 Kasubid SDA dan LH Bappeda Kabupaten Lamongan**

Responden 3 merupakan salah satu responden kelompok pemerintahan yang berasal dari Bappeda Kabupaten Lamongan. Bidang yang dipilih adalah fisik dan prasarana yang memiliki tugas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana di Kabupaten Lamongan. Responden ini juga dipilih karena dianggap memiliki pengaruh dalam mempersiapkan prasarana penunjang kawasan industri di Kabupaten Lamongan serta dianggap memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Biodata dari responden 3 yang telah diwawancarai terdapat pada lampiran

#### **D. Responden 4 Staff Operasional PT. Jakamitra**

Responden 4 merupakan salah satu responden kelompok perusahaan yang berasal dari PT. Jakamitra. PT. Jakamitra sendiri merupakan perusahaan di bidang *industrial estate* yang merupakan bagian dari kawasan industri maritim sekaligus sebagai pengembang kawasan industri di Kabupaten Lamongan. Responden ini juga dipilih karena dianggap memiliki kepentingan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan serta dianggap memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti.

## Lampiran 5 Hasil Wawancara Sasaran 1

### Kode G1 (Governance 1)

#### P (Peneliti)

**Nama Responden** : Bu Ririn A.  
**Jabatan** : Kasie Pengembangan Wilayah  
**Instansi** : Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Jawa Timur  
**No. Telp** : 081334068539  
**Dokumentasi** :



P : selamat siang bu, saya gema patria dari mahasiswa its mau melakukan wawancara terkait kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, sebelumnya ibu mengetahui kondisi terbaru tentang kawasan industri maritim?

G1 : kalo kondisi terbaru memang saya hanya mendapatkan data tapi saya sementara ini belum pernah kesana, rencana bulan maret ini memang kita mau kunjungi, kemarin sih ada yang ke lamongan, saya suruh anak buah saya tapi memang disitu belum ada apa-apa

P : ooh.. belum ada apa-apa ya bu?

G1 : tapi kalo saya pribadi belum pernah kesana, tapi saya suruh staff saya untuk ke lamongan

P : terus menurut data yang ibu dapat itu konsidi sarana dan prasarana disana itu bagaimana untuk sebuah kawasan industri?

G1 : kalo dari sisi persyaratan besaran luas lahannya memenuhi syarat ya, secara lahan memang sudah sesuai dengan pp 142 tahun 2016 karena tersedia 4.000 ha tapi disitu kan kalo sarana dan prasarana misalnya listrik, energi, terus infrastruktur itu memang masih dalam proses perencanaan, ada beberapa yang belum direalisasikan, data yang disini masih sifatnya perencanaan semua

A1.1

P : berarti data sarana dan prasarana masih dalam bentuk perencanaan ya bu?

G1 : iyaa, investor atau tenant kan kalo mau disana kan harus siap semua

P : berarti kalau untuk data sarana dan prasana ibu hanya tau sebatas proses perencanaan ya bu?

G1 : iyaa

P : terus kalau untuk dokumen perencanaan apakah sudah sesuai?

G1 : kalau dokumen perencanaan disini kita tidak punya ya, kalo itu kan adanya di Bappeda Kabupaten atau Bappeda Provinsi, kalau disperindag ini terkait dengan industrinya/tenantnya yang ada di kawasan industrinya, selama dia belum punya kawasan industri ya belum bisa gerak apa-apa

P : terus kalau untuk kendala seperti itu apakah sudah ada program-program supaya ada industri di kawasan itu?

G1 : kalo tenant itu kan dari promosi pengelola kawasan, nah kalo belum ada kawasannya kan belum bisa promosi, kami hanya bisa mendorong kalau ada industri baru kita dorong kita

arahkan ke kawasan industri tersebut tetapi kawasannya harus siap dulu

A12.1

P : terus dari program tersebut apakah ada kendalanya bu?

G1 : jadi gini ya kawasan industri yang belum jadi, pengelola industri harus menyiapkan infrastrukturnya, itu memang dibebankan ke pengelola, selama ini belum memenuhi kita gabisa mendorong industri untuk masuk ke dalam kawasan. Kemaren kita hanya memfasilitasi mempertemukan para stakeholder seperti PLN, PDAM, dan lainnya kalau akan ada kawasan industri baru dan butuh dipersiapkan sarana dan prasarananya, Cuma kalo dari stakeholder-stakeholder tersebut gaada masalah ya tapi kadang-kadang ada kawasan indsutri yang belum seluruhnya membebaskan lahan, saya gatau kondisi di lamongan itu sudah dibebaskan semua atau belum. Kalau sudah dibebaskan itu tidak ada masalah, nah masalahnya itu kalau belum dibebaskan ya gabisa berbuat apa-apa orang masih atas nama siapa itu lahannya, kemaren informasinya apa kalo dari kabupaten? Sudah dibebaskan belum lahannya?

A1.2

P : kalo dari bappeda kemaren permasalahannya itu dari kelembagaannya bu

G1 : kelembagaan apa maksudnya?

P : kayak kelembagaan yang mengurus kawasan industri, seperti badan pengawas kawasan industri itu bu

G1 : ya itu pengelolanya PT. Jakamitra itu, nah yang dipermasalahkan itu apa? Pembebasan lahannya atau apa? Jadi PT. Jakamitra ini punya kewajiban 1. Membebaskan lahan 2. Membuatkan akses ke kawasan 3. Menyiapkan infrastruktur. Nah informasi bappeda pengelola ini yang gak jalan?

A7.1

A1.3

P : iya itu bu, tapi itu masih dari bidang fisik (bappeda) kan yang memegang bagian kawasan industri itu bidang ekonomi (bappeda) Cuma ibunya pas itu lagi buru-buru jadi belum sempet

G1 : Ooo... Mungkin PT. Jakamitra ini tidak segera, mungkin lahannya sudah ada tapi belum ngurus jadi masih berupa rencana aja mungkin yang dimaksud bappeda kabupaten seperti itu

A1.4

P : mungkin itu sih bu, nanti saya cek lagi

G1 : jadi yang punya kewajiban tadi itu ya PT. Jakamitra itu karena sebagai pengelola

P : ooo begitu ya bu. Kalau saya Tanya alur kegiatan industri apakah disini ada datanya bu atau bagaimana?

G1 : kalau alur kegiatan perkapalan ada di bidang non agro, kalau industri perikanan ada di bidang agro, kalau disini kawasannya

P : oooo begitu ya bu, berarti disini gaada data alur kegiatan industrinya ya bu

G1 : iyaa disana soalnya bidang teknis

P : berarti kesimpulannya menurut ibu permasalahannya itu apa bu untuk kawasan industri maritim?

G1 : saya cuma mendapatkan data seperti yang tadi saya sebutkan, saya tidak mengetahui progresnya. Progresnya itu apa setelah ini ada lagi, karena tidak ada laporan ke kita. Tahun 2016-2017 kemarin kita kirim staff kesana katanya masih belum ada apa-apa hanya hamparan tanah saja

A1.5

P : iya bu kemaren saya juga kesana masih belum ada apa-apanya

G1 : nah iya bener ya? Berarti permasalahannya masih belum ada progress pembangunan kawasan itu yang itu merupakan tanggungjawab dari PT. Jakamitra

P : kalau saya sambungkan dengan hasil yang saya dapat dari bappeda berarti permasalahannya ada di kelembagaannya yang tidak jalan ya bu

G1 : iyaa itu yang gak jalan jadinya tidak berprogres, terus apalagi?

**A13.1**

P : Iya sudah itu saja bu, terimakasih

G1 : iya samasama.

**Kode G2 (Governance 2)****P (Peneliti)**

**Nama Responden** : Bu Siti Sumiah  
**Jabatan** : Kasubid Perekonomian  
**Instansi** : Bappeda Kabupaten Lamongan  
**No. Telp** : 081357323295  
**Dokumentasi** :



P : selamat pagi bu siti, sebelumnya saya mau tanya dulu apakah ibu mengetahui kondisi terbaru dari kawasan industri maritim yang ada di Kabupaten Lamongan?

G2 : kondisi terbaru? Iya tau

P : itu bagaimana menurut ibu kondisi terbarunya?

G2 : kondisi terbaru untuk eksisting industri yang ada di Kabupaten Lamongan itu kan memang ada beberapa perusahaan yang bergerak dalam produknya itu terkait dengan kemaritiman. Ada yang dok kapal, ada yang pembuatan kapal, ya macam-macam lah pokoknya terkait dengan kemaritiman dan untuk sekarang masih memproduksi dan berkembang

P : terus kalau untuk proses pembangunan kawasan industri maritimnya itu sendiri gimana bu?

G2 : kawasan industrinya memang awal tahun 2017 kan dari Kabupaten Lamongan diundang kementerian kemaritiman terkait penetapan kawasan industri itu tapi kan ada beberapa persyaratan termasuk yang ada kelembagaan kemudian di tindaklanjuti kita sudah ada beberapa kali rapat koordinasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Ya itu kendalanya ya di pembentukan kelembagaannya yang sampe sekarang itu belum terbentuk

A9.1

A13.1

P : ooo begitu bu, kan saya dapat informasi dari Disperindag Prov. Jatim bu, itu yang mengelola yang membangun itu dari PT. Jakamitra, itu selaku kelembagaannya atau selaku developer yang membangun itu bu?

G2 : bukan. PT. Jakamitra itu bukan selaku kelembagaannya tapi dia itu sebagai perusahaan yang membangun kawasan industri penunjang di kawasan industri maritim, tapi kan sekarang masih berupa lahan

A13.3

A19.1

A1.1

P : oooo berarti sebagai developernya bu?

G2 : iyaa, tapi kan untuk kelembagaannya masih belum ada kesepakatan siapa yang menjadi lembaganya

A13.4

P : oooo begitu bu. Terus kalau dari sisi sarana prasarannya sendiri bu di pantura bagaimana, seperti jaringan air bersihnya bu disana bagaimana?

G2 : sementara ini ya sudah cukupya kalau untuk jaringan air bersihnya, tapi nanti kalo kawasan tersebut sudah beroperasi ya masih kurang. Kalau sekarang ya air bersih, listriknya ya sudah cukup

A2.1

A5.1

P : berarti kalau untuk sekarang itu air bersih sama listriknya sudah tercukupi ya bu. Kalau drainase dan jaringan telekomunikasinya bu?

G2 : kalo selama ini gaada laporan permasalahan terkait itu ya

A3.1

A4.1

P : gaada laporan permasalahan ya bu, terus kalau pengelolaan sampahnya bu?

G2 : pengelolaan sampah... ini aja ya kalo terkait kayak gitu sampean ke bagian fisik aja biar lebih jelas soalnya datanya disana semua kalo tentang prasarana, nanti kalau saya takutnya kurang pas jawabnya

A6.1

P : hoo... kalau tentang permintaan industri di kawasan tersebut bagaimana bu? Apakah minat investasinya tinggi?

G2 : kalau untuk industri terkait maritim yang ada di kawasan tersebut sudah ada beberapa ya seperti PT. Dok Perkapalan, LIS sama ada beberapa industri lain. Tapi kalau mau lebih lengkapnya lagi bisa di cek ke dinas penanaman modal

A15.1

P : ooh... begitu ya bu, kalau untuk sumberdaya terkait kemaritiman bu bagaimana kondisinya di Kabupaten Lamongan?

G2 : kalau untuk sumberdaya kemaritiman ya, di Kabupaten Lamongan ini terutama di pantura kan ada TPI sedayulawas yang hasil tangkapannya itu biasa digunakan untuk bahan baku industri-industri pengolahan ikan. Kita juga ada pertambangan minyak dan gas bumi juga ada pertambangan bukan logam dan batuan di pantura.

A11.1

A11.2

P : kalau untuk sumberdaya manusianya sendiri bagaimana bu?

G2 : untuk sumberdaya manusianya, jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan ini cukup apabila nanti diserap oleh industri-industri yang ada di kawasan industri maritim ditambah lagi adanya pelatihan terkait industri jadi sangat menunjang kalo nantinya kawasan itu sudah ada.

A11.3

P : ooo... begitu ya bu. Kalau upaya yang dilakukan pemerintah itu apa saja bu dalam pengembangan kawasan industri maritim?

G2 : ini kemaren tahun 2017 kita melakukan koordinasi-koordinasi terkait dengan rencana pembentukan kawasan itu, sampai terakhir kita melaksanakan FGD intinya mereka setuju. Industri-industri di wilayah pantura itu setuju kalau dibentuk kawasan itu karena kan ada beberapa fasilitas kalau sudah terbentuk kawasans

A12.1

A12.2

P : seperti apa itu bu fasilitasnya?

G2 : ya seperti pemberian insentif pajak, eh... tapi ini insentif pajak hanya untuk industri di luar Pulau Jawa. Ya dipermudah perijinannya mungkin ya, nanti coba sampean baca sendiri disini

P : ooo... iya bu makasih

### Kode G3 (Governance 3)

#### P (Peneliti)

**Nama Responden** : Pak M. Amada Kurniawan  
**Jabatan** : Kasubid SDA dan LH  
**Instansi** : Bappeda Kabupaten Lamongan  
**No. Telp** : 085230888691  
**Dokumentasi** :



P : Selamat siang pak, dengan bapak siapa ini?

G3 : Siang mas, Amada mas

P : Sebelumnya ini saya mau tanya terkait kawasan industri maritim, kan isunya bakal dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus, nah itu apakah anda mengetahui tentang kondisi terbaru kawasan industri maritim tersebut pak?

G3 : Ya kemaren industri maritim kan sudah dirapatkan ya, intinya di Kabupaten Lamongan ini sudah ada beberapa industri maritim yang siap untuk diarahkan menjadi kawasan industri maritim, seperti itu hasilnya yang dirapatkan

A12.1

A15.1

P : Industri apa aja itu pak?

G3 : industri galangan perkapalan, dok perkapalan sama fibrikasi perkapalan

P : kalau industri pendukungnya pak bagaimana?

G3 : kalau industri pendukungnya, sudah ada perusahaan yang ingin membuka kawasan untuk menunjang kawasan industri maritim disana.

A19.1

P : terus kalau untuk kondisi sarana dan prasarana disana apakah sudah layak untuk dijadikan layak sebagai kawasan industri?

G3 : kalau kita dibilang layak, kita katakan belum karena masih ada beberapa daerah permukiman kalau itu dijadikan kawasan industri itu harus memindahkan daerah permukiman tersebut baru bisa menyatu menjadi kawasan industri

A1.1

P : berarti kalau saya jabarkan lagi untuk sarana dan prasarannya seperti jaringan air bersihnya bagaimana pak?

G3 : kalau jaringan air bersih, Kabupaten Lamongan itu siap bila nanti itu betul-betul dilaksanakan untuk kawasan maritim sudah dieprsiapkan untuk jaringan air bersihnya, tinggal menyambungkan, nah penyambungannya itu yang dibebankan kepada industri-industri tersebut

A2.1

P : berarti untuk pelayanannya sudah mencukupi itu pak?

G3 : sudah dipersiapkan tapi belum dialokasikan kesana, tinggal menunggu permintaan dari industri-industri tersebut

A2.2

P : berarti kalau jaringan air bersihnya sudah disiapkan, terus untuk jaringan drainasenya pak?

G3 : jaringan drainasenya sudah, sudah tidak ada masalah

A3.1

P : terus untuk jaringan telekomunikasinya?

G3 : oh sudah gak masalah karena disana sudah ada beberapa menara yang siap, sudah ada beberapa menara

A4.1

telekomunikasi di daerah wilayah sana yang sudah beroperasi, sudah mendapatkan ijin

P : oh sudah ada beberapa menara yang sudah mendapatkan ijin ya pak? Kalau untuk jaringan listriknya?

G3 : itu juga, karena disana berdekatan dengan gardu induk

A5.1

P : gardu induk ya pak? Untuk pengelolaan sampahnya sendiri pak bagaimana pak? Limbahnya?

G3 : pengelolaan sampahnya, sampah domestik itu sudah dipersiapkan TPA dimana nanti setiap perusahaan harus mempunyai TPS sendiri dan sarana pengangkut untuk dibawa ke TPA. Dipersiapkan sarana TPA disana sekitar 5-10 km jaraknya dari lokasi. Untuk limbah B3nya kita persyaratkan bagi mereka untuk bekerjasama dengan perusahaan pengelola limbah B3

A6.1

A6.2

A8.1

P : itu berarti sudah termasuk dengan IPALnya pak?

G3 : IPALnya otomatis, kan diwajibkan juga

A8.2

P : terus untuk kondisi jaringan jalannya sendiri itu pak bagaimana?

G3 : jaringan jalan, jalannya jalan nasional kolektor primer, sudah siap

A7.1

P : terus kalau untuk tingkat keamanan dan kenyamanannya sendiri pak bagaimana untuk kawasan industri?

G3 : karena disana peruntukannya memang untuk kawasan industri, jadi secara keamanannya sudah terjamin karena memang lokasinya memang kita sediakan untuk kawasan industri, kalau kenyamanannya juga mungkin mengikuti ya

A9.1

A16.1

A17.1

P : terus bapak tau tentang program-program yang sedang atau akan direncanakan terkait kawasan tersebut pak?

G3 : untuk program kawasan tersebut yang jelas kemarin kita merapatkan itu ya, hasilnya adalah bahwasannya sudah dipersiapkan untuk atau diberikan wadah untuk membuat kawasan industri tapi belum tentu industri-industri tersebut bisa bergabung dalam satu menjadi kawasan industri maritim, programnya seperti itu, jadi sudah ada wadah tapi belum tentu mau menjadi kawasan industri maritim. Kita sudah memfasilitasi mereka untuk menjadi sebuah kawasan industri

A12.2

A12.3

P : terus kawasan industri maritim itu sendiri apakah sudah sesuai dengan RTRW pak?

G3 : sudah sesuai lah (RTRW)

A9.2

P : terus kalau pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar?

G3 : kalau pengaruh terhadap lingkungan sekitar, yang jelas dengan adanya kawasan itu dikhawatirkan nantinya itu para nelayan, kan tentunya akan ada reklamasi, akan adanya pembangunan terminal khusus, itu yang dikhawatirkan nanti nelayan tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal

A10.1

P : terus untuk kendalanya sendiri pak bagaimana?

G3 : seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa mereka belum tentu mau bergabung menjadi satu kawasan karena mungkin mereka bisa bermitra atau mereka juga kadang menjadi persaingan atau kompetitor sehingga tidak mau menjadi satu kawasan

A14.1

P : kalau misalnya diantara satu industri dengan industri lain saling berhubungan? Seperti bahan bakunya, apakah bukannya makin menjanjikan?

G3 : ada yang seperti itu, seperti tadi saya bilang kan ada yang sebagai mitra dan mungkin ada yang sebagai pesaing

P : untuk kawasan industri ini berarti memiliki kelembagaan khusus pak?

G3 : saya rasa masih belum (kelembagaan)

A13.1

P : berarti itu salah satu kendalanya pak?

G3 : iya salah satu kendalanya

A13.2

P : dalam pengembangannya ini, pihak mana saja yang terlibat?

G3 : waduh saya lupa yang punya data di bidang perekonomian, ya masuk disperindag bappeda ya gitu-gitu lah

P : oh gitu ya pak, di bidang perekonomian. Kalau gitu sekian dulu pak terimakasih atas informasi dan waktunya

G3 : oh sudah? Iya sama-sama.

P : selamat pagi pak, saya ingin menanyakan pak, apakah di Kabupaten Lamongan ada pelabuhan yang menunjang kawasan industri maritim pak?

G3 : Kabupaten Lamongan memiliki beberapa pelabuhan diantaranya ada pelabuhan ASDP paciran, pelabuhan perikanan nusantara di brondong dan pelabuhan khusus barang di LIS yang sudah digunakan

A18.1

P : kalau kegiatan ekspor-impor apakah sudah bisa dilakukan di Pelabuhan LIS pak?

G3 : kalau ekspor-impor masih di pelabuhan tanjung perak karena masih belum ada bea cukai di pelabuhan LIS

A18.2

P : oooo... begitu ya pak. Terimakasih atas informasinya...

## Kode P1 (*Private Sector 1*)

### P (Peneliti)

**Nama Responden** : Iwan Sugih Arto  
**Jabatan** : Staff Operasional  
**Instansi** : PT. Jakamitra  
**No. Telp** : 082131200201

P : Selamat siang pak iwan, saya gema mahasiswa ITS yang sedang melakukan penelitian tugas akhir terkait kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, apakah bapak ada waktu luang untuk wawancara?

P1 : Selamat siang mas, iya silahkan

P : baik pak, apakah anda mengetahui tentang kondisi terbaru dari kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan?

P1 : kawasan industri lamongan sampai saat ini belum berdiri sama sekali, kami masih tahap beli-beli tanah saja dan belum ada aktivitas apapun jadi belum ada yang bisa di collect datanya.

A1.1

P : kalau boleh tau kendalanya apa ya pak dalam realisasi kawasan tersebut?

P1 : prinsip dasar harus punya tanah yang utuh dalam suatu hamparan minimal 50 ha. Tanah kami belum utuh, masih ada yang belum terbeli di dalam hamparan tersebut sehingga belum bisa dibangun karena masih ada tanah milik orang di tengah-tengah tanah kami, jadi kami masih fokus membebaskan tanah

A1.2

P : jadi permasalahannya di pembebasan lahan ya pak?

P1 : iya pembebasan lahan

A1.3

P : kalau untuk prasarana penunjang kawasan industri di Kabupaten Lamongan apakah sudah layak dan tidak ada masalah pak untuk sebuah kawasan industri?

P1 : untuk prasarananya sudah memadai tapi ada yang perlu ditingkatkan seperti pelebaran akses jalan dan ketersediaan air bersih

A7.1

A2.1

P : harus ditingkatkan ya pak untuk pelebaran akses jalan dan ketersediaan air bersih

P1 : iya. Sudah dulu ya mas, cuma itu yang bisa saya share

P : baik pak terimakasih

P1 : iya sama-sama

P : Selamat pagi pak iwan, saya ingin menanyakan terkait pelabuhan di Kabupaten Lamongan pak. Apakah Kabupaten Lamongan sudah ada pelabuhan khusus barang pak? selama ini proses logistik industri di Lamongan melalui pelabuhan mana pak?

P1 :Selamat pagi juga. Sudah ada pelabuhan khusus barang, namanya pelabuhan LIS yang berada di Paciran.

A18.1

## Lampiran 6 Kuisisioner Wawancara Delphi

Assalamualaikum wr.wb

Kuisisioner wawancara ini merupakan bagian dari penelitian tugas akhir “Arahan Pengembangan Kawasan Industri Maritim di Wilayah Brondong – Paciran, Kabupaten Lamongan”. Penulis mengucapkan terimakasih atas kesediaan Anda berpartisipasi dalam wawancara kuisisioner ini.

### DATA RESPONDEN

Nama : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

Bidang Keahlian : .....

No. Telp : .....

Alamat : .....

Petunjuk pengisian:

Beri penilaian (ya/tidak) dengan memberikan tanda checklist (√) pada pilihan Anda atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada kolom variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendorong pengembangan kawasan industri serta berilah alasan secara singkat dan jelas pada kolom alasan. Bila ruang yang disediakan kurang, tulislah pada lembaran kosong di balik kuisisioner dan beri nomor jawaban yang dijawab.

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
1	Lahan			
2	Jaringan Air Bersih			
3	Saluran Drainase			
4	Jaringan Telekomunikasi			
5	Jaringan Listrik			
6	Pengelolaan Sampah			
7	Jaringan Transportasi			
8	IPAL			
9	Kesesuaian Tata Ruang			
10	Ramah Lingkungan			
11	Efisiensi			
12	Tingkat Kenyamanan			
13	Tingkat Keamanan			
14	Sumberdaya			

15	Permintaan			
16	Persaingan			
17	Peran Pemerintah			
18	Kelembagaan			
19	Industri Pendukung			
Tambahkan Variabel Lain				

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## Lampiran 7 Hasil Wawancara Delphi Tahap I

### DATA RESPONDEN 1

Nama : Bu Ririn A.  
 Jabatan : Kasie Pengembangan Wilayah  
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 081334068539  
 Alamat : Siwalankerto Utara II/42 Surabaya

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan	Rekomendasi Solusi
		Ya	Tidak		
1	Lahan	√		Dalam pembangunan kawasan industri harus memiliki lahan minimal seluas 50 ha sebagai persyaratan pembangunan kawasan industri berdasarkan PP no. 142 tahun 2016.	Memberikan fasilitas dalam hal sosialisasi dan pembebasan lahan. Menggandeng dari pihak BPN sebagai penengah dengan pemilik lahan

2	Jaringan Air Bersih	√		Merupakan pendukung kawasan industri	Membuat pengelolaan air bersih secara mandiri
3	Saluran Drainase	√		Merupakan pendukung kawasan industri	-
4	Jaringan Telekomunikasi	√		Merupakan pendukung kawasan industri	-
5	Jaringan Listrik	√		Merupakan pendukung kawasan industri	-
6	Pengelolaan Sampah	√		Merupakan pendukung kawasan industri	-
7	Jaringan Transportasi	√		Merupakan pendukung kawasan industri	Pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan dengan rencana jalan tol Lamongan
8	IPAL	√		Merupakan pendukung kawasan industri. Sarana pembuangan limbah terintegrasi.	-

9	Kesesuaian Tata Ruang	√		Pembangunan sebuah kawasan industri harus memperhatikan RTRW kabupaten/ provinsi	-
10	Ramah Lingkungan	√		Sebuah kawasan industri tidak boleh merusak lingkungan disekitarnya.	-
11	Efisiensi	√		Tingkat efisiensi kawasan industri sangat mempengaruhi perkembangan kawasan tersebut	-
12	Tingkat Kenyamanan	√		Merupakan salah satu bagian dari K3S	-
13	Tingkat Keamanan	√		Sebuah kawasan industri harus aman dari pencuri, kerusakan dan lain sebagainya	-
14	Sumberdaya	√		Sebagai pendukung sebuah kawasan industri	-
15	Permintaan	√		Semakin tinggi permintaan akan kawasan industri maka peluang untuk membentuk sebuah kawasan industri akan semakin tinggi	-

16	Persaingan	√		Persaingan antar industri juga merupakan faktor terbentuknya sebuah kawasan industri	-
17	Peran Pemerintah	√		Peran pemerintah seperti pemberian ijin dan kemudahan untuk berinvestasi di kawasan industri	-
18	Kelembagaan	√		Sebuah kawasan industri perlu memiliki lembaga	Bisa berasal dari pihak pengembang dan didukung dengan pihak pemerintah
19	Industri Pendukung	√		Mempercepat dan memperlancar kegiatan industri utama di kawasan industri	Membangun industri pendukung disekitar kawasan industri inti
Tambahkan Variabel Lain				Kebijakan terkait UMR buruh	-

**DATA RESPONDEN 2**

Nama : Bu Siti Sumiah  
 Jabatan : Kasubid Perekonomian  
 Instansi : Bappeda Kabupaten Lamongan  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 081357323295  
 Alamat : Perum Sandya B12 Lamongan

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan	Rekomendasi Solusi
		Ya	Tidak		
1	Lahan	√		Merupakan persyaratan wajib sebuah kawasan industri.	Menggandeng tokoh masyarakat sebagai penengah antara pengembang dengan pemilik lahan
2	Jaringan Air Bersih	√		Prasarana pendukung kawasan industri	Bekerjasama dengan instansi penyedia air bersih

					untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri
3	Saluran Drainase	√		Prasarana pendukung kawasan industri	-
4	Jaringan Telekomunikasi	√		Prasarana pendukung kawasan industri	-
5	Jaringan Listrik	√		Prasarana pendukung kawasan industri	-
6	Pengelolaan Sampah	√		Prasarana pendukung kawasan industri	-
7	Jaringan Transportasi	√		Prasarana pendukung kawasan industri	Memperlebar akses jalan menuju kawasan industri
8	IPAL	√		Prasarana pendukung kawasan industri	-
9	Kesesuaian Tata Ruang	√		Sebuah kawasan industri harus sesuai dengan RTRW	-
10	Ramah Lingkungan	√		Tidak boleh merusak lingkungan	-

11	Efisiensi	√		Sebuah pembangunan kawasan industri haruslah efisien dalam berbagai hal	-
12	Tingkat Kenyamanan	√		Sebuah kawasan industri harus nyaman bagi para pelaku industri agar terus berjalan.	-
13	Tingkat Keamanan	√		Untuk meminimalisir penghambatan pengembangan kawasan industri	-
14	Sumberdaya	√		Semakin dekat kawasan industri dengan sumberdaya akan semakin baik dan akan cepat berkembang	-
15	Permintaan	√		Tingginya permintaan akan berpengaruh terhadap prioritas pengembangan kawasan industri tersebut	-

16	Persaingan	√		Salah satu faktor terbentuknya kawasan industri	-
17	Peran Pemerintah	√		Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna mengembangkan kawasan industri	-
18	Kelembagaan	√		Salah satu persyaratan utama dalam pembentukan kawasan industri	Membentuk kelembagaan pengelola kawasan industri yang bisa berasal dari pengembang/investor
19	Industri Pendukung	√		Pendukung kegiatan industri utama di kawasan industri	Menyediakan kawasan industri pendukung di sekitar/ di dalam kawasan industri maritim
Tambahkan Variabel Lain				-	-

**DATA RESPONDEN 3**

Nama : Pak M. Amada Kurniawan  
 Jabatan : Kasubid SDA dan LH  
 Instansi : Bappeda Kabupaten Lamongan  
 Bidang Keahlian : Planologi  
 No. Telp : 085230888691  
 Alamat : Jl. Raya Bedaan No. 26 Babat, Lamongan

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan	Rekomendasi Solusi
		Ya	Tidak		
1	Lahan	√		Merupakan persyaratan wajib sebuah kawasan industri.	Memprioritaskan pembangunan di lahan yang sudah dibebaskan terlebih dahulu
2	Jaringan Air Bersih	√		Prasarana penunjang	Membuat pengelolaan air bersih secara mandiri dan terpadu

3	Saluran Drainase	√		Prasarana penunjang	-
4	Jaringan Telekomunikasi	√		Prasarana penunjang	-
5	Jaringan Listrik	√		Prasarana penunjang	-
6	Pengelolaan Sampah	√		Prasarana penunjang	-
7	Jaringan Transportasi	√		Prasarana penunjang	Mengadakan proses bea cukai di Kabupaten Lamongan agar proses distribusi lebih optimal
8	IPAL	√		Prasarana penunjang	-
9	Kesesuaian Tata Ruang	√		Harus sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007	-
10	Ramah Lingkungan	√		Untuk menjaga kelestarian lingkungan	-

11	Efisiensi	√		Sebuah kawasan industri harus efisien guna memperlancar kegiatannya	-
12	Tingkat Kenyamanan	√		Faktor pendukung	-
13	Tingkat Keamanan	√		Faktor pendukung	-
14	Sumberdaya	√		Pendukung kegiatan industri	-
15	Permintaan	√		Pendorong terbentuknya kawasan industri	-
16	Persaingan	√		Pendorong terbentuknya kawasan industri	-
17	Peran Pemerintah	√		Sebagai pendukung pengembangan kawasan industri	-
18	Kelembagaan	√		Hal yang wajib dimiliki oleh kawasan industri	Pembentukan kelembagaan kawasan industri biasanya berasal dari pihak pengembang

19	Industri Pendukung	√		Merupakan bagian dari kawasan industri	Membuat kluster khusus industri pendukung kawasan industri maritim
Tambahkan Variabel Lain				-	-

**DATA RESPONDEN 4**

Nama : Pak Iwan Sugiharto  
 Jabatan : Staff Operasional  
 Instansi : PT. Jakamitra Indonesia  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 082131 200 201  
 Alamat : Sidoarjo

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan	Rekomendasi Solusi
		Ya	Tidak		
1	Lahan	√		Pembangunan sebuah kawasan industri harus memiliki lahan yang utuh dalam suatu hamparan minimal 50 ha	Melakukan pendekatan dengan pemilik lahan secara intens
2	Jaringan Bersih Air	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan kebutuhan

				pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	air bersih kawasan industri
3	Saluran Drainase	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	-
4	Jaringan Telekomunikasi	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	-
5	Jaringan Listrik	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	-
6	Pengelolaan Sampah	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	-

7	Jaringan Transportasi	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam proses pelebaran jalan nasional yang melewati kawasan industri maritim
8	IPAL	√		Tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan utama dan menjadi 'trigger' dalam pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan industri.	-
9	Kesesuaian Tata Ruang	√		Agar pembangunannya tidak terhambat dan dipermudah dalam perijinannya	-
10	Ramah Lingkungan	√		Agar tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitar kawasan industri yang dapat merugikan kawasan industri tersebut	-
11	Efisiensi	√		Semakin efisien sebuah kawasan akan semakin baik terhadap pelaku industri	-
12	Tingkat Kenyamanan	√		Mempengaruhi sebuah kawasan terhadap investor	-

13	Tingkat Keamanan	√		Mempengaruhi sebuah kawasan terhadap investor	-
14	Sumberdaya	√		Jika lokasi dekat dengan sumberdaya maka akan banyak investor yang berminat pada kawasan industri tersebut	-
15	Permintaan	√		Jika peminat industri tinggi maka investor akan memprioritaskan pengembangan di kawasan tersebut sehingga dapat memacu pertumbuhan kawasan industri	-
16	Persaingan	√		Sebagai pelaku industri dengan adanya persaingan maka akan memacu para industri untuk mengembangkan industrinya menjadi yang lebih baik dari industri lainnya	-
17	Peran Pemerintah	√		Sebagai stakeholder terdepan dalam penyediaan kebijakan, peraturan, infrastruktur, dan fasilitator. Dengan dukungan secara penuh maka pengembangan dan pembangunan kawasan industri akan lebih memudahkan investor untuk mewujudkannya.	-

18	Kelembagaan	√		Sebuah kawasan industri harus memiliki kelembagaan yang bertanggungjawab dan mengurus permasalahan dan kegiatan yang ada di kawasan industri tersebut	Kelembagaan biasanya berasal dari pihak pengembang kawasan industri
19	Industri Pendukung	√		Dapat mengurangi biaya transportasi apabila lokasi kawasan berdekatan dengan industri pendukungnya sehingga mengoptimalkan kegiatan industri di dalamnya	Menyediakan kawasan untuk industri pendukung di dekat atau di dalam kawasan industri maritim
Tambahkan Variabel Lain				-	-

## Lampiran 7 Hasil Wawancara Delphi Tahap II

### DATA RESPONDEN 1

Nama : Bu Ririn A.  
 Jabatan : Kasie Pengembangan Wilayah  
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Jawa Timur  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 081334068539  
 Alamat : Siwalankerto Utara II/42 Surabaya

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan terkait UMR buruh		√	Sudah termasuk ke dalam variabel peran pemerintah sehingga tidak perlu membuat variabel baru

**DATA RESPONDEN 2**

Nama : Bu Siti Sumiah  
 Jabatan : Kasubid Perekonomian  
 Instansi : Bappeda Kabupaten Lamongan  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 081357323295  
 Alamat : Perum Sandya B12 Lamongan

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan terkait UMR buruh		√	Merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengatur terkait kebijakan, dan sudah terdapat variabel peran pemerintah sebelumnya

**DATA RESPONDEN 3**

Nama : Pak M. Amada Kurniawan  
 Jabatan : Kasubid SDA dan LH  
 Instansi : Bappeda Kabupaten Lamongan  
 Bidang Keahlian : Planologi  
 No. Telp : 085230888691  
 Alamat : Jl. Raya Bedaan No. 26 Babat, Lamongan

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan terkait UMR buruh		√	Tidak perlu menambah variabel yang sejenis

**DATA RESPONDEN 4**

Nama : Pak Iwan Sugiharto  
 Jabatan : Staff Operasional  
 Instansi : PT. Jakamitra Indonesia  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 082131 200 201  
 Alamat : Sidoarjo

Apakah variabel-variabel dibawah ini merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan industri?

No.	Variabel	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan terkait UMR buruh		√	Merupakan tugas pemerintah sebagai stakeholder terdepan, sudah terdapat dalam variabel peran pemerintah

## **Lampiran 8 Kuisisioner Wawancara Delphi Arahan Pengembangan**

Assalamualaikum wr.wb

Kuesioner wawancara ini merupakan bagian dari penelitian tugas akhir “Arahan Pengembangan Kawasan Industri Maritim di Wilayah Brondong – Paciran, Kabupaten Lamongan”. Penulis mengucapkan terimakasih atas kesediaan Anda berpartisipasi dalam wawancara kuesioner ini.

### **DATA RESPONDEN**

Nama : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

Bidang Keahlian : .....

No. Telp : .....

Alamat : .....

Petunjuk pengisian:

Beri penilaian (Setuju/Tidak Setuju) dengan memberikan tanda checklist (√) pada pilihan Anda atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada kolom arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan serta berilah alasan secara singkat dan jelas pada kolom alasan. Bila ruang yang disediakan kurang, tulishlah pada lembaran kosong di balik kuesioner dan beri nomor jawaban yang dijawab.

Berikut adalah arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti

No.	Permasalahan	Arahan Pengembangan	Jawaban		Alasan
			Setuju	Tidak Setuju	
1	Pembebasan Lahan	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan			
2		Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut			
3		Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap			

4		Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan			
5	Jaringan Air Bersih	Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih			
6	Jaringan Transportasi	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah daerah terutama dari Kabupaten Lamongan menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik			
7		Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi			

		dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak			
8		Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)			
9	Industri Penunjang	Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim			
10	Kelembagaan	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut			

## Lampiran 9 Hasil Wawancara Delphi Arahan Pengembangan

### DATA RESPONDEN 1

Nama : Bu Ririn A.  
 Jabatan : Kasie Pengembangan Wilayah  
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 081334068539  
 Alamat : Siwalankerto Utara II/42 Surabaya

Berikut adalah arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti

No.	Permasalahan	Arahan Pengembangan	Jawaban		Alasan
			Setuju	Tidak Setuju	
1	Pembebasan Lahan	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan	√		Agar dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan
2		Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut	√		Agar masyarakat mengetahui akan rencana pengembangan kawasan industri di daerah tersebut yang

				telah ditetapkan oleh pemerintah
3		Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap	√	Agar tidak membebani satu pengembang
4	Jaringan Air Bersih	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan	√	Agar pemerintah dapat mengalirkan air yang telah disediakan
5		Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	√	Untuk mendukung pasokan air yang diberikan pemerintah daerah
6	Jaringan Transportasi	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah daerah terutama dari Kabupaten Lamongan menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik	√	Memperlancar kegiatan pengiriman barang ke Pelabuhan Tanjung Perak dan daerah sekitarnya

7		Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak	√		Untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak
8		Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)	√		Untuk menunjang kegiatan pengiriman dari/ke kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan
9	Industri Penunjang	Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim	√		Mengoptimalkan kegiatan industri di dalam kawasan tersebut
10	Kelembagaan	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut	√		Kelembagaan biasanya berasal dari pihak pengembang kawasan industri

**DATA RESPONDEN 2**

Nama : Bu Siti Sumiah  
 Jabatan : Kasubid Perekonomian  
 Instansi : Bappeda Kabupaten Lamongan  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 081357323295  
 Alamat : Perum Sandya B12 Lamongan

Berikut adalah arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti

No.	Permasalahan	Arahan Pengembangan	Jawaban		Alasan
			Setuju	Tidak Setuju	
1	Pembebasan Lahan	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan	√		Untuk menengahi pembebasan lahan dengan masyarakat
2		Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut	√		Agar masyarakat mengerti akan rencana pengembangan kawasan industri maritim disana
3		Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat	√		Untuk mempercepat pembebasan lahan dan

		diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap			pengembangan kawasan industri
4	Jaringan Air Bersih	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan	√		Supaya air yang sudah dipersiapkan pemerintah dapat disalurkan ke kawasan industri
5		Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	√		Untuk mendukung pasokan air bersih yang diberikan pemerintah sehingga kebutuhan air bersih industri dapat terpenuhi semua
6	Jaringan Transportasi	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah daerah terutama dari Kabupaten Lamongan menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik	√		Untuk menunjang kegiatan pengiriman barang dari luar Kabupaten Lamongan
7		Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat	√		Agar tidak mengantri dan terjadi penumpukan di Pelabuhan Tanjung Perak

		dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak			
8		Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)	√		Untuk jalur distribusi barang
9	Industri Penunjang	Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim	√		Agar kawasan industri di Kabupaten Lamongan bisa optimal
10	Kelembagaan	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut	√		Untuk memenuhi persyaratan pembangunan kawasan industri

**DATA RESPONDEN 3**

Nama : Pak M. Amada Kurniawan  
 Jabatan : Kasubid SDA dan LH  
 Instansi : Bappeda Kabupaten Lamongan  
 Bidang Keahlian : Planologi  
 No. Telp : 085230888691  
 Alamat : Jl. Raya Bedaan No. 26 Babat, Lamongan

Berikut adalah arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti

No.	Permasalahan	Arahan Pengembangan	Jawaban		Alasan
			Setuju	Tidak Setuju	
1	Pembebasan Lahan	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan	√		Sebagai upaya pembebasan lahan dengan warga
2		Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut	√		Agar masyarakat mengerti tentang rencana pembangunan kawasan industri di wilayah Brondong-paciran
3		Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim,	√		Agar proses pembangunan dapat

		pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap			dilakukan dengan bertahap sehingga tidak terhenti pembangunannya
4	Jaringan Air Bersih	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan	√		Supaya kebutuhan air bersih di kawasan industri dapat terpenuhi
5		Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	√		Untuk menunjang kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri yang jumlahnya besar
6	Jaringan Transportasi	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah daerah terutama dari Kabupaten Lamongan menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik	√		Untuk menunjang kegiatan pengiriman barang dari luar Kabupaten Lamongan
7		Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat	√		Agar tidak mengantri dan terjadi penumpukan di Pelabuhan Tanjung Perak

		dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak			
8		Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)	√		Terlalu susah dan harus melibatkan instansi lain yang belum tentu mau untuk Pelabuhan LIS
9	Industri Penunjang	Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim	√		Agar kawasan industri di Kabupaten Lamongan bisa optimal
10	Kelembagaan	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut	√		Untuk memenuhi persyaratan pembangunan kawasan industri

Nama : Pak Iwan Sugiharto  
 Jabatan : Staff Operasional  
 Instansi : PT. Jakamitra Indonesia  
 Bidang Keahlian : -  
 No. Telp : 082131 200 201  
 Alamat : Sidoarjo

Berikut adalah arahan pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti

No.	Permasalahan	Arahan Pengembangan	Jawaban		Alasan
			Setuju	Tidak Setuju	
1	Pembebasan Lahan	Menggandeng tokoh masyarakat dan BPN sebagai penengah antara warga dengan pengembang kawasan dalam membebaskan lahan	√		Supaya bisa melakukan pendekatan dengan intens
2		Melakukan FGD/penyuluhan dengan masyarakat sekitar terkait pengembangan kawasan industri maritim di daerah tersebut	√		Agar masyarakat paham terkait kawasan industri maritim
3		Dari 4.000 Ha lahan yang direncanakan sebagai KEK kawasan industri maritim, pembangunan kawasan industri dapat diprioritaskan pada lahan yang sudah siap terlebih dahulu dengan membuat beberapa	√		Untuk mmfokuskan pembangunan kawasan industri

		klaster kawasan industri sehingga pembangunan kawasan industri dapat dilakukan secara bertahap			
4	Jaringan Air Bersih	Bekerjasama dengan pihak jasa tirta dalam pemenuhan air bersih kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan	√		Sebagai pendistribusi air bersih
5		Pembangunan WTP ( <i>water treatment plant</i> ) di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sebagai pendistribusi dan pengolah air bersih yang bisa berasal dari air laut (ex: seperti yang dilakukan PT. LIS) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	√		Sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih kawasan industri yang cukup banyak
6	Jaringan Transportasi	Pelebaran jalan menuju kawasan industri (Jl. Raya Deandles) yang dibantu oleh pemerintah daerah terutama dari Kabupaten Lamongan menuju kawasan industri maritim sebagai penunjang jalur logistik	√		Menunjang proses distribusi industri
7		Pembangunan dry port di kawasan industri maritim Kabupaten Lamongan sehingga dapat mengurangi dwelling time karena kegiatan bea cukai dapat dilakukan disana tanpa harus mengantri di Pelabuhan Tanjung Perak	√		Menunjang proses distribusi industri
8		Membangun jalan kolektor primer (Jl. Raya Pucuk-Brondong) yang menghubungkan menuju jalan tol yang direncanakan akan melewati tengah Kabupaten Lamongan (di	√		Menunjang proses distribusi industri

		sekitar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)			
9	Industri Penunjang	Pembangunan klaster industri pendukung di dalam kawasan industri maritim	√		Sebagai efisiensi proses produksi pelaku industri maritim
10	Kelembagaan	Pembentukan kelembagaan yang berasal dari pengembang kawasan industri sehingga dapat memantau langsung proses kegiatan di dalam kawasan tersebut	√		Untuk mengawasi dan mengelola kawasan industri maritim

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Surabaya, 17 September 1995 yang berdomisili di Surabaya. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD – SMA Alhikmah Surabaya. Penulis melanjutkan studi di Jurusan Fisika Universitas Airlangga pada tahun 2013 setelah menyelesaikan pendidikan SMA, kemudian peneliti pindah studi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh

Nopember pada tahun 2014 dan terdaftar dengan NRP 0821144000073. Penulis dapat dihubungi melalui email [jpi.patria@gmail.com](mailto:jpi.patria@gmail.com).